



RLPPD

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020



**PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
BAB I CAPAIAN KINERJA MAKRO		I.1
1. Dasar Hukum		I.1
2. Perencanaan Pembangunan.....		I.23
3. Capaian Kinerja Makro.....		I.76
 BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN		
DASAR		II.1
1. Urusan Pendidikan.....		II.1
2. Urusan Kesehatan		II.14
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....		II.16
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		II.26
5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.....		II.26
6. Urusan Sosial		II.32
 BAB III HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN		
PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA		III.1
A. Hasil EPPD		III.1
B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.....		III.6
 BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN		
ANGGARAN DAERAH		IV.1
 BAB V REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN		
DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS		
PENGELUARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT		
JENIS PEMBIAYAAN		V.1
 BAB VI INOVASI DAERAH		VI.1

BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. DASAR HUKUM

a. Pembentukan Provinsi Lampung

Secara Yuridis Formal Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tanggal 18 Maret 1964, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan sebagai Keresidenan Lampung. Pada saat pembentukannya Ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Praja Tanjungkarang – Telukbetung. Kota Praja Tanjungkarang – Telukbetung berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah menjadi Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tanggal 17 Juni 1983, nama Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung diganti menjadi Kotamadya Bandar Lampung.

Tabel 1. Dasar Hukum Pembentukan Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

No.	KabKota	Dasar Hukum Pembentukan
1.	Lampung Selatan	Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964)
2.	Lampung Tengah	Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964)
3.	Lampung Utara	Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964)
4.	Lampung Barat	UU No.6 / 1991 tanggal 16 Agustus 1991
5.	Tulang Bawang	UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997
6.	Tanggamus	UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997
7.	Lampung Timur	UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999
8.	Way Kanan	UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999
9.	Bandar Lampung	UU No.14/1964 (PP No.24/83 tgl 17 Juni 1983)
10.	Metro	UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999
11.	Pesawaran	UU No.33 / 2007 tanggal 10 Agustus 2007
12.	Pringsewu	UU No.48 / 2008 tanggal 6 November 2008
13.	Mesuji	UU No.49 / 2008 tanggal 6 November 2008
14.	Tulang Bawang Barat	UU No.50 / 2008 tanggal 6 November 2008
15.	Pesisir Barat	UU No.22 / 2012 tanggal 25 Oktober 2012

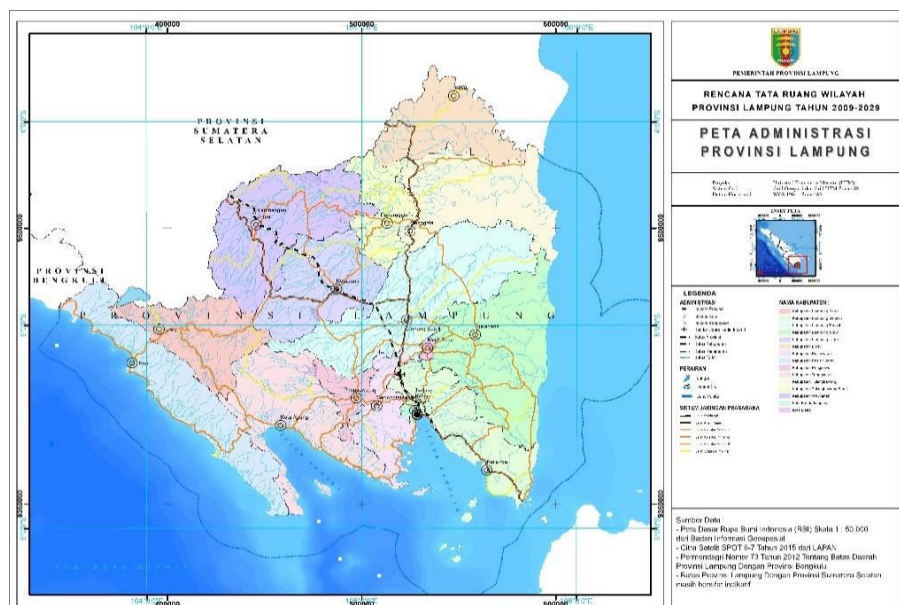
Sumber : Biro Hukum Setdaprov Lampung

b. Data Geografis

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $3^{\circ}45'$ sampai $6^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'$ sampai $105^{\circ}50'$ Bujur Timur. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km² termasuk 188 pulau disekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang 24.820 km² dan panjang garis pantai lebih kurang 1.105 km. Garis pantai perairan Lampung secara garis besar terdiri atas empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudera Indonesia di sebelah barat

Gambar 1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung



Sumber: RKPD Provinsi Lampung 2020

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.

8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

Sementara itu, secara luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah Kabupaten terluas di Provinsi Lampung dan juga memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa terbanyak. Untuk wilayah terkecil dimiliki oleh Kota Metro seiring kecilnya luas wilayah, Kota Metro pun memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan tersedikit di Provinsi Lampung.

Tabel 2. Data Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

No.	Kab/Kota	Σ Kec	Σ Desa/Kel	Σ Luas (Ha)
1.	Lampung Barat	15	136	212.603,25
2.	Tanggamus	20	302	290.270,82
3.	Lampung Selatan	17	260	221.952,68
4.	Lampung Timur	24	264	386.527,17
5.	Lampung Tengah	28	314	454.400,21
6.	Lampung Utara	23	247	252.954,22
7.	Way Kanan	14	227	366.070,58
8.	Tulang Bawang	15	151	313.074,28
9.	Pesawaran	11	144	127.911,40
10.	Pringsewu	9	131	61.447,57
11.	Mesuji	7	105	220.577,13
12.	Tulang Bawang Barat	9	96	124.759,03
13.	Pesisir Barat	11	118	304.613,37
14.	Bandar Lampung	20	126	18.325,68
15.	Metro	5	22	7.315,38
Provinsi Lampung		228	2.643	3.362.802,75

Sumber : RKPD Provinsi Lampung 2020

c. Jumlah Penduduk

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2020 (s.d 30 JUNI 2020)
1	Lampung selatan	1,048,799
2	Lampung tengah	1,483,856
3	Lampung utara	625,025
4	Lampung barat	306,890
5	Tulang bawang	427,004
6	Tanggamus	650,900
7	Lampung timur	1,129,045
8	Way kanan	479,199
9	Pesawaran	474,200
10	Pringsewu	406,017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2020 (s.d 30 JUNI 2020)
11	Mesuji	231,064
12	Tulang bawang barat	278,430
13	Pesisir barat	161,509
14	Bandar lampung	1,189,297
15	Metro	171,531
JUMLAH		9,062,766

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung (Laporan Perkembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Lampung Bulan November 2020)

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

1.e.1. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung)
(1)	(2)
I.	SEKRETARIAT DAERAH
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	b. Biro Kesejahteraan Rakyat
	c. Biro Hukum
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan

NO.	<p style="text-align: center;">NAMA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung)</p>
(1)	(2)
	a. Biro Perekonomian
	b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	c. Biro Administrasi Pembangunan
3.	Asisten Administrasi Umum
	a. Biro Organisasi
	b. Biro Umum
	c. Biro Administrasi Pimpinan
II.	STAF AHLI GUBERNUR
1.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM
III.	SEKRETARIAT DPRD
IV.	INSPEKTORAT
V.	DINAS DAERAH
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
4.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Tenaga Kerja
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan
20.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
22.	Dinas Perkebunan
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24.	Dinas Kehutanan
25.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
VI.	BADAN DAERAH
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung)
(1)	(2)
3.	Badan Pendapatan Daerah
4.	Badan Kepegawaian Daerah
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
VII.	Cabang Dinas : 14
VIII.	UPTD : 92
IX.	Satuan Pendidikan : 359
VII.	Rumah Sakit Daerah (Pergub. Nomor 11 Tahun 2020)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek
2.	Rumah Sakit Jiwa Daerah
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

a) Nomenklatur Cabang Dinas

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kelas A;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kelas A;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kelas A;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kelas A;
 - e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kelas A;
 - f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kelas A; dan
 - g. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kelas A.
- 2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Kelas A;
 - b. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Kelas A;
 - c. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Kelas A;
 - d. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Kelas A;

- e. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Kelas A;
- f. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Kelas A; dan
- g. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Kelas A.

b) Nomenklatur UPTD dan Satuan Pendidikan :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
 - b. UPTD Museum Negeri Lampung Kelas A;
 - c. UPTD Museum Ketransmigrasian Kelas A;
 - d. UPTD Taman Budaya Kelas A; dan
 - e. UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari:
 - 1. SMAN 1 Bandar Lampung;
 - 2. SMAN 2 Bandar Lampung;
 - 3. SMAN 3 Bandar Lampung;
 - 4. SMAN 4 Bandar Lampung;
 - 5. SMAN 5 Bandar Lampung;
 - 6. SMAN 6 Bandar Lampung;
 - 7. SMAN 7 Bandar Lampung;
 - 8. SMAN 8 Bandar Lampung;
 - 9. SMAN 9 Bandar Lampung;
 - 10. SMAN 10 Bandar Lampung;
 - 11. SMAN 11 Bandar Lampung;
 - 12. SMAN 12 Bandar Lampung;
 - 13. SMAN 13 Bandar Lampung;
 - 14. SMAN 14 Bandar Lampung;
 - 15. SMAN 15 Bandar Lampung;
 - 16. SMAN 16 Bandar Lampung;
 - 17. SMAN 17 Bandar Lampung;
 - 18. SMKN 1 Bandar Lampung;
 - 19. SMKN 2 Bandar Lampung;
 - 20. SMKN 3 Bandar Lampung;
 - 21. SMKN 4 Bandar Lampung;
 - 22. SMKN 5 Bandar Lampung;
 - 23. SMKN 6 Bandar Lampung;

24. SMKN 7 Bandar Lampung;
25. SMKN 8 Bandar Lampung;
26. SMKN 9 Bandar Lampung;
27. SLB Bina Insani Bandar Lampung;
28. SLB Dharma Bakti Pertiwi Bandar Lampung;
29. SLB PKK Lampung;
30. SMAN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
31. SMAN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
32. SMAN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
33. SMAN 2 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
34. SMAN 1 Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
35. SMAN 1 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
36. SMAN 1 Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
37. SMAN 1 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
38. SMAN 1 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
39. SMAN 1 Palas Kabupaten Lampung Selatan;
40. SMAN 1 Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
41. SMAN 1 Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
42. SMAN 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
43. SMAN 1 Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
44. SMAN 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
45. SMAN 1 Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
46. SMKN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
47. SMKN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
48. SMKN 1 Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
49. SMKN 1 Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
50. SMKN 1 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
51. SMKN 1 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
52. SMKN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
53. SMKN 1 Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
54. SMKN Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
55. SMKN Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
56. SMKN I Way Panji Kabupaten Lampung Selatan;
57. SMAN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

58. SMAN 2 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
59. SMAN 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran;
60. SMAN 2 Kedondong Kabupaten Pesawaran;
61. SMAN 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
62. SMAN 2 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
63. SMAN 1 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
64. SMAN 2 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
65. SMAN 1 Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran;
66. SMAN 2 Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran;
67. SMAN 1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
68. SMAN 2 Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
69. SMAN 1 Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
70. SMAN 1 Way Lima Kabupaten Pesawaran;
71. SMKN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
72. SMKN 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
73. SMKN 1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
74. SMKN 1 Ketibung Kabupaten Pesawaran;
75. SMKN Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
76. SMAN 1 Metro Kota Metro;
77. SMAN 2 Metro Kota Metro;
78. SMAN 3 Metro Kota Metro;
79. SMAN 4 Metro Kota Metro;
80. SMAN 5 Metro Kota Metro;
81. SMAN 6 Metro Kota Metro;
82. SMAN Olah Raga Metro Kota Metro;
83. SMKN 1 Metro Kota Metro;
84. SMKN 2 Metro Kota Metro;
85. SMKN 3 Metro Kota Metro;
86. SMKN 4 Metro Kota Metro;
87. SMKN 5 Metro Kota Metro;
88. SMK Gajah Tunggal Metro Kota Metro;
89. SLB Negeri Metro Kota Metro;
90. SLB Wiyata Dharma Metro Kota Metro;
91. SMAN 1 Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;

92. SMAN 1 Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
93. SMAN 1 Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
94. SMAN 1 Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
95. SMAN 1 Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;
96. SMAN 1 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
97. SMAN 1 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
98. SMAN 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
99. SMAN 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah;
100. SMAN 1 Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
101. SMAN 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
102. SMAN 1 Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
103. SMAN 1 Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
104. SMAN 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
105. SMAN 1 Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
106. SMAN 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
107. SMAN 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
108. SMAN 1 Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
109. SMAN 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
110. SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
111. SMAN 1 Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
112. SMAN 1 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
113. SMAN 1 Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
114. SMAN 1 Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
115. SMKN 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
116. SMKN 2 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
117. SMKN 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
118. SMKN 1 Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
119. SMKN 1 Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
120. SMKN 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
121. SMKN 1 Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
122. SMKN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
123. SMKN 1 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
124. SMK Unggul Terpadu Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
125. SLB Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

- 126.SMAN 1 Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- 127.SMAN 2 Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 128.SMAN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- 129.SMAN 1 Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur;
- 130.SMAN 1 Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- 131.SMAN 1 Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- 132.SMAN 1 Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- 133.SMAN 1 Kibang Kabupaten Lampung Timur;
- 134.SMAN 1 Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- 135.SMAN 1 Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- 136.SMAN 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- 137.SMAN 1 Melinting Kabupaten Lampung Timur;
- 138.SMAN 1 Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- 139.SMAN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- 140.SMAN 1 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- 141.SMAN 1 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- 142.SMAN 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 143.SMAN 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- 144.SMAN 1 Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
- 145.SMAN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- 146.SMAN 1 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- 147.SMKN 1 Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur;
- 148.SMKN 1 Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- 149.SMKN 1 Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 150.SMKN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- 151.SMKN 1 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- 152.SMKN 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- 153.SMKN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- 154.SMKN 1 Trimurjo Kabupaten Lampung Timur;
- 155.SMKN 1 Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- 156.SMKN 1 Braja Selebih Kabupaten Lampung Timur;
- 157.SMKN 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 158.SMKN Praja Utama Kabupaten Lampung Timur;
- 159.SLB Negeri Lampung Timur;

- 160.SMAN 1 Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- 161.SMAN 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- 162.SMAN 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus;
- 163.SMAN 2 Ulubelu Kabupaten Tanggamus;
- 164.SMAN 1 Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
- 165.SMAN 1 Bulok Kabupaten Tanggamus;
- 166.SMAN 1 Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus;
- 167.SMAN 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- 168.SMAN 1 Kelumbayan Kabupaten Tanggamus;
- 169.SMAN 1 Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus;
- 170.SMAN 1 Limau Kabupaten Tanggamus;
- 171.SMAN 1 Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus;
- 172.SMAN 1 Semaka Kabupaten Tanggamus;
- 173.SMAN 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- 174.SMAN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- 175.SMAN 1 Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- 176.SMAN 1 Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- 177.SMKN 1 Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
- 178.SMKN 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- 179.SMKN 1 Pugung Kabupaten Tanggamus;
- 180.SMKN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- 181.SMKN 1 Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- 182.SMAN 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- 183.SMAN 2 Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- 184.SMAN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- 185.SMAN 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- 186.SMAN 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
- 187.SMAN 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- 188.SMAN 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- 189.SMAN 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- 190.SMAN 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- 191.SMAN 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 192.SMKN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- 193.SMKN Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;

- 194.SMKN Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 195.SLB Negeri Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- 196.SMAN 1 Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- 197.SMAN 2 Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- 198.SMAN 1 Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- 199.SMAN 1 Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
- 200.SMAN 1 Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- 201.SMAN 1 Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- 202.SMAN 1 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- 203.SMAN 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- 204.SMAN 1 Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- 205.SMKN 1 Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- 206.SMKN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- 207.SMAN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 208.SMAN 2 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 209.SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 210.SMAN 4 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 211.SMAN 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- 212.SMAN 2 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- 213.SMAN 1 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- 214.SMAN 2 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- 215.SMAN 1 Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara;
- 216.SMAN 1 Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara;
- 217.SMAN 1 Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara;
- 218.SMAN 1 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- 219.SMAN 1 Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- 220.SMAN 1 Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara;
- 221.SMAN 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- 222.SMAN 1 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- 223.SMAN 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- 224.SMAN 1 Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- 225.SMAN 1 Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara;
- 226.SMAN 1 Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- 227.SMAN 1 Bhakti Mulya Kabupaten Lampung Utara;
- 228.SMAN 1 Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;

229.SMAN 1 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
230.SMKN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
231.SMKN 2 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
232.SMKN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
233.SMKN 1 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
234.SMKN 1 Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
235.SMKN 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
236.SMKN 1 Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
237.SMKN 1 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
238.SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
239.SMAN 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
240.SMAN 3 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
241.SMAN 1 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
242.SMAN 2 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
243.SMAN 1 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
244.SMAN 2 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
245.SMAN 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
246.SMAN 2 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
247.SMAN 1 Kasui Kabupaten Way Kanan;
248.SMAN 2 Kasui Kabupaten Way Kanan;
249.SMAN 1 Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
250.SMAN 2 Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
251.SMAN 1 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
252.SMAN 2 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
253.SMAN 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
254.SMAN 2 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
255.SMAN 1 Banjit Kabupaten Way Kanan;
256.SMAN 2 Banjit Kabupaten Way Kanan;
257.SMAN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan;
258.SMAN 1 Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan;
259.SMAN 1 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;
260.SMAN 2 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;
261.SMAN 1 Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
262.SMAN 2 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;
263.SMAN 1 Gedung Harapan Kabupaten Way Kanan;
264.SMKN 1 Banjit Kabupaten Way Kanan

- 265.SMKN 2 Banjit Kabupaten Way Kanan;
266.SMKN 1 Bahuga Kabupaten Way Kanan;
267.SMKN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan;
268.SMKN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
269.SMKN 1 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
270.SMKN 1 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
271.SMKN 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
272.SMKN 1 Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
273.SMKN 1 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
274.SMKN 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
275.SMKN 1 Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
276.SLB Negeri Baradatu Kabupaten Way Kanan;
277.SMAN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
278.SMAN 2 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
279.SMKN 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
280.SMAN 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
281.SMAN 1 Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;
282.SMAN 1 Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
283.SMAN 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat;
284.SMAN 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
285.SMAN 1 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat;
286.SMAN 1 Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
287.SMAN 1 Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat;
288.SMAN 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
289.SMAN 1 Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
290.SMAN 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat;
291.SMAN 1 Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;
292.SMAN 1 Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
293.SMKN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
294.SMKN 1 Suoh Kabupaten Lampung Barat;
295.SMKN 1 Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
296.SMAN 1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
297.SMAN 2 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
298.SMAN 3 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
299.SMAN 1 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
300.SMAN 2 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

- 301.SMAN 1 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- 302.SMAN 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- 303.SMAN 1 Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 304.SMAN 1 Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- 305.SMAN 1 Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
- 306.SMAN 1 Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 307.SMAN 1 Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 308.SMAN 1 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- 309.SMAN 1 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- 310.SMAN 1 Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
- 311.SMKN 1 Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang;
- 312.SMKN 1 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- 313.SMKN 1 Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 314.SMKN 1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 315.SMKN 1 Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
- 316.SMKN 1 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- 317.SMKN 1 Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;
- 318.SMKN 1 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- 319.SLB Negeri Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang;
- 320.SMAN 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 321.SMAN 2 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 322.SMAN 3 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 323.SMAN 1 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 324.SMAN 2 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 325.SMAN 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 326.SMAN 2 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 327.SMAN 3 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 328.SMAN 1 Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 329.SMAN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 330.SMAN 1 Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 331.SMAN 1 Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 332.SMAN 1 Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 333.SMAN 1 Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 334.SMA PGRI Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 335.SMKN 1 Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 336.SMKN 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

337.SMAN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji;
338.SMAN 2 Way Serdang Kabupaten Mesuji;
339.SMAN 1 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
340.SMAN 2 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
341.SMAN 1 Mesuji Lampung Kabupaten Mesuji;
342.SMAN 1 Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
343.SMAN 1 Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
344.SMAN 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
345.SMAN 1 Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji;
346.SMKN 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
347.SMKN 2 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
348.SMKN 1 Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
349.SMKN 1 Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
350.SMKN 1 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
351.SMAN 1 Banjar Baru Kabupaten Mesuji;
352.SMKN 1 Banjar Margo Kabupaten Mesuji;
353.SMKN 1 Pagar Dewa Kabupaten Mesuji;
354.SMKN 1 Penawartama Kabupaten Mesuji;
355.SMKN 1 Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji;
356.SMKN 1 Kebun Tebu Kabupaten Mesuji;
357.SMKN 1 Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
358.SMKN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji; dan
359.SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lampung.

- 2) Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
 - c. UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A.
- 3) Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi, terdiri dari:
 - a. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Kelas A;
 - c. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas A;
 - d. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Kelas A;
 - f. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Kelas A; dan
 - g. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A.

- 4) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Kelas A.
- 5) Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kelas A;
 - b. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan Kelas A;
 - c. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kelas A;
 - d. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih Kelas A;
 - e. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Kelas A;
 - f. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kelas A; dan
 - g. UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Kelas A.
- 6) Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung Kelas A;
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda Kelas A;
 - c. UPTD Balai Latihan Kerja Metro Kelas A;
 - d. UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung Kelas A;
 - e. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Kelas A; dan
 - f. UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A.
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
8. Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.
9. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yaitu:
 - a. UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelas A;
 - a1. UPTD Terminal Kelas A; dan
 - a2. UPTD Kepelabuhan Kelas A;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Kelas A; dan
 - b. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kelas A.
11. Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu:

UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Kelas A.

12. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau Kelas A;
 - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas Kelas A; dan
 - e. UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung Kelas A.
13. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu:

UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger, Kelas A.
14. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - c. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - d. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian, Kelas A;
 - e. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering Kelas A; dan
 - f. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Kelas A.
15. Dinas Perkebunan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Kelas A; dan
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk Kelas A.
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
 - b. UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai Kelas A;
 - c. UPTD Pembibitan Ternak Sapi Kelas A; dan
 - d. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Kelas A.
17. Dinas Kehutanan, yaitu:
 - a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Kelas A ;
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat Kelas A;
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa Kelas A;
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur Kelas A;

- e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua Kelas A;
 - f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya Kelas A;
 - g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan Kelas A;
 - h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Waya Kelas A;
 - h1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak Kelas A;
 - i. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Tegi Kelas A;
 - j. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara Kelas A;
 - k. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba Kelas A;
 - l. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran Kelas A;
 - m. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak Kelas A;
 - n. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Serampok Kelas A
 - n1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang Kelas A; dan
 - o. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Kelas A.
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Kelas A; dan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:
- UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kelas A.
20. Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kelas A;
 - c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Kelas A;
 - d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V Kelas A;
 - f. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI Kelas A;
 - g. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII Kelas A;
 - g1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIII Kelas A;
 - h. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII Kelas A;
 - i. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IX Kelas A;
 - i1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIV Kelas A;
 - j. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah X Kelas A;
 - k. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XI Kelas A;
 - 1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XV Kelas A; dan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XII Kelas A;

1.e.2. Pegawai Pemerintah

**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Berdasarkan Perangkat Daerah & Jenis Kelamin
Keadaan s.d. Desember 2020**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JML
		L	P	
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	1	0	1
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	0	1
3	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0	0	0
4	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	0	0	0
5	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	19	13	32
6	BIRO HUKUM	24	25	49
7	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	21	28	49
8	BIRO PEREKONOMIAN	16	22	38
9	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	17	13	30
10	BIRO UMUM	86	49	135
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	36	17	53
12	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	35	29	64
13	BIRO ORGANISASI	18	19	37
14	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	1	0	1
15	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0	0	0
16	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	1
17	SEKRETARIAT DPRD	76	58	134
18	INSPEKTORAT PROVINSI	89	59	148
Jumlah		441	332	773
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.566	4.753	8.319
2	DINAS KESEHATAN	130	253	383
3	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	233	102	335
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	317	92	409
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	151	25	176
6	DINAS SOSIAL	90	78	168
7	DINAS TENAGA KERJA	150	68	218
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19	53	72
9	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	67	46	113
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	49	32	81
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	19	39
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	42	35	77
13	DINAS PERHUBUNGAN	81	35	116
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	49	47	96
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	43	45	88
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	56	57	113
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	69	36	105
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	34	56	90

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JML
		L	P	
1	2	3	4	5
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	80	44	124
20	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	37	46	83
21	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA	199	165	364
22	DINAS PERKEBUNAN	56	72	128
23	DINAS KEHUTANAN	385	101	486
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	82	40	122
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	76	62	138
26	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	47	17	64
Jumlah		6.128	6.379	12.507
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	63	53	116
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	68	81	149
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	259	160	419
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	50	47	97
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	48	42	90
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	27	39	66
7	BADAN PENGHUBUNG	44	30	74
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34	12	46
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	46	14	60
Jumlah		639	478	1.117
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HI. ABDUL MOELOEK	374	654	1.028
2	RUMAH SAKIT JIWA	79	100	179
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA	7	8	15
4	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	3	0	3
5	SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2	0	2
Jumlah		465	762	1.227
Jumlah Seluruh		7.673	7.951	15.624

sumber data simplified.lampungprov.go.id

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup memberi harapan, hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan.

Namun demikian, Provinsi Lampung sebagai wilayah transit atau penyangga lintas pulau, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung (berdasarkan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020) meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, kualitas SDM, pendapatan regional, daya dukung lingkungan, dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah, terangkum dalam uraian sebagai berikut:

a) Permasalahan Bidang Ekonomi

1. Selama 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Lampung belum bergerak pada arah pertumbuhan yang lebih progresif, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi masih berada pada kisaran 5,0 – 5,25 persen;
2. Dari sisi permintaan, struktur ekonomi Provinsi Lampung masih mengandalkan konsumsi rumah tangga. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui kebijakan makro dan mikro ekonomi. Dari sisi penawaran (sektoral), data-data statistik beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor-sektor transportasi, komunikasi dan konstruksi yang melibatkan lebih sedikit tenaga kerja tumbuh meningkat dan menjadi *driven* pertumbuhan ekonomi. Sementara, sektor ekonomi yang dominan (pertanian dalam arti luas) yang melibatkan lebih banyak tenaga kerja justru cenderung mengalami penurunan kapasitas dan produktifitas. Dari uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa lemahnya produktifitas sektor ekonomi yang dominan (utamanya, pertanian dalam arti luas) dapat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat secara umum dalam perekonomian.
3. Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas pada komoditas berbasis sumber daya alam, sehingga belum mampu memiliki daya saing maupun nilai tambah yang tinggi serta ketergantungan harga komoditas di pasar global;

4. Untuk meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi, diperlukan dukungan sumber-sumber pertumbuhan yang mengarah pada peningkatan investasi yang mampu memberi nilai tambah produk dan menyerap tenaga kerja, melalui dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai hingga pada tingkat pemerintah kabupaten/kota.
5. Tingkat pendapatan regional penduduk secara bruto masih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
6. Data-data inflasi daerah beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat harga yang terjaga dan mendukung perekonomian daerah. Oleh karenanya upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas inflasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, yang akan berdampak positif bagi produsen maupun konsumen;
7. Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.
8. Kualitas lembaga dan SDM koperasi belum optimal.

b) Permasalahan Infrastruktur Daerah

1. Lampung merupakan wilayah perlintasan antarprovinsi dan antarpulau, sehingga beban jalan menjadi lebih tinggi; namun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2017 sudah mencapai 77 persen, namun masih perlu terus ditingkatkan;
2. Kualitas infrastruktur dan prasarana terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih besar. Tersedianya investasi ataupun dukungan dana pemerintah yang lebih ekspansif masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan fasilitas di sektor transportasi darat, laut, maupun udara;
3. Perkembangan jumlah pengguna listrik (masyarakat dan dunia usaha) tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan daya listrik. Ketersediaan listrik yang belum memadai, memerlukan investasi dan pemanfaatan energi alternatif baik dalam skala besar, menengah dan mikro.

c) Bidang Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

1. Persentase penduduk miskin masih pada kisaran 13% - 14%, lebih tinggi

dibanding rata-rata nasional;

2. Tingkat IPM masih lebih rendah di tingkat regional Sumatera maupun rata-rata nasional;
3. Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
4. Perbaikan kualitas SDM perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas ekonominya melalui peningkatan keberdayaan dalam mengakses sumber daya dan hasil-hasil pembangunan.
5. Tingkat ketimpangan antar kelompok pendapatan (*gini ratio*) masih berada pada level “sedang” perlu diperbaiki menuju level yang lebih “rendah”.

d) Bidang Pertanian dan Kelautan

1. Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama dan produktivitasnya dalam perekonomian masih relatif rendah dan cenderung menurun;
2. Dalam rangka mendukung revitalisasi pembangunan sektor pertanian, memerlukan dukungan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi dan penataan kawasan/lahan pertanian berkelanjutan sebagai kendali terhadap alih fungsi lahan pertanian.
3. Pentingnya menjaga stabilitas harga ditingkat produsen maupun konsumen yang diikuti dengan distribusi pangan yang merata;
4. Potensi kekayaan laut dan perikanan darat belum termanfaatkan secara optimal.
5. Masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan hasil laut dan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

e) Bidang Lingkungan Hidup

1. Separuh luasan kawasan hutan dalam kondisi rusak. Hutan sebagai penyangga sumber daya air dan keragaman hayati memerlukan penanganan secara berkelanjutan guna mendukung kelangsungan hidup manusia sebagai pelaku dan objek pembangunan;
2. Pemanfaatan hutan sebagai kawasan konservasi masih perlu dioptimalkan mengingat hutan dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata maupun tempat pendidikan.

f) Kapasitas Fiskal Daerah

Pertumbuhan PAD masih dibawah 5%. Pajak daerah merupakan salah satu fungsi *budgeter* penting yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah, diperlukan langkah optimalisasi penerimaan perpajakan yang

dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha. Disamping itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung daya saing daerah.

g) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Belum memiliki ikon wisata dan paket destinasi wisata;
2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW) belum didukung sarana dan prasarana yang baik;
3. Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang pariwisata;
4. Ekonomi kreatif belum berkembang.

h) Bidang Koperasi dan UMKM

1. Masih minimnya jumlah Koperasi yang aktif melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan;
2. Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang Koperasi;
3. Terbatasnya akses modal untuk pengembangan Koperasi dan UMKM;
4. Belum tersedianya jaringan bisnis yang handal untuk melakukan;
5. pemasaran hasil produksi pelaku UMKM.

i) Bidang Penataan Ruang

1. Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
2. Terdapat deviasi pemanfaatan ruang karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

j) Bidang Penanggulangan Bencana

1. Kualitas SDM dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana belum memadai;
2. Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana;
3. Kualitas dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal.

k) Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

1. Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;
2. Rentan terhadap konflik horisontal;
3. Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah.
4. Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 memerlukan dukungan kamtibmas yang kondusif;
5. Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan.

6. Munculnya *hoax*, perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

l) Bidang Kebudayaan

1. Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
2. Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
3. Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri;
4. Pemanfaatan nilai budaya bagi pembangunan masih terbatas.

m) Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah:

1. Melemahnya karakter bangsa pada generasi muda;
2. Merebaknya bahaya narkoba di kalangan generasi muda;
3. Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk memwadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri;
5. Lemahnya pola pembinaan bagi atlet;
6. Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat provinsi maupun nasional;

n) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih rentan permasalahan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.
2. Masih sering timbulnya KDRT dan Kekerasan pada perempuan dan anak.

o) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
2. Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
3. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
4. Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan;
5. Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
6. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.

p) Bidang Sosial

1. Kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. Tingginya urbanisasi dari desa ke kota atau keluar provinsi;
3. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;
4. Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya;

5. Komunikasi yang konstruktif antarkelompok masyarakat dari berbagai latar belakang (sosial, ekonomi, budaya, dan agama) masih perlu diperkuat.

q) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan;
2. Tingkat pengangguran terbuka usia muda;
3. Balai Latihan Kerja di Provinsi Lampung kekurangan tenaga pengajar (instruktur) dan peremajaan peralatan praktek yan lebih modern.

r) Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Terbatasnya inovasi daerah.

s) Bidang Otonomi Daerah, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1. Perlunya sinkronisasi implelementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
2. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
3. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur;
4. Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi;
5. Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas;
6. Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

t) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
2. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik dan yang bernuansa sara.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019 – 2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : “Rakyat Lampung Berjaya”. Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "*subyek utama*" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya

yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a) Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
- b) Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- c) Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- d) Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- b. Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.

- d. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- e. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- f. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-1, Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai yang didukung dengan kepastian hukum:

1. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
2. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
4. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan.
5. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya.
6. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
7. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
8. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah;

Misi 2 : Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik

Komitmen dalam melaksanakan Misi-2, Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik:

1. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
3. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
4. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
5. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
6. Mengembangkan peran BUMD untuk membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan;
7. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan.
8. Mendukung upaya peningkatan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar (SD, SMP) berkerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait;
9. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) bekerjasama dengan lembaga terkait;
10. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
11. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel:

1. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
2. Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;

3. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
4. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi kaum difable;
5. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difable.

Misi 4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah

Komitmen dalam melaksanakan Misi-4, Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi, konektivitas wilayah, dan sistem permukiman:

1. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
2. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
3. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
4. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
5. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
6. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
7. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan.
8. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi

Misi 5 :Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5, Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan:

1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
3. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
4. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
5. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
6. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
7. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
8. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Perkerja

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama:

1. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
2. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
3. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;

4. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
5. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
6. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
7. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
8. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
9. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

Janji Kerja

Pencapaian Misi dengan dibarengi komitmen dilakukan melalui 33 Janji kerja yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Janji kerja tersebut antara lain :

1. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat :
 - a) Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pesitisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani
 - b) Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani
 - c) Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani
 - d) Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi
2. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
3. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu
4. Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan
5. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri.
6. Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :
 - a) Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendamping pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan

- b) Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
 - c) Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia
 - d) Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi
 - e) SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan
7. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar
 8. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan :
 - a) Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung
 - b) Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia
 - c) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata
 - d) Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)
 9. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
 10. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional
 11. Infrastruktur Lampung Berjaya
 - a) Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota.
 - b) Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya.
 - c) Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
 - d) Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi
 12. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat :
 - a) Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur.

- b) Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat
 - c) Perbaiki dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong
13. Lampung Terang Berjaya. Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada :
- a) Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik
 - b) mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi
 - c) kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian
14. Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :
- a) Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan
 - b) Mengorektasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat
 - c) Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan
15. Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
16. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
18. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan :
- a) Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b) Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis startup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA.
 - c) Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lainnya
19. Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
- a) Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha
 - b) Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri

- c) Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi
20. Lampung Menuju Bebas Narkoba
- a) Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama
 - b) Memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan
 - c) Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi
21. Perempuan Berjaya :
- a) Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
 - b) Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi
 - c) Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.
22. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
23. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :
- a) Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal
 - b) Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran
 - c) Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
 - d) Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)
24. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan :
- a) Menyederhanakan perizinan
 - b) Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha
 - c) Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan
 - d) Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi
25. Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.
26. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :
- a) Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak
 - b) Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak
 - c) Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak

- d) Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik
 - e) Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak
 - f) memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu
27. Anak Muda Berjaya :
- a) Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas
 - b) Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda
 - c) Mencetak wirausahawan muda
 - d) Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota
28. Lampung Sehat :
- a) Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas
 - b) Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit
29. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada :
- a) Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga
 - b) Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi altet berprestasi
 - c) Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten
30. Smart Village
- a) Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa
 - b) Memfasilitasi digitalisasi administrasi desa
 - c) E-participation : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi
31. Pendampingan program pembangunan desa
- a) Memberikan fasiltasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa
 - b) Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
32. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
- a) Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
 - b) Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi

- c) Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan
- d) Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja
- e) Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- g) Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
- h) Membangun pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

33. APBD Rakyat Berjaya :

- a) Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan public
- b) Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Pendidikan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kesehatan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan RSBNH	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
		Kesehatan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Kesehatan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Jiwa
		Program peningkatan sarana dan prasara aparatur	Rumah Sakit Jiwa
		Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah	Rumah Sakit Jiwa
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perasngkat daerah	Rumah Sakit Jiwa
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Jiwa
		Program Mutu Layanan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa
		Program Mutu Layanan Penunjang medis	Rumah Sakit Jiwa

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Jiwa
		Sosial	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Sosial
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial
		Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Sosial
		Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Tenaga Kerja	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pemberdayaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan
		Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Dinas Pemberdayaan
		Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta	Dinas Pemberdayaan
		Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan
		Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Kependudukan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan
		Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan
		Kepemudaan dan Olahraga	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemuda dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pemuda dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan
		Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	Dinas Pemuda dan
		Program Olahraga Prestasi	Dinas Pemuda dan
		Program Pembudayaan Olahraga	Dinas Pemuda dan
		Program Peningkatan sarana prasarana dan kemitraan	Dinas Pemuda dan
		Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga	Dinas Pemuda dan
		Kebudayaan	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Keragaman Budaya	
		Perpustakaan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perpustakaan dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Perpustakaan dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan
		Program Layanan, Teknologi Informasi dan komunikasi, pelestarian dan kerjasama perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan
		Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan
		Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan
		Kearsipan	
		Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan
2	PENGEMBANGAN EKONOMI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Bina
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	Dinas Perumahan, Kawasan
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengelolaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pengelolaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Dinas Pengelolaan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta aset Perangkat Daerah	Dinas Pengelolaan
		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Program Penatagunaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan, Kawasan
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Perumahan, Kawasan
		Program Peningkatan Kapasaitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan
		Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan
		Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan
		Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penanggulangan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	Badan Penanggulangan
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan
		Program Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penegakan Peraturan Perundang undangan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pangan	
		Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan,
		Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi, Pangan	Dinas Tanaman Pangan,
		Pertanahan	
		Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan
		Lingkungan Hidup	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan , Evaluasi Kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pemberdayaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan
		Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan	Dinas Pemberdayaan
		Program Pengembangan, Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan
		Program Pembinaan kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Dinas Pemberdayaan
		Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA	Dinas Pemberdayaan
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan
		Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan
		Perhubungan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana, Sarana dan fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Komunikasi dan Informatika	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi,
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Komunikasi,
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi,
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi,
		Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi,
		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan
			Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan
		Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	Dinas Penanaman Modal dan
		Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan
		Statistik	
		Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi,
		Persandian	
		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi,
		Urusan Pilihan	
		Kelautan dan Perikanan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Ruang Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pariwisata	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Penyediaan dan Pengawasan Benih TPH Bermutu dan Bersertifikat.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	Dinas Tanaman Pangan,
		Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perkebunan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perkebunan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)	Dinas Perkebunan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Peningkatan Produksi Hasil Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang ASUH	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Peningkatan Kelembagaan Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Kehutanan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	Dinas Kehutanan
		Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan DAS dan RHL	Dinas Kehutanan
		Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Kehutanan
		Peningkatan fungsi kesatuan pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Program Perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Perdagangan	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan atau/jasa	Dinas Perindustrian dan
		Program Pengujian Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		Perindustrian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan
		Program Pengembangan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Dinas Perindustrian dan
		Program Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri	Dinas Perindustrian dan
		Transmigrasi	
		Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan
		Inspektorat	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Inspektorat
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	Inspektorat
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
		Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	Inspektorat
		Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Inspektorat
		Perencanaan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Perencanaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Perencanaan
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Badan Perencanaan
		Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan	Badan Perencanaan
		Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Badan Perencanaan
		Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan
		Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	Badan Perencanaan
		Keuangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan	Badan Pengelola Keuangan dan
		Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Keuangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pendapatan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Badan Pendapatan
		Program peningkatan pelayanan pajak	Badan Pendapatan
		Program peningkatan pelayanan pendapatan non pajak	Badan Pendapatan
		Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan	Badan Pendapatan
		Program pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah	Badan Pendapatan
		Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	Badan Pendapatan
		Badan Kepegawaian Daerah	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kepegawaian
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian
		Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian
		Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Badan Kepegawaian
		Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Pengembangan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Badan Pengembangan
		Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	Badan Pengembangan
		Penelitian dan Pengembangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penelitian dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Badan Penelitian dan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Penelitian dan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Badan Penelitian dan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan
		Penghubung	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penghubung
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penghubung
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Penghubung
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Penghubung
		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah	Badan Penghubung
		Sekretariat Daerah	
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Biro Administrasi Pimpinan
		Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Biro Administrasi Pimpinan
		Program Pelayanan Administrasi Umum	Biro Administrasi Pimpinan
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	Biro Kesejahteraan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Kesejahteraan
		Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	Biro Hukum
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Hukum
		Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Biro Umum
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Umum
		Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Pemerintahan
		Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	Biro Perekonomian
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Perekonomian
		Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	Biro Organisasi
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Organisasi
		Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Biro Layanan Pengadaan
		Sekretariat DPRD	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
		Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD
		Program pembahasan, sosialisasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan produk hukum	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD
		Kesbangpol	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesbangpol
		Program Kewaspadaan Nasional	Badan Kesbangpol
		Program Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
		Program Ketahanan sosial dan kemasyarakatan	Badan Kesbangpol

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1.01.01			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	1		Pendidikan		
1	1	24	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	327,094,222,000,00	307,082,545,800,00
1	1	25	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	87,880,000,000,00	28,209,514,900,00
1	1	26	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	9,200,000,000,00	7.879.288.900,00
1	1	27	Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20,170,000,000,00	12.322.314.000,00
1	1	29	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah I	755.000.000,00	582.824.000,00
1	1	30	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah II	479.000.000,00	355.699.500,00
1	1	31	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah III	325.000.000,00	269.823.500,00
1	1	32	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah IV	479,000,000,00	323.451.000,00
1	1	33	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah V	518.000.000,00	383.275.000,00
1	1	34	Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	4,000,000,000,00	5,340,215,150,00
1	1	35	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah VI	572.000.000,00	356.825.000,00
1	1	36	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah VII	370.000.000,00	347.054.000,00
1	1	37	Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi	13,000,000,000,00	9.193.088.700,00
1	1	38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	141,498,078,000,00	241.519.516.000,00
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	15		Kebudayaan		
2	15	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	3,650,000,000,00	1.748.409.550,00
2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4,077,000,000,00	2.284.23.650,00
2	16	19	Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	4,750,000,000,00	2.446.931.300,00
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	4		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,403,900,000,00	6.611.326.560,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,823,000,000,00	22.152.560.250,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKP 2020	PAGU PERUBAHAN RKP 2020
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	800,000,000,00	1.079.264.750,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	5,000,000,000,00	3,249,621,475,00
1	1	20	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasi	450,000,000,00	217.317.100,00
Sub Total				637,294,200,000,00	653,955,444,085,00
1.02.01			Dinas Kesehatan		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	2		Kesehatan		
1	2	37	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1,650,000,000,00	613.527.880,00
1	2	38	Program Kesehatan Masyarakat	14,372,655,071,00	15.548.491.490,00
1	2	39	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2,450,000,000,00	8,222,551,800,00
1	2	40	Program Pelayanan Kesehatan	67,800,000,000,00	68,184,450,719,00
1	2	41	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8,729,140,800,00	6.843.671.423,00
1	2	42	Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	6,650,000,000,00	1,435,964,900,00
1	2	43	Program Pelayanan RSBNH	9,324,288,000,00	8,476,593,115,00
1	2	44	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	1,600,000,000,00	1.588.840.000,00
1	2	45	Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes	986,282,880,00	433.551.000,00
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	4		Non Urusan (Eks BAU)		
2	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,612,568,500,00	12,037,518,577,00
2	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,727,446,900,00	4.454.958.114,00
2	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	197,617,849,00	71.875.439,00
2	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	900,000,000,00	153.963.350,00
Sub Total				136,000,000,000,00	128,065,957,807,00
1.02.02			Rumah Sakit Abdul Moeloek		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	2		Kesehatan		
1	2	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	86,602,578,000,00	56.180.585.180,00
1	2	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.800.152.000,00	1.800.152.000,00
1	2	34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	200.000.000,00	250,000,000,000,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2			URUSAN PENDUKUNG		
2	2		Non Urusan (Eks BAU)		
2	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,176,988,000,00	10,053,787,820,00
2	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	420.282.000,00	420.282.000,00
Sub Total				300,000,000,000,00	318,454,807,000,00
1.02.03			Rumah Sakit Jiwa		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	2		Kesehatan		
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	645,784,400,00	602.283.400,00
1	2	34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	14.000.000.000,00	12.500.000.000,00
1	2	46	Program Mutu Layanan Keperawatan	204,143,600,00	98.063.600,00
1	2	47	Program Mutu Layanan Penunjang Medis	1,841,227,100,00	4,648,864,700,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	3		Non Urusan (Eks BAU)		
1	3	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,953,438,900,00	5.135.517.950,00
1	3	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,735,236,800,00	1,806,710,500,00
1	3	03	Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1,213,364,000,00	516.031.700,00
5	4	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	406,805,200,00	217.462.900,00
Sub Total				28,000,000,000,00	25,524,934,750,00
1.03.01			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	3	18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	86,391,762,217,00	76,823,615,714,00
1	3	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	18,767,847,000,00	5,334,278,550,00
1	3	35	Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan melalui UPTD Wilayah	55,370,301,022,00	65.455.421.502,00
1	3	36	Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian/Laboratorium	1,777,718,600,00	1.229.226.260,00
1	3	37	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	3,356,862,500,00	2.020.522.325,00
1	3	39	Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,439,901,500,00	1.102.621.025,00
1	3	41	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	52,501,246,000,00	17.364.410.590,00
1	3	42	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/ Jembatan	487,864,360,961,00	176,097,582,208,00
1	3	43	Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan	2,555,905,000,00	1.758.746.196,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,227,864,500,00	10.979.214.400,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,497,044,200,00	4,986,862,520,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1,106,198,500,00	990.436.025,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	504,185,500,00	159.391.875,00
Sub Total				729,361,197,500,00	364,302,329,190,00
1.03.02					
Dinas Pengelolaan SDA					
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	03		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1	3	44	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	39,879,920,000,00	17,233,681,600,00
1	3	45	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	4,417,245,000,00	13,490,747,750,00
1	3	46	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	1.450.000.000,00	1.319.500.000,00
1	3	47	Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan SDA	3,372,835,000,00	9,214,850,000,00
1	3	48	Program Pengembangan SDA	2,250,000,000,00	5,065,106,500,00
1	4	23	Program Pengembangan Data/Informasi		
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,365,000,000,00	11.768.670.000,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,020,000,000,00	712.375.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	400,000,000,00	99.000.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	175,000,000,00	93.500.000,00
Sub Total				63,330,000,000,00	58,997,430,850,00
1.04.01					
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya					
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	4		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman		
1	4	18	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	1,400,000,000,00	57.296.000,00
1	4	29	Pengembangan Perumahan	38,216,000,000,00	4.809.041.600,00
1	4	30	Pengembangan Kawasan Permukiman	103,817,000,000,00	25.464.270.668,00
1	4	31	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	48,242,002,500,00	38.849.263.477,00
1	4	34	Penyelenggaraan Penataan Ruang	4,650,000,000,00	-

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RPKD 2020	PAGU PERUBAHAN RPKD 2020
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,455,800,000,00	4,106,257,450,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,921,000,000,00	1,882,285,800,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	270,000,000,00	69.300.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	680,000,000,00	422.758.000,00
Sub Total				203,651,802,500,00	77.211.809.110,00
1.05.01			Satpol PP		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	5		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	5	18	Program penegakan Peraturan Perundang undangan	960,000,000,00	565.098.975,00
1	5	19	Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	407,000,000,00	166.413.800,00
1	5	20	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	4,321,364,000,00	4.840.600.700,00
5			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5			Pendidikan dan Pelatihan		
4	5	19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (POL PP)	1,097,293,900,00	260.710.900,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16,469,631,600,00	20.461.752.475,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	727,235,000,00	646.901.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	335,639,100,00	54.536.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	681,836,400,00	312.216.100,00
Sub Total				25,000,000,000,00	27.308.229.950,00
1.05.02			Badan Penanggulangan Bencana		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	5		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	5	15	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1,209,586,000,00	385.992.500,00
1	5	16	Program Kedaruratan dan Logistik	855,950,200,00	181.428.500,00
1	5	17	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	934,049,400,00	284,148,700,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,288,928,700,00	1.516.068.700,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPd 2020	PAGU PERUBAHAN RKPd 2020
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	273,351,400,00	145.048.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	148,490,600,00	14.643.900,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	289,643,700,00	127.816.550,00
Sub Total				5,000,000,000,00	2.655.146.850,00
1.06.01			Dinas Sosial		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	6		Sosial		
1	6	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	219.103.800,00	152.593.750,00
1	6	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.744.276.000,00	7.565.082.300,00
1	6	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	526.405.000,00	414.597.600,00
1	6	22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	631.930.000,00	533.858.950,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,854,986,000,00	1.716.585.650,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	402,000,000,00	244.429.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	467,135,600,00	84,128,550,00
Sub Total				15,000,000,000,00	10,751,835,800,00
2.01.01			Dinas Tenaga Kerja		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	1		Tenaga Kerja		
2	1	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.189.084.000,00	285.084.000,00
2	1	19	Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	830.000.000,00	219.026.990,00
2	1	20	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	514.122.000,00	227.521.500,00
2	1	21	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	800.000.000,00	251.904.900,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,256,700,000,00	1.986.803.000,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,121,600,000,00	323.800.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	150,000,000,00	92.640.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	910,324,000,00	519.407.850,00
Sub Total				10,603,600,000,00	3.906.188.240,00
2.02.01			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	2	20	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	2,800,000,000,00	620.418.100,00
2	2	21	Program Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	1,700,000,000,00	252.806.960,00
2	2	22	Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat.	1,000,000,000,00	333.764.300,00
2	2	23	Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	900.000.000,00	556.641.550,00
2	2	24	Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,000,000,000,00	58.239.800,00
2	2	25	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	370.000.000,00	184.236.760,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,534,870,900,00	2.231.782.780,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	595,026,600,00	530.304.630,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	80,102,500,00	42.932.550,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	390,000,000,00	122,482,500,00
Sub Total				10,370,000,000,00	4.933.609.930,00
2.05.01			Dinas Lingkungan Hidup		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	5		Lingkungan Hidup		
2	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	557,000,000,00	166.805.700,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2	5	25	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim.	650,000,000,00	203.836.900,00
2	5	26	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	795,000,000,00	198.162.800,00
2	5	27	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	560,000,000,00	317.951.100,00
2	5	28	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	1,100,000,000,00	649.239.100,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,542,778,800,00	1.482.205.300,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	308,613,900,00	78.450.950,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	114,726,000,00	39.926.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat daerah	371,881,300,00	181.956.150,00
Sub Total				6,000,000,000,00	3.318.534.000,00
2.06.01					
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	6		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	6	16	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,751,725,000,00	454.671.200,00
2	6	18	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	97.677.000,00	57.558.100,00
2	6	20	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	260,000,000,00	57,558,100,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,367,113,600,00	1,106,544,650,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	474,587,800,00	209.527.900,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	127,675,000,00	65.163.500,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	888,898,600,00	167.380.800,00
Sub Total				5,130,000,000,00	2,143,036,050,00
2.07.01					
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi					
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	7		Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		
2	7	18	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	355.850.500,00	17.121.750,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2	7	20	Program Pembinaan Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1,227,086,700,00	5,090,000,00
2	7	21	Program Pengembangan Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	572.682.000,00	88.934.100,00
2	7	22	Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	1,560,673,500,00	933,122,350,00
2	7	23	Program Pembinaan Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA	460.571.600,00	3.590.500,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,350,182,000,00	2,338,529,050,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	555,583,700,00	536.758.700,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	211,852,800,00	137.079.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	352,517,200,00	202.775.600,00
Sub Total				8,627,000,000,00	4,263,001,050,00
2.09.01			Dinas Perhubungan		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	9		Perhubungan		
2	9	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	450.000.000,00	-
2	9	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	500.000.000,00	329.125.300,00
2	9	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1,103,000,000,00	165,246,500,00
2	9	21	Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan	1,025,000,000,00	272.393.000,00
2	9	22	Pengendalian, Pengamanan dan Oprasional Transportasi	1,430,000,000,00	805.571.150,00
2	9	23	Peningkatan Keselamatan Transportasi	605.000.000,00	106.658.350,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,142,000,000,00	2.666.240.700,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	817,000,000,00	331.000.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	310,000,000,00	52.853.800,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	2,618,000,000,00	1.140.388.500,00
Sub Total				10.974.752.000,00	5.869.477.300,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2.10.01			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	10		Komunikasi dan Informatika		
2	10	16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	350,000,000,00	64,710,750,00
2	10	17	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	350,000,000,00	52.870.000,00
2	10	19	Program Penetapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,800,000,000,00	1,980,104,300,00
2	10	20	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4,950,000,000,00	6,783,942,200,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,091,149,600,00	2.879.427.670,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	622,275,200,00	970,109,865,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	283,800,000,00	34.300.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	552,775,200,00	126.612.300,00
Sub Total				36,000,000,000,00	38,676,231,255,00
2.11.01			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	11		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
2	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	350,000,000,00	110.796.500,00
2	11	20	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	275,000,000,00	14.845.500,00
2	11	21	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	250,000,000,00	21.890.000,00
2	11	22	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	2,725,000,000,00	2.430.000.000,00
2	11	23	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	400,000,000,00	269,100,000,00
2	11	24	Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	750,000,000,00	460.070.000,00
2	11	25	Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	300,000,000,00	57.500.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,685,000,000,00	1.278.044.300,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	450,000,000,00	188.120.000,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKP 2020	PAGU PERUBAHAN RKP 2020
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	215,000,000,00	33.192.500,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	570.000.000,00	359.397.900,00
Sub Total				800,000,00,00	5.222.956.700,00
2.12.01			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	12		Penanaman Modal		
2	12	19	Program Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	550,000,000,00	582.195.000,00
2	12	20	Program Promosi Penanaman Modal	700,000,000,00	550,112,600,00
2	12	21	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	300.000.000,00	78.123.100,00
2	12	22	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	315,000,000,00	200.771.700,00
2	12	23	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	485.000.000,00	190.524.600,00
2	12	24	Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	700.000.000,00	280.158.750,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,447,600,000,00	2.014.959.075,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	610,000,000,00	539.748.200,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	199,300,000,00	107.550.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	693,100,000,00	178.026.600,00
Sub Total				7.000.000.000,00	4.722.169.625,00
2.13.01			Dinas Pemuda dan Olahraga		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	13		Kepemudaan dan Olahraga		
2	13	16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	1.750.000.000,00	1.084.412.400,00
2	13	22	Program Olahraga Prestasi	1.917.100.000,00	1.566.565.810,00
2	13	23	Program Pembudayaan Olahraga	774.400.000,00	355.682.650,00
2	13	24	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan	6.575.000.000,00	6.258.658.700,00
2	13	25	Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga	320.000.000,00	180.325.890,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,599,700,000,00	4.422.895.035,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	293,800,000,00	377.941.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	16.540.800,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	604,400,000,00	70.274.415,00
Sub Total				12.000.000.000,00	14.333.296.700,00
2.17.01			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	17		Perpustakaan		
2	17	16	Program Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestarian dan Kerjasama Perpustakaan	1,299,107,600,00	435.630.700,00
2	18	17	Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka	1,125,000,000,00	404.531.100,00
2	18	18	Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan	1,190,000,000,00	254.613.950,00
2	18	19	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	598,270,000,00	271.739.000,00
2	18	20	Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip	745,000,000,00	463.928.200,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,591,844,000,00	1.448.920.360,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,285,104,000,00	1.009.217.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100,000,000,00	11.400.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	1,065,674,400,00	340.174.900,00
Sub Total				18,000,000,000,00	4.640.155.210,00
3.01.01			Dinas Kelautan dan Perikanan		
3			URUSAN PILIHAN		
3	1		Kelautan dan Perikanan		
3	1	17	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1,600,000,000,00	251.271.170,00
3	1	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3,380,000,000,00	476.153.800,00
3	1	21	Program pengembangan perikanan tangkap	10,979,800,000,00	2,283,732,360,00
3	1	25	Program peningkatan daya saing dan konsumsi ikan	1,500,000,000,00	623,702,120,00
3	1	26	Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1,550,500,000,00	417,831,396,00
3	1	27	Program Pengelolaan Ruang Laut	1,725,000,000,00	402.895.920,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,416,400,000,00	3.430.037.320,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	748,300,000,00	241.662.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	300,000,000,00	-
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	800,000,000,00	97.452.830.000,00
Sub Total				26.000.000.000,00	8,249,738,916,00
3.02.01			Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
3			URUSAN PILIHAN		
3	2		Pariwisata		
3	2	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3,900,000,000,00	595.691.800,00
3	2	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,109,000,000,00	12,220,670,000,00
3	2	17	Program Pengembangan Kemitraan	1,100,000,000,00	338.531.100,00
3	2	18	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger	375,000,000,00	594.600,00
3	2	19	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Lokal	1,875,000,000,00	426.783.900,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,696,200,000,00	2.398.548.300,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	305,000,000,00	415.103.700,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	190,000,000,00	62.405.100,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	449,800,000,00	26,670,600,00
Sub Total				15,000,000,000,00	16,484,999,100,00
3.03.01			Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan,		
3			URUSAN PILIHAN		
3	3		Pertanian		
3	3	22	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1,155,000,000,00	316.042.700,00
3	3	23	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan keamanan Pangan	3,612,935,000,00	505.316.350,00
3	3	43	Program peningkatan produksi produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan.	1,388,130,000,00	379.767.450,00
3	3	44	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	1,086,117,300,00	551.155.450,00
3	3	45	Program Penyediaan dan Pengawasan benih tanaman pangan dan holtikultura bermutu dan bersertifikat.	800,000,000,00	85.852.100,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
3	3	46	Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura	870,372,000,00	9.535.500,00
3	3	47	Program Peningkatan Pasca Panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan Holtikultura	1,362,175,000,00	30.294.600,00
3	3	48	Program peningkatan pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.	1,824,302,191,00	319.503.600,00
3	3	49	Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Tanaman Pangan dan Holtikultura	15,672,538,000,00	2.093238.655,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,023,260,000,00	4,964,435,013,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,141,345,750,00	1.240.738.200,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	374,999,900,00	70.608.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	826,858,159,00	122.687.800,00
Sub Total				42,500,000,000,00	11.852.026.276,50
3.03.02			Dinas Perkebunan		
3			URUSAN PILIHAN		
3	3		Pertanian		
3	3	33	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	1,550,000,000,00	1.453.604.350,00
3	3	34	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahandan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	350,000,000,00	119.404.000,00
3	3	35	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau (DBH-CHT)	2,000,000,000,00	936.248.600,00
3	3	36	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan	1,050,000,000,00	4.630.000,00
3	3	37	Program Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	425,000,000,00	182.095.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,366,720,000,00	1,669,014,900,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	290,780,000,00	181.512.900,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	87,500,000,00	70.484.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	625,000,000,00	107.714.600,00
Sub Total				7,745,000,000,00	4,725,072,350,00
3.03.03			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
3			URUSAN PILIHAN		
3	3		Pertanian		
3	3	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3,660,000,000,00	2.610.141.480,00
3	3	39	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	650,000,000,00	400.141.200,00
3	3	40	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	500,000,000,00	202.139.000,00
3	3	41	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan.	1,600,000,000,00	794.542.700,00
3	3	42	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	475,000,000,00	253.578.190,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,378,995,000,00	1.674.706.630,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	271,925,000,00	296.700.440,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	56,000,000,00	56.415.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	663,080,000,00	175.346.900,00
Sub Total				9,255,000,000,00	6.6463.711.540,00
3.04.01					
Dinas Kehutanan					
3			URUSAN PILIHAN		
3	4		Kehutanan		
3	4	21	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	1,727,000,000,00	429.673.310,00
3	4	22	Program Pengelolaan DAS dan RHL	1,575,000,000,00	147.133.450,00
3	4	23	Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	982,200,000,00	334.849.400,00
3	4	24	Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	456,100,000,00	111.728.895,00
3	4	25	Program Peningkatan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Unit KPH/Tahun)	17,595,000,000,00	2.762.359.441,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,204,398,500,00	3.160.242.728,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	867,551,500,00	419.603.450,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	70.000.000,00	27.001.950,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	522,750,000,00	47.508.070,00
Sub Total				26,000,000,000,00	7,440,100,694,00
3.05.01					
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RPKD 2020	PAGU PERUBAHAN RPKD 2020
3			URUSAN PILIHAN		
3	5		Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	5	18	Program Dukungan Program/Kebijakan nasional di bidang ESDM	125.000.000,00	13.250.000,00
3	5	19	Program Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	1.000.000.000,00	324.148.300,00
3	5	20	Program Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	500.000.000,00	140.525.000,00
3	5	21	Program Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	750.000.000,00	251.993.700,00
3	5	22	Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM	2.013.786.600,00	869.466.200,00
3	5	23	Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	875.000.000,00	289.542.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,113,000,000,00	921.120.200,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	215,000,000,00	106.650.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	90.000.000,00	47.250.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	582,000,000,00	313.200.000,00
Sub Total				7.000.000.000,00	3.277.145.400,00
3.06.01					
Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
3			URUSAN PILIHAN		
3	6		Perindustrian dan Perdagangan		
3	6	19	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1,811,170,000,00	600,255,000,00
3	6	20	Program Pengembangan Sumber Daya Industri	880,000,000,00	91.817.300,00
3	6	21	Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri.	1,335,000,000,00	476.333.900,00
3	6		Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan atau/jasa	760,000,000,00	68,078,000,00
3	6	22	Program Pemberdayaan Industri	2,010,000,000,00	724.840.000,00
3	6	23	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	1.211.968.000,00	142.271.250,00
3	6	23	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	1.383.164.500,00	182.601.100,00
3	6	24	Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan dan Workshop Industri.	1.200.000.000,00	182.213.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,710,300,000,00	2.878.617.970,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,203,865,500,00	674.149.200,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	72.183.300,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	1,006,500,000,00	267.525.000,00
Sub Total				64,000,000,000,00	13,724,955,540,00
4.01.01			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
4			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN		
4	1		Perencanaan		
4	1	29	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	2,700,000,000,00	1,683,743,500,00
4	1	30	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3,250,000,000,00	1.017.716.260,00
4	1	31	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3,200,000,000,00	1.300.207.700,00
4	1	32	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	1,300,000,000,00	728.553.300,00
4	1	33	Program Pengolahan dan Analisis Data Perencanaan	1,050,000,000,00	760.598.000,00
4	1	34	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,740,000,000,00	921.815.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,593,200,000,00	2,703,671,875,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,351,800,000,00	1.763.508.500,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	751,000,000,00	410.423.200,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	1,064,000,000,00	702.969.615,00
Sub Total				20,000,000,000,00	11,993,206,950,00
4.03.01			Badan Keuangan Daerah		
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	2		Keuangan		
4	2	18	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	1,891,345,000,00	1,873,449,114,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
4	2	19	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	1,007,968,000,00	665,840,350,00
4	2	20	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD	2,079,851,000,00	1,723,332,200,00
4	2	26	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	3,500,662,500,00	3,713,793,625,00
4	2	27	Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi Pemerintah Daerah	1,138,460,500,00	979,073,540,00
4	2	28	Program Pengelolaan Aset Daerah	12,255,000,000,00	5.309.691.394,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,284,405,000,00	3.338.267.410,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	347,160,800,00	423.104.915,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1,406,104,400,00	797.009.640,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	344,042,800,00	258,916,455,00
Sub Total				28,255,000,000,00	19,082,478,643,00
4.02.02			Badan Pendapatan Daerah		
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	3		Keuangan		
4	3	21	Program Peningkatan Pelayanan Pajak	1,968,264,600,00	1.462.750.000,00
4	3	22	Program Peningkatan Pelayanan Non Pajak	563,786,000,00	420.241.000,00
4	3	23	Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan	6,211,847,900,00	6.106.772.500,00
4	3	24	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah	661,540,000,00	354.532.300,00
4	3	25	Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	1.135.120.000,00	518.685.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,396,753,100,00	15,327,806,050,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,667,303,000,00	7.425.604.500,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	623,031,000,00	103.330.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	772,354,400,00	426.095.400,00
Sub Total				25.000.000.000,00	32.145.816.750,00
4.03.01			Badan Kepegawaian Daerah		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	3		Kepegawaian		
4	3	20	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2,855,079,600,00	1.396.301.325,00
4	3	21	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	1,029,575,300,00	231.901.500,00
4	3	23	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	766,733,600,00	5.247.655.444,00
4	3	28	Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	486,620,900,00	129.828.450,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,104,122,700,00	2.042.645.707,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	972,228,000,00	550.483.600,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	61.480.000,00	-
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	474,159,900,00	89.864.900,00
Sub Total				8,750,000,000,00	9.688.680.926,00
4.04.01					
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah					
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	5		Pendidikan dan Pelatihan		
4	5	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	5,419,336,000,00	15,549,338,900,00
4	5	17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	1,380,000,000,00	724.356.000,00
4	5	18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	2,220,000,000,00	1.075.850.000,00
4	5	21	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	507,960,000,00	340.806.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,669,090,700,00	3.612.935.500,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,555,600,700,00	1.508.966.700,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	570,883,000,00	583.213.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	677,129,600,00	476.941.800,00
Sub Total				15,000,000,000,00	23,872,407,900,00
4.05.01					
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	5		Penelitian dan Pengembangan		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
4	5	16	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	975.000.000,00	686.771.400,00
4	5	17	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	950.000.000,00	459,170,000,00
4	5	18	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	750,000,000,00	375.928.300,00
4	5	19	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	975,000,000,00	520.619.100,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,376,762,900,00	1.159.629.550,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342,505,800,00	321.500.5000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	630,731,300,00	450.029.400,00
Sub Total				6,000,000,000,00	3,973,648,250,00
4.06.01				Badan Penghubung	
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	6		Penghubung		
4	6	17	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah	3,515,174,900,00	1.240.395.450,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,795,817,300,00	3.575.162.600,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,697,677,200,00	592.570.532,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	124,316,400,00	18.000.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	342,214,200,00	12.689.850,00
Sub Total				9,475,200,000,00	5,438,818,432,00
5.01.01				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1,800,000,000,00	943.505.400,00
5	1	72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah	400,000,000,00	529.670.560,00
Sub Total				2,200,000,000,00	1,473,175,960,00
5.01.02				Biro Kesejahteraan Rakyat	
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
5	1	61	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	34,450,000,000,00	34,298,640,688,00
5	1	73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat.	550,000,000,00	362,477,200,00
Sub Total				35,000,000,000,00	34,661,117,888,00
5.01.03			Biro Hukum		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	2,450,000,000,00	1,266,031,100,00
5	1	74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	350.000.000,00	199.405.500,00
Sub Total				2,800,000,000,00	1.465.436.600,00
5.01.04			Biro Perekonomian		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	4,000,000,000,00	1,718,088,550,00
5	1	75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	1,000,000,000,00	501,219,615,00
Sub Total				5,000,000,000,00	2,219,308,165,00
5.01.05			Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	69	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5,600,000,000,00	3,441,810,200,00
5	1	71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa	400,000,000,00	279.649.000,00
Sub Total				6,000,000,000,00	3,721,459,200,00
5.01.06			Biro Administrasi Pembangunan		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	1,925,000,000,00	753.061.500,00
5	1	76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	575,000,000,00	418.728.800,00
Sub Total				2,500,000,000,00	1,171,790,300,00
5.01.07			Biro Organisasi		
5			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN		
5	1		SETDA		
5	1	52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	2,285,000,000,00	646.339.750,00
5	1	77	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	515,000,000,00	621.517.500,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
Sub Total				2,800,000,000,00	1,267,857,250,00
5.01.08			Biro Umum		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	70	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Setda	26,295,000,000,00	41,460,214,700,00
5	1	78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum	6,450,000,000,00	8,271,400,000,00
Sub Total				32,745,000,000,00	49,731,614,700,00
5.01.09			Biro Administrasi Pimpinan		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	2,900,000,000,00	1.444.454.650,00
5	1	50	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	2,380,000,000,00	2.307.267.700,00
5	1	79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Pimpinan	720,000,000,00	2.470.651.140,00
Sub Total				6,000,000,000,00	6,222,373,490,00
5.02.01			Sekretariat DPRD		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	2		Set DPRD		
5	2	15	Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	4,472,404,000,00	15.962.034.600,00
5	2	16	Program Pembahasan, Sosialisasi, Dokumentasi, Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum	5,682,219,600,00	62.264.221.889,00
5	2	17	Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	31,660,159,200,00	47.310.567.403,00
5	2	18	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	11,792,564,400,00	39,216,987,331,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,293,717,400,00	20,700,227,315,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,448,380,800,00	11,230,539,306,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	4,038,488,500,00	6,461,052,900,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	3,612,066,100,00	4.542.126.259,00
Sub Total				80,000,000,000,00	207,687,757,003,00
5.03.01			Inspektorat		
5			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
5	1		Inspektorat		
4	1	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5,743,743,000,00	4,166,570,100,00
4	1	17	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	1,162,583,000,00	1,021,917,600,00
4	1	18	Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan pada Obyek Pengawasan	1,137,057,000,00	530,228,000,00
4	1	19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	392,310,000,00	165,251,000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,685,138,000,00	2.252.309.500,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	346,169,000,00	543.090.900,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	33.000.000,00	8.930.000,00
Sub Total				10,500,000,000,00	8,688,297,100,00
6.01.01			Badan Kesbangpol		
6			URUSAN KESBANGPOL		
6	1		Kesbangpol		
6	1	25	Program Pembinaan Idiologi dan pengembangan wawasan kebangsaan	813,420,000,00	194.773.500,00
6	1	26	Program Kewaspadaan Nasional	790,128,100,00	470.899.400,00
6	1	27	Rapat Ketahanan Sosial dan Masyarakat	805,827,100,00	204.630.600,00
6	1	28	Program Politik Dalam Negeri	822,851,400,00	204,537,100,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,725,905,800,00	1,619,013,900,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	297,629,800,00	172.350.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	88,066,000,00	44.033.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	656,171,800,00	374.298.700,00
Sub Total				6,000,000,000,00	3.284.536.200,00

Sumber Data: RKPD Perubahan 2020



1.1.3. CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,57	69,69	0,12
2	Angka Kemiskinan	13,14	12,34	0,8
3	Angka Pengangguran	4,08	4,67	0,13
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,05	0,22
5	Pendapatan Per Kapita	42,23	41,62	0,61
6	Ketimpangan Pendapatan	0,330	0,327	0,003

Sumber data: Bappeda

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	100 %					
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	100 %	100 %					
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	17 orang	17 orang					
				Penyediaan penyediaan alat tulis kantor	100 %	100 %					
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.154 lembar	22.154 lembar					
				Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	1.150 buah	1.150 buah					
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	19.080 buku	19.080 buku					
				Penyediaan makanan dan minuman	240 kali	240 kali					
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	12 kali	12 kali					
				Penyediaan jasa keamanan kantor	4 orang	4 orang					
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	169 orang	169 orang					
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	50 unit	45 unit					
Pemeliharaan rutin/berkala gedung	14 unit	13 unit									

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				kantor				
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	7 unit	7 unit		
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	200 unit	200 unit		
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH SERTA ASET PERANGKAT DAERAH								
				Pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional	750 orang	713 orang		
				Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur	0	0	Terkena Refocusing	Anggaran kegiatan di 0 kan
PROGRAM PERENCANAAN EVALUASI DAN KEUANGAN SERTA ASET PERANGKAT DAERAH								
				Penyusunan laporan dan evaluasi kinerja	9 dokumen	9 dokumen		
				Penyusunan laporan capaian keuangan	5 dokumen	5 dokumen		
				Penyusun dokumen perencanaan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pengembangan E-Govermen perangkat daerah dan publikasi pembangunan	5 media	5 media		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS								
				Pengembangan dan evaluasi Kurikulum Serta Beasiswa Pendidikan	-	-	Terkena Refocusing	Anggaran kegiatan di 0 kan
				Peningkatan Wawasan dan Pengembangan Karakter Peserta Didik SMA	1.274 orang	-	Terdampak pandemi covid 19	Kegiatan di provinsi dan Pusat ditiadakan
				Peningkatan Mutu Kelembagaan sekolah Menengah Atas	210 sekolah	200 sekolah		
				Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	165.215 siswa	165.215 siswa		
PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN								
				Peningkatan Mutu Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan	690 orang	552 orang		
				Pengelola Karakter Siswa SMK	728 siswa	-	Terdampak pandemi covid 19	Kegiatan di provinsi dan Pusat ditiadakan
				Peningkatan Mutu Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan	190 sekolah	190 sekolah		
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KHUSUS								
				Pembinaan Siswa PKLK Berprestasi	3 kegiatan	3 kegiatan		
				Pembinaan dan Peningkatan Mutu	900 orang	720 orang		

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Pendidikan Khusus					
				Peningkatan Mutu Kelembagaan Pendidikan Khusus	14 sekolah	14 sekolah			
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.849 guru	4.849 guru			
				Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	650 guru	650 guru			
				Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	300 guru	--			
				PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH I					
				Pelayanan Informasi dan Publikasi Wilayah I	5 orang	5 media			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah I	800 media	480 orang	Terdampak pandemi covid 19	Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan	
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah I	800 media	750 orang			
				PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH II					
				Pelayanan Informasi dan Publikasi Wilayah II	5 siswa	4 siswa			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah II	700 siswa	600 siswa			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah II	455 siswa	455 siswa			
				PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH III					
				Pelayanan Informasi dan Publikasi Wilayah III	5 media	5 media			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah III	230 siswa	150 siswa	Terdampak pandemi covid 19	Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan	
				Pendidikan Khusus Wilayah III Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah	250 siswa	250 siswa			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Menengah Kejuruan dan					
				PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH IV					
				Pelayanan Informasi dan Publikasi Wilayah IV	5 media	4 media			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah IV	650 siswa	650 siswa			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah IV	600 siswa	600 siswa			
				PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH V					
				Pelayanan Informasi dan Publikasi Wilayah V	5 media	5 media			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah V	700 siswa	420 siswa			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah V	700 siswa	700 siswa			
				PROGRAM PEMANFAATAN TIK UNTUK PENDIDIKAN					
				Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sekolah	15 sekolah	15 sekolah			
				Peningkatan Layanan Pemanfaatan TIK di Sekolah	487 orang	487 orang			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Sumber Belajar	2 unit	2 unit			
				PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH VI					
				Pelayanan Informasi dan Publikasi Wilayah VI	5 media	5 media			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Atas Wilayah VI	750 siswa	750 siswa			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah VI	750 siswa	750 siswa			
				PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH VII					
				Pelayanan Informasi dan Publikasi Wilayah VII	5 media	5 media			
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah	450 siswa	450 siswa			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Menengah Atas Wilayah VII					
				Pembinaan Siswa dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus Wilayah VII	450 siswa	450 siswa			
				PROGRAM Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi					
				Pembinaan Siswa Berprestasi	200 siswa	100 siswa	Terdampak pandemi covid 19	Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan	
				Pembinaan Lembaga Pendidikan	5 lembaga	5 lembaga			
				PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan					
				Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMA (DAK)	688 unit	688 unit			
				Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	600 unit	600 unit			
				Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana PKLK (DAK)	20 unit	20 unit			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. Capaian Indikator Kegiatan Utama (IKU) dengan sasaran strategis: Menurunnya Kasus Kematian Ibu, menurunnya kasus kematian bayi, meningkatnya status gizi masyarakat, menurunnya kasus kesakitan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan					
				Kegiatan Pengelolaan SDM Kesehatan	3 layanan	3 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Layanan pengelolaan SDM kesehatan mencapai target dan dapat dilaksanakan dengan baik	
				Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan					
				Kegiatan pengembangan diklat	3 layanan	3 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan pengembangan Diklat dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan pengendalian mutu diklat	3 layanan	3 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan pengembangan Mutu Diklat dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan pengembangan institusi bapelkes (DAK)	1 layanan	1 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan pengembangan institusi Bapelkes dapat dilaksanakan dengan baik	

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
			2. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Bidang Kesehatan Provinsi)	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan					
				Kegiatan Penyusunan Program Kesehatan	5 layanan	5 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	layanan perencanaan penganggaran tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan Pengembangan Manajemen Informasi dan Litbangkes	5 layanan	5 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	layanan data dan informasi tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Kesehatan	4 layanan	4 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	layanan evaluasi dan pelaporan tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik	
			3. Kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa/KLB Provinsi	Program Pelayanan Kesehatan					
				Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional	8 Layanan	8 Layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	4 Layanan kesehatan rujukan	4 Layanan kesehatan rujukan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan kesehatan rujukan dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan Pelayanan Kefarmasian	6 layanan kefarmasian	6 layanan kefarmasian	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan kefarmasian dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Bidang Kesehatan Provinsi)	100 Persen	100 Persen	Kondisi pandemi Covid 19,		
				Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes					
				Kegiatan Tatakelola Obat Publik	3 layanan	3 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan tatakelola obat publik	

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan Kalibrasi Alat Kesehatan	100 layanan	100 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan kalibrasi dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan BOK Distribusi Obat dan E Logistik (DAK)	1 layanan	1 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan distribusi obat dan E-Logistik dapat dilaksanakan dengan baik
Program Pelayanan RSBNH								
				Kegiatan pelayanan medik dan keperawatan	5 layanan	5 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan medik dan keperawatan dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan penunjang medik dan non medik	5 layanan	5 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan medik dan non medik dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan pengembangan institusi RSBNH (DAK)	1 layanan	1 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan pengembangan RS BNH dapat dilaksanakan dengan baik
Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan								
				Kegiatan Pelayanan Laboratorium	3 layanan	3 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan Laboratorium dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan Pengendalian Mutu Laboratorium	3 layanan	3 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Kegiatan layanan pengendalian mutu laboratorium dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan pengembangan institusi balai	--	--	Kondisi pandemi	

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				labkesda (DAK)			Covid 19,		
				Program Kesehatan Masyarakat					
				Kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi	7 layanan	7 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Masalah : Kondisi pandemi Covid 19, tindak lanjut : Layanan Kesehatan Bagi WUS, Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Balita, Anak Usia Sekolah, dan Usila tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat (DAK)	1 layanan	1 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Masalah : Kondisi pandemi Covid 19, tindak lanjut : Kegiatan perbaikan gizi masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 layanan	6 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Masalah : Kondisi pandemi Covid 19, tindak lanjut : Layanan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik	
				Kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	10 layanan	8 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Masalah : Kondisi pandemi Covid 19, tindak lanjut : Layanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan	

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Olah raga mencapai target tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan BOK UKM tersier	5 layanan	5 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Ada beberapa keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan karena kondisi pandemi Covid 19
Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit								
				Kegiatan Surveilans dan Imunisasi	5 layanan	4 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Layanan Surveilans dan Imunisasi mencapai target dan dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9 layanan	9 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	Layanan pengendalian penyakit menular tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	6 layanan	6 layanan	Kondisi pandemi Covid 19,	layanan pengendalian penyakit menular tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik
				Kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa/KLB Provinsi	100 persen	100 persen	Kondisi pandemi Covid 19,	Layanan Kesehatan bagi yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi (SPM Bidang Kesehatan Provinsi) tersedia dan dapat dilaksanakan dengan baik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber	100 persen	100 persen	Kondisi pandemi	Layanan komunikasi,

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				daya air dan listrik			Covid 19,	sumber daya air dan listrik
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	100 persen	100 persen	Kondisi pandemi Covid 19,	Layanan administrasi keuangan dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	100 persen	100 persen	Kondisi pandemi Covid 19,	Layanan kebersihan kantor dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan jasa dan perbaikan peralatan kerja	5 unit kerja	5 unit kerja	Kondisi pandemi Covid 19,	Masalah : Kondisi pandemi Covid 19, tindak lanjut : layanan perbaikan peralatan kerja dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	Kondisi pandemi Covid 19,	penyediaan ATK pendukung pelaksanaan kinerja dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	Kondisi pandemi Covid 19,	barang cetakan dan penggandaan dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	Kondisi pandemi Covid 19,	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	12 bulan	12 bulan	Kondisi pandemi Covid 19,	penyediaan peralatan RT dan listrik dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 unit kerja	5 unit kerja	Kondisi pandemi Covid 19,	penyediaan bahan bacaan dan perUUan

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	Kondisi pandemi Covid 19,	koordinasi dan konsultasi dapat dilaksanakan dengan baik
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	Kondisi pandemi Covid 19,	koordinasi dan konsultasi dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan jasa keamanan kantor	27 orang	27 orang	Kondisi pandemi Covid 19,	koordinasi dan konsultasi dapat dilaksanakan dengan baik
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	196 orang	196 orang	Kondisi pandemi Covid 19,	Tenaga PTHL tersedia
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	5 unit	5 unit	Kondisi pandemi Covid 19,	perlengkapan gedung kantor tersedia dani dapat dilaksanakan dengan baik
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 unit	5 unit	Kondisi pandemi Covid 19,	pemeliharaan gedung kantor dapat dilaksanakan dengan baik
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 unit	5 unit	Kondisi pandemi Covid 19,	pemeliharaan kendaraan dinas dapat dilaksanakan dengan baik
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 unit	5 unit	Kondisi pandemi Covid 19,	pemeliharaan rutin gedung kanor dapat dilaksanakan dengan baik
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5 unit	5 unit	Kondisi pandemi Covid 19,	perlengkapan gedung kantor tersedia dani dapat dilaksanakan dengan baik

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah					
				Pengembangan kompetensi aparatur dan jabatan fungsional	50 orang	50 orang	Kondisi pandemi Covid 19,	ASN mengikuti bimtek dan sosialisasi dapat dilaksanakan dengan baik	
				Pengembangan budaya kerja dan disiplin aparatur	8 kali	8 kali	Kondisi pandemi Covid 19,	pembinaan budaya kerja dapat dilaksanakan dengan baik	
				Peningkatan kehumasan dan pelayanan keterbukaan informasi publik	80 persen	80 persen	Kondisi pandemi Covid 19,	pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan dengan baik	
				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	--	--	Kondisi pandemi Covid 19,		
				Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah					
				Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	5 dokumen	5 dokumen	Kondisi pandemi Covid 19,	Pelaporan dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan dengan baik	
				Penyusunan laporan capaian keuangan	5 dokumen	5 dokumen	Kondisi pandemi Covid 19,	Pelaporan capaian keuangan SKPD dapat dilaksanakan dengan baik	
				Penyusunan dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	Kondisi pandemi Covid 19,	Dokumen perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik	
				Pengembangan <i>e-Government</i> OPD dan Publikasi Pembangunan	2 aplikasi	--	Kondisi pandemi Covid 19,		
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	1 dokumen	1 dokumen	Kondisi pandemi Covid 19,	Dokumen kebutuhan barang dan pengelola aset dapat dilaksanakan dengan baik	
		RSUD Dr. H. Abdul Moeloek		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 bulan	12 bulan			
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah					
				Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	7 Orang	6 Orang	Satu orang tidak terlaksana pendidikan	Melakukan komunikasi ke institusi pendidikan	
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata					
				Penambahan gedung rumah sakit	5 Unit	5 Unit			
				Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	8.129 Unit	5.750 Unit	Sebagian alat kesehatan memiliki harga satuan yang lebih besar dari harga satuan yang direncanakan	Melakukan komunikasi ke pihak distributor agar harga yang disepakati adalah harga terendah.	
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
				Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	1000 Orang	1.246 Orang	Jumlah Pasien yang dilayani lebih banyak dari yang direncanakan		
				Program Pelayanan BLUD					
				Pelayanan Pendukung Pelayanan BLUD	12 Bulan	12 Bulan			
		RS Jiwa Daerah Provinsi Lampung		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
				Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	3 Paket	3 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Unit	42 Unit			
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	12 bulan	12 bulan			
				Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 unit	100 unit			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9 unit	9 unit			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit			
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah					
				Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	40 orang	40 orang			
				Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	18 Kegiatan	18 Kegiatan			
				Program Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Serta Asset Perangkat Daerah					
				Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	15 Dokumen	15 Dokumen			
				Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	6 dokumen	6 Dokumen			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	8 Dokumen	8 Dokumen			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan pengelolaan Asset	1 dokumen	1 Dokumen			
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat					
				Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Napza Rawat Inap dan Rawat Jalan	9 Kegiatan	9 Kegiatan			
				Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	256 Kegiatan	256 kegiatan			
				Upaya Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Mental atau terapi pasien RSJD	25 Kegiatan	25 Kegiatan			
				Program Peningkatan Mutu Layanan Keperawatan					
				Upaya Peningkatan Mutu Layanan Keperawatan	30 orang	30 orang			
				Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu	48 orang	48 orang			
				Program Mutu Layanan Penunjang Medis					
				Pengadaan Alat Alat Kesehatan Rumah Sakit	3 Paket	3 Paket			
				Pembangunan Gedung Rumah Sakit	3 Paket	3 Paket			
				Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD					
				Peningkatan Mutu Layanan Rumah Sakit Jiwa	21 Pelayanan	21 Pelayanan			
		Rumah Sakit		Program Administrasi Perkantoran					

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Bandar Negeri Husada		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100	99,92			
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100	90,3			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	100	99,48			
				Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	100	0	Masuk dalam kegiatan yang diefisiensi	Diusulkan tahun 2021	
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	99,99			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	99,97			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	100	97,1			
				Penyediaan Makan dan Minuman	100	99,87			
				Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100	1,63	Adanya larangan kegiatan ke Pusat (untuk Koordinasi/Konsultasi) karena Covid mengakibatkan kegiatan tidak dapat direalisasikan	Dana SIAP	
				Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	100	100			
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/tehnis	100	96,05			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100	100			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100	98			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	100	98			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	100	98			
				Program Pelayanan RSBNH					
				Kegiatan Pelayanan Medik dan Keperawatan	100	99			
				Kegiatan Penunjang Medik dan Non Medik	100	86			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Kegiatan Dana Alokasi Khusus	100	100		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pertanahan berdasarkan asas Otonomi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah				
				Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur wilayah	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota		
				Penyusunan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan teknis, monitoring dan evaluasi bangunan gedung dan infrastruktur wilayah	31 Dokumen	31 Dokumen		
				Pembangunan sarana dan prasarana bangunan gedung dan lingkungan	2 Gedung	2 Gedung		
				Pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan gedung dan lingkungan	20 Gedung	20 Gedung		
				Penyelenggaraan Penataan Ruang				
				Koordinasi dan pendampingan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Lampung	12 Kali	12 Kali		
				Penataan ruang kawasan strategis	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Pendampingan legislasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota		
				Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penataan ruang	9 Kab/ Kota	9 Kab/ Kota		
				Pengembangan Perumahan				
				Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan perumahan	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota		
				Penyusunan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan teknis, monitoring dan evaluasi bidang perumahan	7 Dokumen	7 Dokumen		
				Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	0 Unit	0 Unit		
Pembinaan, penerapan dan pelaporan SPM perumahan kewenangan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen						
Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk hunian hijau	10 Desa	10 Desa						
Pendampingan dan pemberdayaan sistem pembiayaan perumahan	0 Kepala keluarga	0 Kepala keluarga						

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Pengelolaan rusunawa	2 Gedung (Dokumen panduan Pengelolaan)	2 Gedung (Dokumen panduan Pengelolaan)			
		Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik	12 bulan	12 bulan				
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan	12 bulan				
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan				
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan				
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan				
			Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan				
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	370 Orang	370 Orang				
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
			Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional	1 unit	1 unit				
			Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan				
			Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	43 unit	43 unit				
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH						
			Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	1 dokumen	1 dokumen				
			Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	7 orang	7 orang				
			PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN, SERTA ASET PERANGKAT DAERAH						
			Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	1 dokumen	1 dokumen				
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	1 dokumen	1 dokumen				
		PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI SUMBER DAYA AIR							
		Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi, Rawa	34 Lokasi	55 Lokasi					

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	1 Lokasi	0 Lokasi	Proses pelelangan melampaui batas waktu pengisian aplikasi OMSPAN (31 September 2020)	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai, Danau	9 Lokasi	0 Lokasi	kegiatan mengalami re-focusing anggaran	kegiatan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya
				Pembangunan dan Rehabilitasi Pantai	3 Lokasi	0 Lokasi	kegiatan mengalami re-focusing anggaran	kegiatan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya
				Pembangunan dan Rehabilitasi Bendung, Embung dan Air Baku	15 Lokasi	44 Lokasi		
				Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Irigasi/IPDMIP (Hibah)	2 Lokasi	0 Lokasi	kegiatan mengalami re-focusing anggaran	kegiatan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berikutnya
PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR								
				Operasi Pemeliharaan Irigasi dan Rawa	19 Lokasi	18 Lokasi		
				Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Irigasi dan Rawa	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Operasi Pemeliharaan Sungai, Danau dan Pantai	6 Lokasi	2 Lokasi		
				Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Sungai, Danau dan Pantai	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Operasi Pemeliharaan Waduk, Bendung, Embung dan Bangunan Air lainnya	17 Lokasi	17 Lokasi		
				Penyusunan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Waduk, Bendung, Embung dan Bangunan Air lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen		
PROGRAM PENATAAN SUMBER DAYA AIR								
				Pemanfaatan Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen		

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Rekomendasi Teknis Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Sumber Daya Air	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Penyusunan Peraturan/Kebijakan bidang Sumber Daya Air	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyelenggaraan Komisi Irigasi dan Kelembagaan Sumber Daya Air	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR					
				Perencanaan Teknis Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi SDA	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Monitoring dan Evaluasi Teknis Bidang Pembangunan dan rehabilitasi SDA	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Perencanaan Teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Monitoring dan Evaluasi Teknis Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyusunan Dokumen Legalitas SDA	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengembangan Data dan Teknologi Informasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR					
				Manajemen Administrasi Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah I	12 Bulan	12 Bulan			
				Unit Reaksi Cepat Pengelolaan Sumber Daya Air UPTD PSDA Wilayah I	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Pengelolaan Pos Hidrologi UPTD PSDA Wilayah I	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Manajemen Administrasi Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah II	12 Bulan	12 Bulan			
				Unit Reaksi Cepat Pengelolaan Sumber Daya Air UPTD PSDA Wilayah II	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				Pengelolaan Pos Hidrologi UPTD PSDA Wilayah II	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Manajemen Administrasi Tata Usaha UPTD PSDA Wilayah III	12 Bulan	12 Bulan			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Unit Reaksi Cepat Pengelolaan Sumber Daya Air UPTD PSDA Wilayah III	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
				Pengelolaan Pos Hidrologi UPTD PSDA Wilayah III	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	100 %	100 %		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100 %	100 %		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-		
				Penyediaan Jasa dan Perbaikan Peralatan Kerja	8 unit	8 unit		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	4819 buah	4819 buah		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	161049 lembar	161049 lembar		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	18 buah	18 buah		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 buku	100 buku		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	12 kali	12 kali		
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	123 kali	87 kali		Pandemi Covid 19
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	349 orang	349 orang		
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	9 unit	9 unit		
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	2169 unit	2169 unit		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	11 unit	11 unit		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19 unit	19 unit		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor	92 unit	92 unit		
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH				
				Pengembangan Kopetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	25 orang	25 orang		

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	1 dokumen	1 dokumen		
				Peningkatan Kehumasan dan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	701 orang	701 orang		
PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN, SERTA ASET PERANGKAT DAERAH								
				Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	10 dokumen	10 dokumen		
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Aset	1 dokumen	1 dokumen		
PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN								
				Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pemeliharaan Jalan dan jembatan	1 dokumen	1 dokumen		
				Pemeliharaan Jembatan	52 meter	20 meter		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 1	3 km	3,200 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 2	3,86 km	3,775 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 3	5,17 km	8,062 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 4	2,50 km	3,435 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 5	1,00 km	1,900 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 6	4,00 km	4,850 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 7	2,50 km	3,175 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 8	2,58 km	4,060 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 9	1,73 km	3,100 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 10	0,50 km	0,546 km		
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi	2,69 km	2,700 km		

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
				Koridor 11						
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 12	1,00 km	1,900 km				
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 13	0,50 km	0,750 km				
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 14	2,00 km	2,535 km				
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 15	2,40 km	2,907 km				
				Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Koridor 16	1,65 km	2,480 km				
				Perencanaan Pemeliharaan Jalan	36,00 dokumen	36,00 dokumen				
				Perencanaan Pemeliharaan Jembatan	3,00 dokumen	3,00 dokumen				
				Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jembatan	2,00 dokumen	2,00 dokumen				
				Pengawasan Teknis Jalan Provinsi	11,00 dokumen	11,00 dokumen				
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN						
				Pengadaan Alat-Alat Berat	8 unit	8 unit				
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat berat	7 unit	7 unit				
				Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan.	83 set	83 set				
				Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	47 set	47 set				
				Pembinaan Rohani Sumber Daya Aparatur	44 kali	18 kali	Mengurangi kegiatan berkumpul dikarenakan pandemi covid-19			
				PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN JALAN DAN JEMBATAN MELALUI UPTD WILAYAH						
				Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 1	149 km	149 km				
				Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 1	788 meter	788 meter				
				Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 1	1 dokumen	1 dokumen				
				Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 2	175 km	175 km				

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 2	659 meter	659 meter			
				Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 2	1 dokumen	1 dokumen			
				Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 3	207 km	207 km			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 3	645 meter	645 meter			
				Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 3	1 dokumen	1 dokumen			
				Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 4	265 km	265 km			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 4	1538 meter	1538 meter			
				Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 4	1 dokumen	1 dokumen			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 5	1663 meter	1663 meter			
				Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 5	185 km	185 km			
				Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 5	1 dokumen	1 dokumen			
				Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 6	162 km	162 km			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan Sistem URC UPTD Wilayah 6	885 meter	885 meter			
				Pengelolaan Sarana dan Administrasi UPTD Wilayah 6	1 dokumen	1 dokumen			
				PROGRAM OPTIMALISASI DAN PERANAN UPTD PENGUJIAN / LABORATORIUM					
				Peningkatan Pelayanan Administrasi, Akreditasi dan Penatausahaan UPTD Pengujian / Laboratorium	100 %	100 %			
				Peningkatan Pelayanan Pegujian Laboratorium Material/Bahan	100 %	100 %			
				Peningkatan Pelayanan Pegujian Laboratorium Analisa Campuran	100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI					
				Pengaturan Konstruksi	285 orang	285 orang			
				Monitoring, Evaluasi, dan Rakor Pembinaan Jasa Konstruksi	2 kali	2 kali			
				Pelatihan Bidang Konstruksi	195 sertifikat	195 sertifikat			
				Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi dan Sarana Publikasi Pembinaan Jasa Konstruksi Provinsi Lampung	1 buah	1 buah			
				Bimbingan Teknis Konstruksi	3 dokumen	3 dokumen			
				PROGRAM PENYUSUNAN PENGANGGARAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN					
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen			
				Penyusunan dan Evaluasi SAKIP	1 dokumen	1 dokumen			
				Penyusunan dan Evaluasi RENSTRA DAN RENJA OPD	2 dokumen	2 dokumen			
				Penyusunan Harga Dasar Upah, Bahan dan Alat Bidang Kebinamargaan	1 dokumen	1 dokumen			
				Penyusunan Program dan Anggaran	1 dokumen	1 dokumen			
				Koordinasi, Monitoring, dan Pelaporan DAK	1 dokumen	1 dokumen			
				Survey Usulan Program Jalan dan Jembatan Non Status	1 dokumen	1 dokumen			
				Penataan Fungsi, Status, Kelas Jalan dan Pemetaan	1 dokumen	1 dokumen			
				PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN NON STATUS PROVINSI					
				Pembangunan Jalan Non Status Provinsi	1 km	1 km			
				Pembangunan Jembatan Non Status Provinsi	3 unit	3 unit			
				Perencanaan Pembangunan Jalan dan jembatan Non Status Provinsi	10 dokumen	10 dokumen			
				Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	3 dokumen	3 dokumen			
				PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN/JEMBATAN					
				Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan	1 dokumen	1 dokumen			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
				Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan	31 dokumen	31 dokumen				
				Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	10 dokumen	10 dokumen				
				Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jembatan	4 dokumen	4 dokumen				
				Pengawasan Teknis Jalan Provinsi	14 dokumen	14 dokumen				
				Pengawasan Teknis Pembangunan Sistem Drainase/Talud	13 dokumen	13 dokumen				
				Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan	300,00 m2	300,00 m2				
				Pembangunan Jembatan	9 km	12 km				
				Pembangunan Sistem Drainase dan Talud	63 km	63 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 1	1,50 km	2,170 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 2	2,85 km	2,850 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 3	2,10 km	3,860 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 4	1,50 km	1,530 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 5	3,00 km	3,415 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 6	0,50 km	0,750 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 7	0,50 km	1,887 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 8	0,50 km	1,130 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 9	1,24 km	2,079 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 10	1,00 km	1,272 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 11	5,30 km	4,609 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 12	1,50 km	2,275 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 13	1,48 km	2,958 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 14	1,00 km	2,700 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 15	0,90 km	2,685 km				
				Pembangunan Jalan Provinsi Koridor 16	1,00 km	1,485 km				
				PROGRAM SURVEY DAN DATA BASE JALAN/JEMBATAN						
				Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	1 dokumen	1 dokumen				
				Inspeksi Kondisi Jembatan	1 dokumen	1 dokumen				
				Inspeksi Kondisi Jalan Provinsi Koridor 1 s/d 4	4 dokumen	4 dokumen				

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Inspeksi Kondisi Jalan Provinsi Koridor 5 s/d 11	7 dokumen	7 dokumen		
				Inspeksi Kondisi Jalan Provinsi Koridor 12 s/d 16	5 dokumen	5 dokumen		
				Survey LHR Jalan Provinsi Koridor 1 s/d 4	1 dokumen	1 dokumen		
				Survey LHR Jalan Provinsi Koridor 5 s/d 11	1 dokumen	1 dokumen		
				Survey LHR Jalan Provinsi Koridor 12 s/d 16	1 dokumen	1 dokumen		
				Penyusunan Leger Jalan Provinsi dan Rumija	1 dokumen	1 dokumen		
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya		Pengembangan Kawasan Permukiman				
				Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan kawasan permukiman	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota		
				Penyusunan kebijakan, perencanaan teknis, pengawasan teknis, monitoring dan evaluasi bidang kawasan permukiman	24 Dokumen	24 Dokumen		
				Pembinaan, penerapan dan pelaporan SPM SPAM, TPA dan IPAL Regional	2 Dokumen	2 Dokumen		
				Penyediaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	1500 Kepala Keluarga	1500 Kepala Keluarga		
				Penyediaan dan pengembangan sistem sanitasi masyarakat	140 Kepala Keluarga	140 Kepala Keluarga		
				Penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	80 Hektar (Ha)	80 Hektar (Ha)		
				Penyelenggaraan PSU kawasan permukiman	74 Paket	74 Paket		
5	Trantibum Linmas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mewujudkan masyarakat Desa Tangguh dalam menghadapi bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan				
				Peningkatan Kemampuan Aparatur dan Masyarakat dalam mengurangi Risiko Bencana	4 Desa	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena Refocusing, dan disebabkan adanya larangan mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang	Kegiatan di Prioritaskan pada TA. 2021

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak guna mencegah penyebaran Covid 19.		
			Mewujudkan Respon Cepat Darurat Bencana	Program Kedaruratan dan Logistik					
				Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana	15 Kab/Kota	100%	Tidak ada permasalahan dikarenakan Kegiatan Pengerahan Tanggap Darurat Bencana dapat dilaksanakan dengan Monitoring Bencana ke Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung		
				Penyelenggaraan Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana	15 Kab/Kota	100%	Tidak ada permasalahan dikarenakan Kegiatan Pengerahan Logistik dan Peralatan dapat dilaksanakan sesuai permintaan dari BPBD Kab/Kota se Provinsi Lampung		
			Mewujudkan pemulihan infrastruktur pasca bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi					
				Pelaksanaan Upaya Rehabilitasi Pasca Bencana	152 Orang	100%	Tidak ada permasalahan dikarenakan Kegiatan Rehabilitasi Pasca Bencana dapat dilaksanakan dengan Peserta dari Kabupaten		
				Pelaksanaan Upaya Rekonstruksi Pasca Bencana	6 Kabupaten	100%	Tidak ada permasalahan dikarenakan Kegiatan Identifikasi dan		

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
							Verifikasi Daerah Pasca Bencana dapat dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan verifikasi usulan Rekonstruksi Pasca Bencana dari BPBD Kab/Kota se Provinsi Lampung		
		Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, listrik	Jumlah Pembayaran tlp, air, listrik dan Mobil Sampah (12 Bulan)	Jumlah Pembayaran tlp, air, listrik dan Mobil Sampah (85 %)				
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pembayaran tenaga keuangan & Aset (12 Bulan)	Jumlah pembayaran tenaga keuangan & Aset (96%)				
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (8 Unit)	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki (100 %)				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK kantor (12 Bln)	Jumlah ATK kantor (100%)				
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah barang cetak dan penggandaan (10000 Lembar)	Jumlah barang cetak dan penggandaan (100%)				
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (17 Unit)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (93%)				
			Penyediaan peralatan rumah tangga & Peralatan Listrik	Jumlah alat rumah tangga kantor (12 Bln)	Jumlah alat rumah tangga kantor (99%)				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Buku dan	Jumlah Buku dan				

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Perundang-undangan	Peraturan Perundang-Undangan (5 Paket)	Peraturan Perundang-Undangan (100%)		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Anggota Pol PP (792 Orang)	Jumlah Anggota Pol PP (99%)		
				Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah & Dalam Daerah (14 Kali)	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah & Dalam Daerah (98%)		
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Tehnis Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak (622 Org)	Jumlah Tenaga Kontrak (100%)		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang di beli (6 Unit)	Jumlah perlengkapan kantor yang di beli (0 %)	Pengurangan refocusing	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung (1 Paket)	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung (100%)		
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas(15 Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas (92%)		
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PD								
				Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jafung	Jumlah Peserta Bimtek (60 Orang)	Jumlah Peserta Bimtek (100%)		
				Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Jumlah Dokumen Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur (4 Dok)	Jumlah Dokumen Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur (100%)		
Program Perencanaan, Evaluasi & Keuangan, Serta Asset PD								
				Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja, Evaluasi	Jumlah Laporan Kinerja, Evaluasi		

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
					Renstra,Evaluasi Renja,Evaluasi Rencana Aksi, PK dan LPPD/LKPJ (8 Dok)	Renstra,Evaluasi Renja,Evaluasi Rencana Aksi, PK dan LPPD/LKPJ (93 %)			
				Penyusunan Laporan Capiam Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (100%)	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (53%)	Pengurangan refocusing		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (5 Dok)	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu (99%)			
				Pengembangan E-Government PD & Publikasi Pembangunan	Jumlah Kegiatan Pengembangan IT Dalam Pelaksanaan Tupoksi OPD dan Pameran Pembangunan (2 Keg)	Jumlah Kegiatan Pengembangan IT Dalam Pelaksanaan Tupoksi OPD dan Pameran Pembangunan (78%)			
				Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan					
				Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan Perda Bagi Masyarakat, ASN,Badan Usaha dan Pelajar	Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub Yang Dilaksanakan (15 kali)	Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub Yang Dilaksanakan (98%)			
				Penindakan Penegakan Perda	Jumlah Operasi Yustisi Yang Dilakukan (24 kali)	Jumlah Operasi Yustisi Yang Dilakukan (99%)			
				Koordinasi dan Fasilitasi Serta Monitoring dan Evaluasi PPNS	Jumlah Koordinasi dan Evaluasi (4 kali)	Jumlah Koordinasi dan Evaluasi (99%)			
				Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)					
				Pendataan dan Monitoring Kesiapan Anggota Perlindungan Masyarakat Se-	Jumlah Dokumen Linmas (15 Dok)	Jumlah Dokumen Linmas (99%)			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Provinsi Lampung					
				Pembinaan Kesiapsiagaan Linmas Dalam Penanganan dan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Kesiapsiagaan Anggota Linmas Dalam Penanganan Bencana (8 Kab/Kota)	Jumlah Peserta Kesiapsiagaan Anggota Linmas Dalam Penanganan Bencana (75%)			
				Pembinaan SDM Satlinmas Kab/Kota	Jumlah Peserta (60 Orang)	Jumlah Peserta (0%)	Pengurangan refocusing		
				Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)					
				Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Anggota yang di BKO Ke Kab/Kota dan Pengamanan Unjuk rasa (100 Orang)	Jumlah Anggota yang di BKO Ke Kab/Kota dan Pengamanan Unjuk rasa (100%)			
				Pembinaan dan Fasilitasi ASN Dalam Upacara dan Prosesi Pemakaman Pejabat Daerah Di Lingkup Pemprov Lampung	Jumlah Pelaksanaan Upacara Dilingkup Pemprov Lampung (50 kali)	Jumlah Pelaksanaan Upacara Dilingkup Pemprov Lampung (56%)			
				Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Anggota yang Melaksanakan Tugas Piket (120 Orang)	Jumlah Anggota yang Melaksanakan Tugas Piket (97%)			
				Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan Daerah dan Tamu Jabatan/VIP, Aset-Aset Daerah Prov Lampung	Jumlah Personil Pengawasan Pimpinan Daerah (60 Orang)	Jumlah Personil Pengawasan Pimpinan Daerah (99%)			
				Fasilitasi Pengamanan Wilayah Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada	Jumlah Pelaksanaan Pemilu/Pilkada (8 Kab/Kota)	Jumlah Pelaksanaan Pemilu/Pilkada (98%)			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Penyusunan Data dan Informasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Laporan Dokumen (1 Dok)	Jumlah Laporan Dokumen (98%)			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Peserta Diklat Formal (120 Orang)	Jumlah Peserta Diklat Formal (60%)	Pengurangan refocusing		
				Pembinaan Fisik dan Mental Spiritual Anggota Satpol PP	Jumlah Peserta Pembinaan (800 Orang)	Jumlah Peserta Pembinaan (81%)			
				Workshop/Seminar/Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan SDM Pol PP	Jumlah Peserta Pelatihan Kesempataan, Penjenjangan Fungsional & Dalmas (50 Orang)	Jumlah Peserta Pelatihan Kesempataan, Penjenjangan Fungsional & Dalmas (27%)	Pengurangan refocusing		
				Latihan Teknis Anggota Pol PP	Jumlah Peserta Latnis (60 Orang)	Jumlah Peserta Latnis (57%)	Pengurangan refocusing		
				Monitoring dan Evaluasi Jafung Pol PP Kab/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Jafung (15 Kab/Kota)	Jumlah Dokumen Evaluasi Jafung (96%)			
6	Sosial	Dinas Sosial		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	41 orang	41 orang			
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315 unit	315 unit			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlatan Listrik	300 buah	300 buah			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30 buku	30 buku			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	12 bulan			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 bulan	12 bulan			

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	12 bulan	12 bulan			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 unit	3 unit			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14 unit	14 unit			
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	1 unit	1 unit			
				Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah					
				Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	12 dokumen	12 dokumen			
				Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	12 dokumen	12 dokumen			
				Penyusunan dokumen perencanaan	2 kali	2 kali			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	100 dokumen	100 dokumen			
				Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya					
				Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Penanganan fakir Miskin Wilayah Perkotaan	300 orang	300 orang			
				Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Penanganan fakir Miskin wilayah Perdesaan	400 orang	400 orang			
				Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Penanganan fakir wilayah Pesisir	200 orang	200 orang			
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					
				Peningkatan pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada anak putus sekolah terlantar pada PSBR Radin Intan	40 orang	34 orang	Dikarenakan pandemi Covid-19, pembinaan klien kegiatan terhambat	Kegiatan pembinaan klien diundur pelaksanaannya yang semula bulan April menjadi bulan Juli 2020	
				Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak	50 orang	50 orang	Pemberian akses pendidikan kepada	Melaksanakan pemberian akses	

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				terlantar pada PSAA Harapan Bangsa			klien terhambat Covid-19	pendidikan dengan cara memanggil guru les privat ke panti
				Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar pada UPTD PSAA Budi Asih	50 orang	50 orang	Pemberian akses pendidikan kepada klien terhambat Covid-19	Melaksanakan pemberian akses pendidikan dengan cara memanggil guru les privat ke panti
				Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada UPTD Insan Berguna	15 orang	31 orang		
				Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia terlantar pada UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung	80 orang	81 orang		
				Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang cacat netra pada UPTD PRSPD Indra Kesuma	50 orang	45 orang		
				Peningkatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial kepada Gepeng pada UPTD PRSTS Mardi Guna	25 orang	23 orang		
				Pelayanan dan perlindungan sosial Anak dan Lanjut Usia	125 orang	125 orang		
				Asistensi dan perlindungan sosial disabilitas dan verifikasi data penerima bantuan anak, lanjut usia, disabilitas, korban napza, tuna sosial dan korban perdagangan orang	50 orang	50 orang		
				Pelayanan dan rehabilitasi korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	1050 orang	1050 orang		
				Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PSBR Radin Intan	12 bulan	12 bulan		

No	Urusan Pemerintahan	PD Pelaksana	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PSAA Budi Asih	12 bulan	12 bulan			
				Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PSAA Harapan Bangsa	12 bulan	12 bulan			
				Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PKS Insan Berguna	12 bulan	12 bulan			
				Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PSLU Tresna Werdha Lampung	12 bulan	12 bulan			
				Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PRSPD Indra Kesuma	12 bulan	12 bulan			
				Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran pada UPTD PRSTS Mardi Guna	12 bulan	12 bulan			
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1020 orang	1020 orang			
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	1515 orang	1515 orang			
				Jaminan sosial keluarga	15 kali	15 kali			

BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

A. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD)

1. Catatan Hasil Validasi EKPPD Timda dan Evaluasi Terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2019

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/3098/OTDA tanggal 17 Juni 2020 perihal Penyampaian Manual EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019. Untuk pelaksanaannya berdasarkan Surat Tugas Direktur EKPKD Nomor 1243/EKPKD/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Jadwal Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 terhadap LPPD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2019.

1. Proses Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2019, sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus s.d 1 September Tahun 2020;
 - b. Metode pengukuran kinerja terdiri atas 2 (dua) variabel yaitu Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM):
 - 1) Penilaian Indeks Capaian Kinerja (ICK) terdiri dari:
 - a) Tataran Pengambilan Kebijakan merupakan penilaian terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang terdiri dari 13 (tiga belas) Aspek;
 - b) Tataran Pelaksana Kebijakan merupakan penilaian terhadap Bidang Administrasi Umum atas kinerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 8 (delapan) Aspek;
 - c) Tataran Pelaksana Kebijakan merupakan penilaian terhadap Urusan Pemerintahan atas kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

- 2) Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dilakukan penilaian terhadap Kesesuaian materi dan yang disajikan dalam LPPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Hasil evaluasi terhadap LPPD Provinsi Lampung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
- a. Aspek Pengambil Kebijakan

Pada Aspek Pengambil Kebijakan, secara keseluruhan data yang dibutuhkan mampu disediakan oleh Perangkat Daerah yang berkaitan secara langsung atas Indikator Kinerja Kunci. Tidak terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah. Namun, hal ini harus dipertahankan kinerjanya.
 - b. Aspek Urusan Pemerintahan

Secara umum, pada aspek Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung, dapat disajikan data dukung atas kinerjanya. Selain itu, ada beberapa catatan lainnya sebagai berikut :

 - 1) Urusan Pendidikan

Pada penyelenggaraan Urusan Pendidikan, masih terdapat catatan khusus yang perlu diperhatikan secara khusus oleh Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI, Pendidikan Luar Biasa jenjang SMP/MTS, Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA, Pendidik pada Pendidikan khusus yang memiliki ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik yang capaian kinerjanya kurang dari 30%. Untuk Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA di Provinsi Lampung juga sangat tinggi, ada 1.164 anak yang putus sekolah. Beberapa Indikator ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. Maka dari itu, Gubernur harus mampu meningkatkan capaian kinerja urusan Pendidikan khususnya beberapa IKK tersebut.
 - 2) Urusan Kesehatan

Pada penyelenggaraan Urusan Kesehatan, terdapat beberapa IKK yang capaian kinerjanya rendah dan perlu ditingkatkan, diantaranya adalah IKK tentang Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, dan Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. IKK ini merupakan Indikator untuk mengukur Keberhasilan Penerapan SPM di Kabupaten dan Kota. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memiliki Tugas dan Tanggung Jawab untuk memastikan Penerapan SPM di Kabupaten/Kota berjalan sebagaimana mestinya.



3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat Indikator Kinerja Kunci yang perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Lampung. IKK tersebut adalah Rumah Tangga Pengguna air bersih dengan capaian kinerja masih sebesar 61,91%. IKK ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan SPM pada urusan Pekerjaan Umum. Gubernur Provinsi Lampung seharusnya memperhatikan kondisi ini agar dilakukan dan peningkatan kualitas penerapan SPM pada bidang Pekerjaan Umum dan Perbaikan Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Lampung dapat berjalan lancar.

4) Urusan Trantibum Linmas

Pada penyelenggaraan urusan ini, terdapat 2 IKK yang capaian kerjanya perlu ditingkatkan yaitu Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan capaian kinerja 60%. IKK ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan SPM pada urusan Trantibum Linmas. Gubernur Provinsi Lampung seharusnya memperhatikan kondisi ini agar terciptanya ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

5) Urusan Sosial

Pada Penyelenggaraan urusan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, terdapat sejumlah IKK yang perlu menjadi perhatian agar ditingkatkan kerjanya. Diantaranya adalah :

- a) Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti;
- b) Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti;
- c) Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti.

Tiga IKK ini memiliki capaian kerjanya sangat rendah karena dibawah 5%. IKK ini juga digunakan untuk mengukur keberhasilan SPM pada urusan Sosial. Gubernur Provinsi Lampung seharusnya memperhatikan kondisi ini agar terciptanya kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung.

6) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada penyelenggaraan Urusan ini, Pemerintah Provinsi Lampung harus memperhatikan aspek Perlindungan Anak dan Perempuan dari tindak

kekerasan. Hal ini dikarenakan secara jumlah kasus kekerasan yang menimpa anak ada 114 dan 207 perempuan, walaupun dengan rasio kurang dari 1 anak yang menjadi korban kekerasan dari 10.000 populasi anak dan perempuan. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Perangkat Daerah terkait harus secara gencar dan massif dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga hak-hak anak dan perempuan dari tindak kekerasan

2. Review EKPPD Tim Daerah Provinsi Lampung Terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019

Dalam rangka pelaksanaan EKPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019, berdasarkan Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/3098/OTDA tanggal 17 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Validasi terhadap Hasil EKPPD Kabupaten/Kota oleh Timda dan Evaluasi LPPD Provinsi, terdapat beberapa review atas hasil EKPPD Tim Daerah Provinsi Lampung terhadap LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

- a. Tim Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 di seluruh kabupaten/kota wilayah Provinsi Lampung, dengan rincian sebagai berikut:

1 Lampung Barat	9 Way Kanan
2 Lampung Selatan	10 Tulang Bawang Barat
3 Lampung Tengah	11 Mesuji
4 Lampung Timur	12 Pringsewu
5 Lampung Utara	13 Pesisir Barat
6 Pesawaran	14 Bandar Lampung
7 Tanggamus	15 Metro
8 Tulang Bawang	
- b. Terdapat capaian kinerja IKK yang Tidak Diperoleh Informasi (TDI) pada Kabupaten/Kota yang perlu diklarifikasi
- c. Terdapat capaian kinerja IKK yang Tidak Wajar (extreme) pada kabupaten/kota yang perlu diklarifikasi
- d. Terdapat capaian kinerja IKK yang “value” dalam template (kesalahan teknis penginputan/sistem), perlu diperbaiki dan di cek kembali sehingga tidak mengganggu proses penggabungan pemeringkatan sementara
- e. Terdapat capaian kinerja IKK yang “salah tolong cek” dalam template (kemungkinan salah penginputan elemen data/lebih besar pembilang daripada penyebut), perlu diperbaiki dan dicek kembali



- f. Terdapat capaian kinerja IKK sebagaimana dimaksud huruf b, c, d dan e, diharapkan kepada Tim Daerah Provinsi untuk dapat mengklarifikasi disertai dengan dokumen/data pendukung IKK, dan dapat menghadirkan Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota yang terkait (jika perlu)
- g. Diharapkan kepada Tim Daerah (evaluator kabupaten/kota) menggunakan template individu sesuai dengan kesepakatan Bimtek Timda di Jakarta
- h. Adapun hasil pemeringkatan 15 Kabupaten/Kota Tahun 2019, sampai saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

3. Tanggung Jawab BPK

Tanggungjawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh

Pemerintah Provinsi Lampung, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

4. Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Laporan Hasil Pemeriksaan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24B/LHP/XVIII.BLP/06/2020 dan Nomor 24C/LHP/XVIII.BLP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

BAB IV



REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January 2020 s/d 31 December 2020

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	7.244.171.719.572,14	0,00	7.020.801.388.787,71	7.020.801.388.787,71	(223.370.330.784,43)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.962.401.653.051,14	0,00	2.843.782.823.137,71	2.843.782.823.137,71	(118.618.829.913,43)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.453.824.716.968,00	0,00	2.386.345.268.304,00	2.386.345.268.304,00	(67.479.448.664,00)
4.1.1.01	Pajak Kendaraan Bermotor	720.000.000.000,00	0,00	786.228.389.430,00	786.228.389.430,00	66.228.389.430,00
4.1.1.01.01	A-1 Sedan Jeep, Station Wan (Pribadi)	352.800.000.000,00	0,00	409.406.212.297,00	409.406.212.297,00	56.606.212.297,00
4.1.1.01.02	A-2 Sedan Jeep, Station Wan (Umum)	906.750.000,00	0,00	271.951.620,00	271.951.620,00	(634.798.380,00)
4.1.1.01.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.743.750.000,00	0,00	1.602.289.506,00	1.602.289.506,00	(141.460.494,00)
4.1.1.01.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	1.255.500.000,00	0,00	800.678.450,00	800.678.450,00	(454.821.550,00)
4.1.1.01.05	C-1 Truck, Pick-up (Pribadi)	112.455.000.000,00	0,00	142.797.298.776,00	142.797.298.776,00	30.342.298.776,00
4.1.1.01.06	C-2 Truck, Pick-up (Umum)	61.449.750.000,00	0,00	59.194.079.725,00	59.194.079.725,00	(2.255.670.275,00)
4.1.1.01.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	135.000.000,00	0,00	42.343.200,00	42.343.200,00	(92.656.800,00)
4.1.1.01.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	1.800.000.000,00	0,00	16.501.000,00	16.501.000,00	(1.783.499.000,00)
4.1.1.01.09	E-1 Sepeda Motor, Scooter	187.454.250.000,00	0,00	172.097.034.856,00	172.097.034.856,00	(15.357.215.144,00)
4.1.1.03	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	624.000.000.000,00	0,00	440.909.561.650,00	440.909.561.650,00	(183.090.438.350,00)
4.1.1.03.01	A-1 Sedan Jeep, Station Wan (Pribadi)	290.784.000.000,00	0,00	205.681.881.000,00	205.681.881.000,00	(85.102.119.000,00)
4.1.1.03.02	A-2 Sedan Jeep, Station Wan (Umum)	1.060.800.000,00	0,00	24.623.500,00	24.623.500,00	(1.036.176.500,00)
4.1.1.03.03	B-1 Bus, Micro Bus (Pribadi)	1.310.400.000,00	0,00	2.125.865.000,00	2.125.865.000,00	815.465.000,00
4.1.1.03.04	B-2 Bus, Micro Bus (Umum)	624.000.000,00	0,00	157.889.500,00	157.889.500,00	(466.110.500,00)
4.1.1.03.05	C-1 Truck, Pick-up (Pribadi)	91.341.522.581,00	0,00	67.984.813.275,00	67.984.813.275,00	(23.356.709.306,00)
4.1.1.03.06	C-2 Truck, Pick-up (Umum)	28.329.600.000,00	0,00	12.400.193.750,00	12.400.193.750,00	(15.929.406.250,00)
4.1.1.03.07	D-1 Kendaraan Khusus (Pribadi)	80.516.129,00	0,00	104.085.375,00	104.085.375,00	23.569.246,00
4.1.1.03.08	D-2 Kendaraan Khusus (Umum)	805.161.290,00	0,00	7.989.500,00	7.989.500,00	(797.171.790,00)
4.1.1.03.09		209.664.000.000,00	0,00	152.422.220.750,00	152.422.220.750,00	(57.241.779.250,00)

4.1.1.05	E-1 Sepeda Motor, Scooter	530.000.000.000,00	0,00	536.625.926.088,00	536.625.926.088,00	6.625.926.088,00
4.1.1.05.01	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	258.471.630.000,00	0,00	257.989.783.829,00	257.989.783.829,00	(481.846.171,00)
4.1.1.05.02	Bensin/Premium	69.145.569.000,00	0,00	71.661.238.857,80	71.661.238.857,80	2.515.669.857,80
4.1.1.05.03	Pertamax	5.532.814.000,00	0,00	1.900.958.727,00	1.900.958.727,00	(3.631.855.273,00)
4.1.1.05.04	Pertamax Plus	196.849.987.000,00	0,00	205.073.944.674,20	205.073.944.674,20	8.223.957.674,20
4.1.1.06	Solar	4.000.000.000,00	0,00	5.091.629.070,00	5.091.629.070,00	1.091.629.070,00
4.1.1.06.01	Pajak Air Permukaan	4.000.000.000,00	0,00	5.091.629.070,00	5.091.629.070,00	1.091.629.070,00
4.1.1.08	Pajak Air Permukaan	575.824.716.968,00	0,00	617.489.762.066,00	617.489.762.066,00	41.665.045.098,00
4.1.1.08.01	Pajak Rokok	575.824.716.968,00	0,00	617.489.762.066,00	617.489.762.066,00	41.665.045.098,00
4.1.2	Pajak Rokok.	11.431.298.440,00	0,00	17.080.208.104,00	17.080.208.104,00	5.648.909.664,00
	Hasil Retribusi Daerah					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 1 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	462.493.580,00	0,00	6.170.230.166,00	6.170.230.166,00	5.707.736.586,00
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	342.493.580,00	0,00	6.114.309.666,00	6.114.309.666,00	5.771.816.086,00
4.1.2.01.07	Retribusi Terminal	120.000.000,00	0,00	55.920.500,00	55.920.500,00	(64.079.500,00)
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	10.662.079.360,00	0,00	10.246.922.538,00	10.246.922.538,00	(415.156.822,00)
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.512.248.620,00	0,00	6.940.304.443,00	6.940.304.443,00	(571.944.177,00)
4.1.2.02.02	Retribusi Tempat Pelelangan	580.343.400,00	0,00	491.711.900,00	491.711.900,00	(88.631.500,00)
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.04	Retribusi Pelayanan Pelabuhan	55.532.500,00	0,00	55.478.000,00	55.478.000,00	(54.500,00)
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02.07	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	1.270.837.000,00	0,00	1.778.280.900,00	1.778.280.900,00	507.443.900,00
4.1.2.02.08	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.243.117.840,00	0,00	981.147.295,00	981.147.295,00	(261.970.545,00)
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	306.725.500,00	0,00	663.055.400,00	663.055.400,00	356.329.900,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Trayek	150.930.000,00	0,00	125.359.000,00	125.359.000,00	(25.571.000,00)
4.1.2.03.02	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	31.605.400,00	0,00	29.350.000,00	29.350.000,00	(2.255.400,00)
4.1.2.03.03	Retribusi Perizinan Kapal Perikanan	46.949.300,00	0,00	84.255.000,00	84.255.000,00	37.305.700,00
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	62.240.800,00	0,00	424.091.400,00	424.091.400,00	361.850.600,00
4.1.2.03.05	Retribusi Perizinan usaha Perikanan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.056.449.342,14	0,00	29.873.630.623,14	29.873.630.623,14	(182.818.719,00)
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	29.729.274.051,14	0,00	29.729.274.051,14	29.729.274.051,14	0,00
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah Wahana Baharja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01.02	PT. Bank Lampung	29.729.274.051,14	0,00	29.729.274.051,14	29.729.274.051,14	0,00

4.1.3.03	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	327.175.291,00	0,00	144.356.572,00	144.356.572,00	(182.818.719,00)
4.1.3.03.01	Perusahaan PT.Sarana Lampung Ventura	123.359.719,00	0,00	65.685.000,00	65.685.000,00	(57.674.719,00)
4.1.3.03.04	Deviden Asuransi Bangun Askrida	156.554.625,00	0,00	75.240.918,00	75.240.918,00	(81.313.707,00)
4.1.3.03.05	Deviden PT. Lampung Jasa Utama	47.260.947,00	0,00	3.430.654,00	3.430.654,00	(43.830.293,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	467.089.188.301,00	0,00	410.483.716.106,57	410.483.716.106,57	(56.605.472.194,43)
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	116.007.946.556,00	0,00	9.707.141.998,00	9.707.141.998,00	(106.300.804.558,00)
4.1.4.01.01	Pelepasan Hak Atas Tanah	115.225.134.200,00	0,00	9.606.778.417,00	9.606.778.417,00	(105.618.355.783,00)
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	64.611.956,00	0,00	54.287.333,00	54.287.333,00	(10.324.623,00)
4.1.4.01.04	Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	420.000.000,00	0,00	46.076.248,00	46.076.248,00	(373.923.752,00)
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	298.200.400,00	0,00	0,00	0,00	(298.200.400,00)
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	24.670.277.500,00	0,00	25.060.528.008,71	25.060.528.008,71	390.250.508,71
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	24.201.239.200,00	0,00	24.380.418.234,13	24.380.418.234,13	179.179.034,13
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	469.038.300,00	0,00	680.109.774,58	680.109.774,58	211.071.474,58

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 2 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	2.000.000.000,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	(1.976.500.000,00)
4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	2.000.000.000,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	(1.976.500.000,00)
4.1.4.06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	49.202.288,00	0,00	262.435.767,00	262.435.767,00	213.233.479,00
4.1.4.06.01	Bidang Pendidikan	49.202.288,00	0,00	262.435.767,00	262.435.767,00	213.233.479,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	15.668.731.907,00	0,00	18.258.922.697,00	18.258.922.697,00	2.590.190.790,00
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	14.565.196.907,00	0,00	17.606.536.127,00	17.606.536.127,00	3.041.339.220,00
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.103.535.000,00	0,00	645.956.290,00	645.956.290,00	(457.578.710,00)
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	0,00	0,00	705.317,00	705.317,00	705.317,00
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	5.724.963,00	5.724.963,00	5.724.963,00
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.09.01	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	11.000.000.000,00	0,00	10.376.786.228,00	10.376.786.228,00	(623.213.772,00)
4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain	11.000.000.000,00	0,00	10.376.786.228,00	10.376.786.228,00	(623.213.772,00)
4.1.4.14	Penerimaan dari Jasa Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.4.14.03	Jasa Dari Pelabuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.15	Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	275.716.856.000,00	0,00	340.777.606.795,47	340.777.606.795,47	65.060.750.795,47
4.1.4.15.01	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moloek	263.216.856.000,00	0,00	323.915.054.264,14	323.915.054.264,14	60.698.198.264,14
4.1.4.15.02	Unit Kerja Badan Penghubung Pemprov. Lampung di Jakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.15.03	Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.15.04	UPTD Perkuatan Modal Usaha Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.15.05	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa	12.500.000.000,00	0,00	16.862.552.531,33	16.862.552.531,33	4.362.552.531,33
4.1.4.16	Penerimaan Lain-lain	21.976.174.050,00	0,00	6.016.794.612,39	6.016.794.612,39	(15.959.379.437,61)
4.1.4.16.03	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10.893.008.000,00	0,00	5.782.365.000,00	5.782.365.000,00	(5.110.643.000,00)
4.1.4.16.04	Penerimaan Lainnya	11.083.166.050,00	0,00	234.429.612,39	234.429.612,39	(10.848.736.437,61)
4.2	DANA PERIMBANGAN	4.221.420.623.786,00	0,00	2.461.886.209.957,00	2.461.886.209.957,00	(1.759.534.413.829,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	206.390.393.735,00	0,00	157.793.963.126,00	157.793.963.126,00	(48.596.430.609,00)
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	163.007.232.243,00	0,00	123.204.760.040,00	123.204.760.040,00	(39.802.472.203,00)
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	35.493.593.318,00	0,00	16.851.808.783,00	16.851.808.783,00	(18.641.784.535,00)
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	127.513.638.925,00	0,00	106.352.951.257,00	106.352.951.257,00	(21.160.687.668,00)
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	43.383.161.492,00	0,00	34.589.203.086,00	34.589.203.086,00	(8.793.958.406,00)
4.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0,00	0,00	4.051.372,00	4.051.372,00	4.051.372,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 3 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	920.432.542,00	0,00	344.613.250,00	344.613.250,00	(575.819.292,00)
4.2.1.02.04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)	310.853.183,00	0,00	228.023.258,00	228.023.258,00	(82.829.925,00)
4.2.1.02.05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	3.619.541.686,00	0,00	1.421.716.534,00	1.421.716.534,00	(2.197.825.152,00)
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	23.844.753.000,00	0,00	22.150.757.800,00	22.150.757.800,00	(1.693.995.200,00)
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	4.231.319.051,00	0,00	4.194.587.051,00	4.194.587.051,00	(36.732.000,00)
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	8.484.134.051,00	0,00	4.432.714.651,00	4.432.714.651,00	(4.051.419.400,00)
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Cukai Tembakau	1.972.127.979,00	0,00	1.812.739.170,00	1.812.739.170,00	(159.388.809,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.739.916.377.000,00	0,00	1.732.551.921.000,00	1.732.551.921.000,00	(7.364.456.000,00)
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.739.916.377.000,00	0,00	1.732.551.921.000,00	1.732.551.921.000,00	(7.364.456.000,00)
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.739.916.377.000,00	0,00	1.732.551.921.000,00	1.732.551.921.000,00	(7.364.456.000,00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.275.113.853.051,00	0,00	571.540.325.831,00	571.540.325.831,00	(1.703.573.527.220,00)
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	2.275.113.853.051,00	0,00	571.540.325.831,00	571.540.325.831,00	(1.703.573.527.220,00)
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus	2.275.113.853.051,00	0,00	571.540.325.831,00	571.540.325.831,00	(1.703.573.527.220,00)



4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60.349.442.735,00	0,00	1.715.132.355.693,00	1.715.132.355.693,00	1.654.782.912.958,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	13.915.344.735,00	0,00	8.835.549.695,00	8.835.549.695,00	(5.079.795.040,00)
4.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	37.500.000,00	0,00	496.679.695,00	496.679.695,00	459.179.695,00
4.3.1.01.01	Pemerintah...	37.500.000,00	0,00	496.679.695,00	496.679.695,00	459.179.695,00
4.3.1.03	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	13.877.844.735,00	0,00	8.338.870.000,00	8.338.870.000,00	(5.538.974.735,00)
4.3.1.03.01	Pendapatan Hibah dari SKPD/Instansi	13.877.844.735,00	0,00	8.338.870.000,00	8.338.870.000,00	(5.538.974.735,00)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	46.434.098.000,00	0,00	46.434.098.000,00	46.434.098.000,00	0,00
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	46.434.098.000,00	0,00	46.434.098.000,00	46.434.098.000,00	0,00
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah (DID)	46.434.098.000,00	0,00	46.434.098.000,00	46.434.098.000,00	0,00
4.3.5.02	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.02.01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	1.659.862.707.998,00	1.659.862.707.998,00	1.659.862.707.998,00
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	1.659.862.707.998,00	1.659.862.707.998,00	1.659.862.707.998,00
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	1.659.862.707.998,00	1.659.862.707.998,00	1.659.862.707.998,00
5	BELANJA	7.381.124.107.714,45	0,00	6.967.455.348.182,63	6.967.455.348.182,63	(413.668.759.531,82)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.770.895.012.527,15	0,00	4.551.351.874.689,94	4.551.351.874.689,94	(219.543.137.837,21)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.828.842.594.200,10	0,00	1.731.078.969.141,00	1.731.078.969.141,00	(97.763.625.059,10)
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	1.511.976.686.859,09	0,00	1.449.676.872.027,00	1.449.676.872.027,00	(62.299.814.832,09)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	749.662.906.142,00	0,00	715.561.224.450,00	715.561.224.450,00	(34.101.681.692,00)
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	76.005.401.437,80	0,00	69.986.039.307,00	69.986.039.307,00	(6.019.362.130,80)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	16.002.353.295,00	0,00	14.483.764.600,00	14.483.764.600,00	(1.518.588.695,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE						Halaman 4 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	46.984.397.700,00	0,00	45.061.499.003,00	45.061.499.003,00	(1.922.898.697,00)
5.1.1.01.05	Tunjangan Umum	14.568.780.413,00	0,00	12.771.530.000,00	12.771.530.000,00	(1.797.250.413,00)
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	44.328.528.858,00	0,00	41.228.416.300,00	41.228.416.300,00	(3.100.112.558,00)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.385.153.684,25	0,00	715.349.611,00	715.349.611,00	(669.804.073,25)
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	67.827.447,18	0,00	9.496.957,00	9.496.957,00	(58.330.490,18)
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	69.041.729.840,00	0,00	59.544.669.094,00	59.544.669.094,00	(9.497.060.746,00)
5.1.1.01.10	Uang Paket	231.120.000,00	0,00	225.720.000,00	225.720.000,00	(5.400.000,00)
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	86.913.000,00	0,00	51.156.000,00	51.156.000,00	(35.757.000,00)
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	144.855.000,00	0,00	141.723.000,00	141.723.000,00	(3.132.000,00)
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	86.913.000,00	0,00	71.514.000,00	71.514.000,00	(15.399.000,00)
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	32.103.000,00	0,00	12.984.750,00	12.984.750,00	(19.118.250,00)
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	804.141.000,00	0,00	31.581.000,00	31.581.000,00	(772.560.000,00)
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	20.642.941.216,00	0,00	20.635.764.752,00	20.635.764.752,00	(7.176.464,00)
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	102.600.000,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	(66.600.000,00)
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	432.000.000,00	0,00	432.000.000,00	432.000.000,00	0,00
5.1.1.01.20	Tunjangan Profesi Guru	302.323.770.220,00	0,00	302.070.624.604,00	302.070.624.604,00	(253.145.616,00)
5.1.1.01.21	Tambahan Penghasilan Guru	2.502.000.000,00	0,00	2.320.500.000,00	2.320.500.000,00	(181.500.000,00)
5.1.1.01.22	Tunjangan Khusus Guru	2.419.663.520,00	0,00	1.707.567.000,00	1.707.567.000,00	(712.096.520,00)
5.1.1.01.23	Tunjangan Transportasi	16.830.000.000,00	0,00	16.766.600.000,00	16.766.600.000,00	(63.400.000,00)
5.1.1.01.24	Tunjangan Reses	3.825.000.000,00	0,00	3.825.000.000,00	3.825.000.000,00	0,00
5.1.1.01.25	Tunjangan Hari Raya	71.776.310.388,53	0,00	70.982.326.533,00	70.982.326.533,00	(793.983.855,53)
5.1.1.01.26	Gaji ke-13	71.689.277.697,33	0,00	71.003.821.066,00	71.003.821.066,00	(685.456.631,33)
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	296.618.261.954,66	0,00	262.234.297.114,00	262.234.297.114,00	(34.383.964.840,66)
5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	684.000.000,00	0,00	684.000.000,00	684.000.000,00	0,00
5.1.1.02.06	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	295.934.261.954,66	0,00	261.550.297.114,00	261.550.297.114,00	(34.383.964.840,66)
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	20.247.645.386,35	0,00	19.167.800.000,00	19.167.800.000,00	(1.079.845.386,35)
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Angta DPRD	15.300.000.000,00	0,00	14.940.000.000,00	14.940.000.000,00	(360.000.000,00)
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	4.947.645.386,35	0,00	4.227.800.000,00	4.227.800.000,00	(719.845.386,35)
5.1.1.04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Bunga	33.000.000.000,00	0,00	31.583.615.813,00	31.583.615.813,00	(1.416.384.187,00)
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	33.000.000.000,00	0,00	31.583.615.813,00	31.583.615.813,00	(1.416.384.187,00)
5.1.2.01.04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan bukan Bank	33.000.000.000,00	0,00	31.583.615.813,00	31.583.615.813,00	(1.416.384.187,00)
5.1.4	Belanja Hibah	1.460.836.790.600,00	0,00	1.437.615.494.295,00	1.437.615.494.295,00	(23.221.296.305,00)



5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.735.000.000,00	0,00	12.282.638.250,00	12.282.638.250,00	(1.452.361.750,00)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE						Halaman 5 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	13.735.000.000,00	0,00	12.282.638.250,00	12.282.638.250,00	(1.452.361.750,00)
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	50.626.946.200,00	0,00	45.880.796.445,00	45.880.796.445,00	(4.746.149.755,00)
5.1.4.05.01	Badan/Lembaga/Organisasi	50.626.946.200,00	0,00	45.880.796.445,00	45.880.796.445,00	(4.746.149.755,00)
5.1.4.07	Belanja Hibah Bos Kepada Satuan Pendidikan	1.391.661.270.000,00	0,00	1.374.690.390.000,00	1.374.690.390.000,00	(16.970.880.000,00)
5.1.4.07.01	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kota Bandar Lampung	176.718.603.981,74	0,00	157.147.250.000,00	157.147.250.000,00	(19.571.353.981,74)
5.1.4.07.02	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah kota Metro	39.970.352.837,88	0,00	36.706.050.000,00	36.706.050.000,00	(3.264.302.837,88)
5.1.4.07.03	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan	162.055.584.819,63	0,00	161.328.550.000,00	161.328.550.000,00	(727.034.819,63)
5.1.4.07.04	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Lampung Tengah	209.314.934.734,17	0,00	209.755.150.000,00	209.755.150.000,00	440.215.265,83
5.1.4.07.05	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Lampung Utara	106.194.608.085,75	0,00	99.949.960.000,00	99.949.960.000,00	(6.244.648.085,75)
5.1.4.07.06	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Lampung Barat	44.286.229.364,43	0,00	45.679.590.000,00	45.679.590.000,00	1.393.360.635,57
5.1.4.07.07	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Tulang Bawang	71.712.940.752,29	0,00	75.209.590.000,00	75.209.590.000,00	3.496.649.247,71
5.1.4.07.08	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Tanggamus	89.682.533.553,49	0,00	93.608.510.000,00	93.608.510.000,00	3.925.976.446,51
5.1.4.07.09	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Lampung Timur	162.606.313.369,00	0,00	157.320.570.000,00	157.320.570.000,00	(5.285.743.369,00)
5.1.4.07.10	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pesawaran	66.744.348.202,61	0,00	65.567.570.000,00	65.567.570.000,00	(1.176.778.202,61)
5.1.4.07.11	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Way Kanan	75.159.799.816,01	0,00	82.702.620.000,00	82.702.620.000,00	7.542.820.183,99
5.1.4.07.12	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pringsewu	79.992.020.050,38	0,00	73.396.760.000,00	73.396.760.000,00	(6.595.260.050,38)
5.1.4.07.13	Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Tulang Bawang Barat	46.065.919.887,11	0,00	47.746.700.000,00	47.746.700.000,00	1.680.780.112,89
5.1.4.07.14	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Mesuji	34.178.257.630,00	0,00	39.481.240.000,00	39.481.240.000,00	5.302.982.370,00
5.1.4.07.15	Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Pesisir Barat	26.009.519.302,83	0,00	26.424.280.000,00	26.424.280.000,00	414.760.697,17
5.1.4.07.16	Satuan Pendidikan Dasar SLB Swasta (SDLB/SMPLB)	969.303.612,68	0,00	2.666.000.000,00	2.666.000.000,00	1.696.696.387,32
5.1.4.08	Belanja Hibah kepada Partai Politik	4.813.574.400,00	0,00	4.761.669.600,00	4.761.669.600,00	(51.904.800,00)
5.1.4.08.01	Belanja Hibah kepada Partai Politik	4.813.574.400,00	0,00	4.761.669.600,00	4.761.669.600,00	(51.904.800,00)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	0,00	352.400.000,00	352.400.000,00	(147.600.000,00)
5.1.5.01	Bantuan Sosial yang direncanakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.01.01	Bantuan Dana Guru Ngaji Dalam Rangka Peningkatan Keimanan Masyarakat di Provinsi Lampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.02	Bantuan Sosial yang tidak direncanakan	500.000.000,00	0,00	352.400.000,00	352.400.000,00	(147.600.000,00)



5.1.5.02.01	Resiko yang terkait dengan siklus hidup	400.000.000,00	0,00	341.200.000,00	341.200.000,00	(58.800.000,00)
5.1.5.02.02	Resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi	50.000.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	(38.800.000,00)
5.1.5.02.03	Resiko yang terkait dengan lingkungan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000.000,00)
5.1.5.03.01	Pemberdayaan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5.04.01	Perlindungan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 6 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.286.836.044.218,60	0,00	1.231.408.694.144,94	1.231.408.694.144,94	(55.427.350.073,66)
5.1.6.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	1.286.836.044.218,60	0,00	1.231.408.694.144,94	1.231.408.694.144,94	(55.427.350.073,66)
5.1.6.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Bandar Lampung	134.071.863.786,61	0,00	132.571.863.786,61	132.571.863.786,61	(1.500.000.000,00)
5.1.6.02.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Metro	61.912.539.402,08	0,00	56.362.479.436,59	56.362.479.436,59	(5.550.059.965,49)
5.1.6.02.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Utara	95.819.794.422,79	0,00	92.439.261.617,63	92.439.261.617,63	(3.380.532.805,16)
5.1.6.02.04	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Selatan	115.677.320.827,84	0,00	111.753.717.301,74	111.753.717.301,74	(3.923.603.526,10)
5.1.6.02.05	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Barat	64.915.046.099,51	0,00	62.140.456.604,26	62.140.456.604,26	(2.774.589.495,25)
5.1.6.02.06	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tanggamus	82.323.807.858,04	0,00	79.130.592.199,93	79.130.592.199,93	(3.193.215.658,11)
5.1.6.02.07	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tulang Bawang	82.972.604.906,72	0,00	73.809.441.641,15	73.809.441.641,15	(9.163.163.265,57)
5.1.6.02.08	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Tengah	120.172.763.262,25	0,00	115.682.278.908,33	115.682.278.908,33	(4.490.484.353,92)
5.1.6.02.09	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Way Kanan	81.209.238.807,22	0,00	77.377.656.931,50	77.377.656.931,50	(3.831.581.875,72)
5.1.6.02.10	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Lampung Timur	118.742.446.887,80	0,00	113.410.191.254,05	113.410.191.254,05	(5.332.255.633,75)
5.1.6.02.11	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pesawaran	76.282.289.380,12	0,00	69.617.577.495,09	69.617.577.495,09	(6.664.711.885,03)
5.1.6.02.12	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pringsewu	73.928.908.385,65	0,00	71.430.610.320,92	71.430.610.320,92	(2.498.298.064,73)
5.1.6.02.13	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat	63.744.673.957,26	0,00	61.513.503.973,00	61.513.503.973,00	(2.231.169.984,26)
5.1.6.02.14	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Mesuji	58.502.504.841,03	0,00	58.196.649.674,17	58.196.649.674,17	(305.855.166,86)
5.1.6.02.15	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten Pesisir Barat	56.560.241.393,68	0,00	55.972.412.999,97	55.972.412.999,97	(587.828.393,71)
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	160.879.583.508,45	0,00	119.312.701.296,00	119.312.701.296,00	(41.566.882.212,45)

5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga.	160.879.583.508,45	0,00	119.312.701.296,00	119.312.701.296,00	(41.566.882.212,45)
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	160.879.583.508,45	0,00	119.312.701.296,00	119.312.701.296,00	(41.566.882.212,45)
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.610.229.095.187,30	0,00	2.416.103.473.492,69	2.416.103.473.492,69	(194.125.621.694,61)
5.2.1	Belanja Pegawai	176.732.080.224,00	0,00	240.233.396.093,00	240.233.396.093,00	63.501.315.869,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	37.479.080.524,00	0,00	33.903.256.900,00	33.903.256.900,00	(3.575.823.624,00)
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD	12.367.980.024,00	0,00	10.455.468.900,00	10.455.468.900,00	(1.912.511.124,00)
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.266.130.000,00	0,00	2.177.450.000,00	2.177.450.000,00	(88.680.000,00)
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	551.400.000,00	0,00	486.380.000,00	486.380.000,00	(65.020.000,00)
5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Operator	6.185.260.000,00	0,00	5.997.715.000,00	5.997.715.000,00	(187.545.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 7 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	9.108.420.000,00	0,00	8.541.072.500,00	8.541.072.500,00	(567.347.500,00)
5.2.1.01.07	Honorarium Paramedis	234.800.000,00	0,00	209.750.000,00	209.750.000,00	(25.050.000,00)
5.2.1.01.08	Uang Piket	2.384.740.000,00	0,00	2.170.375.000,00	2.170.375.000,00	(214.365.000,00)
5.2.1.01.09	Uang Pembinaan	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
5.2.1.01.10	Honorarium PPTK	4.305.350.500,00	0,00	3.790.045.500,00	3.790.045.500,00	(515.305.000,00)
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	121.728.851.900,00	0,00	119.378.621.000,00	119.378.621.000,00	(2.350.230.900,00)
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	94.174.298.000,00	0,00	92.845.187.000,00	92.845.187.000,00	(1.329.111.000,00)
5.2.1.02.02	Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten	22.824.838.900,00	0,00	21.994.174.000,00	21.994.174.000,00	(830.664.900,00)
5.2.1.02.03	Honorarium TPHD	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(72.000.000,00)
5.2.1.02.04	Uang Piket	3.356.725.000,00	0,00	3.288.960.000,00	3.288.960.000,00	(67.765.000,00)
5.2.1.02.05	Uang Pembinaan	1.300.990.000,00	0,00	1.250.300.000,00	1.250.300.000,00	(50.690.000,00)
5.2.1.03	Uang Lembur	4.649.355.300,00	0,00	4.162.214.200,00	4.162.214.200,00	(487.141.100,00)
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.649.355.300,00	0,00	4.162.214.200,00	4.162.214.200,00	(487.141.100,00)
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.04	Belanja Pegawai BLUD	3.293.783.500,00	0,00	2.479.767.600,00	2.479.767.600,00	(814.015.900,00)
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	1.852.000.000,00	0,00	1.308.437.000,00	1.308.437.000,00	(543.563.000,00)
5.2.1.04.03	Belanja Pegawai BLUD UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM	115.140.000,00	0,00	0,00	0,00	(115.140.000,00)
5.2.1.04.05	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit Jiwa	1.326.643.500,00	0,00	1.171.330.600,00	1.171.330.600,00	(155.312.900,00)
5.2.1.05	Belanja Pegawai BOS	9.581.009.000,00	0,00	80.309.536.393,00	80.309.536.393,00	70.728.527.393,00
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BOS	9.581.009.000,00	0,00	80.309.536.393,00	80.309.536.393,00	70.728.527.393,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.588.883.969.104,20	0,00	1.423.341.867.179,80	1.423.341.867.179,80	(165.542.101.924,40)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.076.493.857,10	0,00	47.726.438.800,99	47.726.438.800,99	(1.350.055.056,11)

5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	29.085.844.295,10	0,00	28.656.973.383,99	28.656.973.383,99	(428.870.911,11)
5.2.2.01.02	Belanja dokumen/ administrasi tender	15.336.700,00	0,00	3.655.000,00	3.655.000,00	(11.681.700,00)
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.123.060.424,00	0,00	2.066.605.121,00	2.066.605.121,00	(56.455.303,00)
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	322.814.150,00	0,00	313.267.900,00	313.267.900,00	(9.546.250,00)
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.582.625.295,00	0,00	2.508.892.740,00	2.508.892.740,00	(73.732.555,00)
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.626.850.825,00	0,00	2.441.025.837,00	2.441.025.837,00	(185.824.988,00)
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	65.100.000,00	0,00	65.050.000,00	65.050.000,00	(50.000,00)
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	23.281.800,00	0,00	22.490.300,00	22.490.300,00	(791.500,00)
5.2.2.01.09	Belanja Peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi	4.065.010.378,00	0,00	3.873.226.070,00	3.873.226.070,00	(191.784.308,00)
5.2.2.01.10	Belanja Pantry	223.417.050,00	0,00	220.386.150,00	220.386.150,00	(3.030.900,00)
5.2.2.01.11	Belanja Bahan dan Alat Sanitasi	90.375.800,00	0,00	90.127.400,00	90.127.400,00	(248.400,00)
5.2.2.01.12	Belanja Linen/Perlengkapan Ruang Pasien	60.596.200,00	0,00	60.248.000,00	60.248.000,00	(348.200,00)
5.2.2.01.13	Belanja Pakan	1.307.329.840,00	0,00	1.246.837.414,00	1.246.837.414,00	(60.492.426,00)
5.2.2.01.14	Belanja Laundry	409.250.000,00	0,00	400.405.035,00	400.405.035,00	(8.844.965,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.01.15	Belanja Alat Peraga/Pelatihan/Praktek/Pameran/Alat Bantu	1.452.165.415,00	0,00	1.371.695.650,00	1.371.695.650,00	(80.469.765,00)
5.2.2.01.16	Belanja Dokumentasi / Dekorasi	1.428.145.885,00	0,00	1.267.727.300,00	1.267.727.300,00	(160.418.585,00)
5.2.2.01.17	Belanja Peralatan Pendukung Kendaraan di Atas Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.18	Belanja alat/Perlengkapan Pertukangan	552.164.800,00	0,00	542.775.000,00	542.775.000,00	(9.389.800,00)
5.2.2.01.19	Belanja Souvenir/Cinder Mata/Piala/Trophy/Hadiah	2.643.125.000,00	0,00	2.575.050.500,00	2.575.050.500,00	(68.074.500,00)
5.2.2.01.20	Belanja Perlengkapan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.061.509.485,00	0,00	13.800.961.249,60	13.800.961.249,60	(3.260.548.235,40)
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	4.297.627.400,00	0,00	2.128.070.114,00	2.128.070.114,00	(2.169.557.286,00)
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	535.198.000,00	0,00	533.408.000,00	533.408.000,00	(1.790.000,00)
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	16.050.000,00	0,00	15.333.000,00	15.333.000,00	(717.000,00)
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.814.744.867,00	0,00	1.786.053.847,60	1.786.053.847,60	(28.691.019,40)
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia dan Pupuk	712.884.800,00	0,00	662.494.850,00	662.494.850,00	(50.389.950,00)
5.2.2.02.06	Belanja Tas Kegiatan	1.527.665.000,00	0,00	1.202.090.000,00	1.202.090.000,00	(325.575.000,00)
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga	226.651.562,00	0,00	226.642.150,00	226.642.150,00	(9.412,00)
5.2.2.02.08	Belanja Perlengkapan /Peralatan Olahraga	286.309.500,00	0,00	269.575.500,00	269.575.500,00	(16.734.000,00)
5.2.2.02.09	Belanja Specimen	8.155.590,00	0,00	8.155.400,00	8.155.400,00	(190,00)
5.2.2.02.11	Belanja bahan pakan ternak	152.700.000,00	0,00	151.800.500,00	151.800.500,00	(899.500,00)
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Kompensasi	105.300.000,00	0,00	102.730.000,00	102.730.000,00	(2.570.000,00)
5.2.2.02.13	Belanja Publikasi	1.407.481.990,00	0,00	1.217.440.500,00	1.217.440.500,00	(190.041.490,00)
5.2.2.02.14	Belanja Spanduk	1.629.280.000,00	0,00	1.469.652.000,00	1.469.652.000,00	(159.628.000,00)
5.2.2.02.15	Belanja Bahan Pangan (Dapur Umum Bencana Alam)	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.2.2.02.17	Belanja Bahan Peralatan Kerja	526.997.700,00	0,00	483.012.800,00	483.012.800,00	(43.984.900,00)
5.2.2.02.18	Belanja Bahan Perlengkapan / Peralatan Kesehatan / Kedokteran	1.198.433.700,00	0,00	1.033.784.752,00	1.033.784.752,00	(164.648.948,00)
5.2.2.02.19	Belanja Bahan Suku Cadang Alat Berat/Besar/Bengkel	223.275.000,00	0,00	222.850.000,00	222.850.000,00	(425.000,00)
5.2.2.02.21	Belanja Bahan Laboratorium	1.529.856.001,00	0,00	1.528.067.836,00	1.528.067.836,00	(1.788.165,00)
5.2.2.02.22	Belanja Bahan Pustaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.02.23	Belanja Bahan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	798.098.375,00	0,00	695.308.000,00	695.308.000,00	(102.790.375,00)
5.2.2.02.24	Belanja Benih/Induk Ikan	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.2.2.02.25	Belanja Wallpaper Kantor	25.800.000,00	0,00	25.492.000,00	25.492.000,00	(308.000,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.643.821.479,00	0,00	79.028.211.385,52	79.028.211.385,52	(6.615.610.093,48)

5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.242.784.182,00	0,00	1.717.335.395,00	1.717.335.395,00	(525.448.787,00)
5.2.2.03.02	Belanja air	913.124.400,00	0,00	606.407.155,00	606.407.155,00	(306.717.245,00)
5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.641.421.379,00	0,00	15.483.343.172,00	15.483.343.172,00	(3.158.078.207,00)
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.370.328.550,00	0,00	3.281.063.000,00	3.281.063.000,00	(89.265.550,00)
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.363.255.507,00	0,00	14.413.103.026,35	14.413.103.026,35	(950.152.480,65)
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	914.150.000,00	0,00	813.969.740,00	813.969.740,00	(100.180.260,00)
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	336.095.000,00	0,00	181.659.480,00	181.659.480,00	(154.435.520,00)
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	606.120.970,00	0,00	513.784.940,00	513.784.940,00	(92.336.030,00)
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi	24.415.421.000,00	0,00	24.006.266.736,00	24.006.266.736,00	(409.154.264,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 9 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan kantor, perlengkapan kantor dan rumah tangga	2.002.564.610,00	0,00	1.870.644.656,00	1.870.644.656,00	(131.919.954,00)
5.2.2.03.14	Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	2.547.961.500,00	0,00	2.426.359.156,00	2.426.359.156,00	(121.602.344,00)
5.2.2.03.15	Belanja Jasa pemenang Lomba	258.000.000,00	0,00	256.500.000,00	256.500.000,00	(1.500.000,00)
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tol/ Parkir	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.2.03.17	Belanja Iuran /PBB	234.002.000,00	0,00	190.405.451,00	190.405.451,00	(43.596.549,00)
5.2.2.03.18	Belanja Jasa sosial (Pemakaman/Pemulangan/Pengiriman Pasien/Orang terlantar, Penyandang Masalah Sosial)	361.213.030,00	0,00	327.438.030,00	327.438.030,00	(33.775.000,00)
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pendidikan /Kesehatan Panti Sosial	429.153.800,00	0,00	428.403.000,00	428.403.000,00	(750.800,00)
5.2.2.03.21	Belanja Jasa Perawatan / Penbatan	40.393.500,00	0,00	35.210.000,00	35.210.000,00	(5.183.500,00)
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Kebersihan / Cleaning Service	5.848.058.000,00	0,00	5.661.270.170,17	5.661.270.170,17	(186.787.829,83)
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	100.000.000,00	0,00	3.633.500,00	3.633.500,00	(96.366.500,00)
5.2.2.03.24	Belanja Jasa Pelayanan Medis	6.658.924.051,00	0,00	6.452.696.778,00	6.452.696.778,00	(206.227.273,00)
5.2.2.03.26	Belanja Jasa Pemeliharaan alat-alat Kedokteran/Laboratorium	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.2.2.03.27	Belanja Jasa Bunga	9.350.000,00	0,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00
5.2.2.03.29	Belanja Jasa Pengemasan Barang (Wrapping)	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pendataan Piutang PKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.03.31	Belanja Jasa Event Organizer	323.000.000,00	0,00	320.868.000,00	320.868.000,00	(2.132.000,00)
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	73.044.439.988,00	0,00	70.075.030.468,00	70.075.030.468,00	(2.969.409.520,00)
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	71.572.377.518,00	0,00	68.933.269.331,00	68.933.269.331,00	(2.639.108.187,00)
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	406.312.470,00	0,00	402.283.750,00	402.283.750,00	(4.028.720,00)
5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Jiwa	579.750.000,00	0,00	511.962.787,00	511.962.787,00	(67.787.213,00)
5.2.2.04.05	Belanja Premi Asuransi Pertanian	486.000.000,00	0,00	227.514.600,00	227.514.600,00	(258.485.400,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.328.320.640,00	0,00	19.392.357.384,00	19.392.357.384,00	(935.963.256,00)



5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.312.953.975,00	0,00	4.255.780.634,00	4.255.780.634,00	(57.173.341,00)
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.593.136.525,00	0,00	3.543.107.951,00	3.543.107.951,00	(50.028.574,00)
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.336.571.710,00	0,00	8.107.206.859,00	8.107.206.859,00	(229.364.851,00)
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	34.886.000,00	0,00	20.460.903,00	20.460.903,00	(14.425.097,00)
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	854.608.400,00	0,00	424.971.187,00	424.971.187,00	(429.637.213,00)
5.2.2.05.07	Belanja Pembelian Ban	2.514.332.780,00	0,00	2.386.658.950,00	2.386.658.950,00	(127.673.830,00)
5.2.2.05.08	Belanja Pembelian ACCU	681.831.250,00	0,00	654.170.900,00	654.170.900,00	(27.660.350,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.522.192.105,91	0,00	51.048.740.777,43	51.048.740.777,43	(1.473.451.328,48)
5.2.2.06.01	Belanja cetak	35.444.379.342,00	0,00	34.403.651.054,00	34.403.651.054,00	(1.040.728.288,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.216.547.474,91	0,00	13.863.729.615,43	13.863.729.615,43	(352.817.859,48)
5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.861.265.289,00	0,00	2.781.360.108,00	2.781.360.108,00	(79.905.181,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23.957.447.500,00	0,00	19.932.771.200,00	19.932.771.200,00	(4.024.676.300,00)
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	13.078.100.000,00	0,00	10.602.200.200,00	10.602.200.200,00	(2.475.899.800,00)
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.332.007.500,00	0,00	8.825.571.000,00	8.825.571.000,00	(1.506.436.500,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 10 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Gudang	455.340.000,00	0,00	446.500.000,00	446.500.000,00	(8.840.000,00)
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Taman	86.000.000,00	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	(33.500.000,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.769.114.900,00	0,00	1.520.833.400,00	1.520.833.400,00	(248.281.500,00)
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.764.114.900,00	0,00	1.515.833.400,00	1.515.833.400,00	(248.281.500,00)
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.09.04	Belanja Sewa Hand Tractor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.167.935.000,00	0,00	5.264.737.490,00	5.264.737.490,00	(903.197.510,00)



5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	804.080.000,00	0,00	715.854.490,00	715.854.490,00	(88.225.510,00)
5.2.2.10.03	Belanja sewa proyektor	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	72.500.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	(2.500.000,00)
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	3.237.125.000,00	0,00	2.912.213.800,00	2.912.213.800,00	(324.911.200,00)
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System dan elektronik	1.201.175.000,00	0,00	1.121.234.200,00	1.121.234.200,00	(79.940.800,00)
5.2.2.10.08	Belanja sewa Partisi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Peralatan Elektronik	518.420.000,00	0,00	255.550.000,00	255.550.000,00	(262.870.000,00)
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Tanaman	138.885.000,00	0,00	138.135.000,00	138.135.000,00	(750.000,00)
5.2.2.10.12	Belanja Sewa peralatan Praktek	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Baleho	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(140.000.000,00)
5.2.2.10.14	Belanja Sewa Peralatan Olah Raga	46.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	(4.000.000,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.629.668.706,36	0,00	75.605.049.974,00	75.605.049.974,00	(8.024.618.732,36)
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	14.676.690.350,00	0,00	11.180.800.185,00	11.180.800.185,00	(3.495.890.165,00)
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.752.018.696,36	0,00	18.181.689.389,00	18.181.689.389,00	(1.570.329.307,36)
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.207.166.550,00	0,00	14.999.769.100,00	14.999.769.100,00	(207.397.450,00)
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pasien	646.896.000,00	0,00	641.820.500,00	641.820.500,00	(5.075.500,00)
5.2.2.11.05	Belanja makanan dan minuman Panti sosial	4.841.340.000,00	0,00	3.677.315.600,00	3.677.315.600,00	(1.164.024.400,00)
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	28.505.557.110,00	0,00	26.923.655.200,00	26.923.655.200,00	(1.581.901.910,00)
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.515.176.500,00	0,00	2.444.614.000,00	2.444.614.000,00	(70.562.500,00)
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	621.302.500,00	0,00	620.545.000,00	620.545.000,00	(757.500,00)
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	446.150.000,00	0,00	432.550.000,00	432.550.000,00	(13.600.000,00)
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	379.950.000,00	0,00	368.050.000,00	368.050.000,00	(11.900.000,00)
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	37.700.000,00	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	(1.200.000,00)
5.2.2.12.06	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas	566.574.000,00	0,00	565.724.000,00	565.724.000,00	(850.000,00)
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	463.500.000,00	0,00	421.245.000,00	421.245.000,00	(42.255.000,00)
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	492.622.500,00	0,00	344.917.500,00	344.917.500,00	(147.705.000,00)
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	455.122.500,00	0,00	307.417.500,00	307.417.500,00	(147.705.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.13.02	Belanja Atribut Kelengkapan Kantor	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.868.561.000,00	0,00	3.352.534.350,00	3.352.534.350,00	(516.026.650,00)
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	850.000.000,00	0,00	804.100.000,00	804.100.000,00	(45.900.000,00)
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	805.200.000,00	0,00	748.600.000,00	748.600.000,00	(56.600.000,00)
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	854.166.000,00	0,00	650.136.000,00	650.136.000,00	(204.030.000,00)
5.2.2.14.05	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus	286.080.000,00	0,00	167.725.000,00	167.725.000,00	(118.355.000,00)
5.2.2.14.06	Belanja pakaian Pasien/ kelayan Panti sosial	256.215.000,00	0,00	255.090.000,00	255.090.000,00	(1.125.000,00)
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Peserta	816.900.000,00	0,00	726.883.350,00	726.883.350,00	(90.016.650,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	135.063.722.637,33	0,00	112.101.289.419,00	112.101.289.419,00	(22.962.433.218,33)
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.180.493.175,33	0,00	55.653.194.644,00	55.653.194.644,00	(10.527.298.531,33)
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	68.883.229.462,00	0,00	56.448.094.775,00	56.448.094.775,00	(12.435.134.687,00)
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	696.550.000,00	0,00	477.450.000,00	477.450.000,00	(219.100.000,00)
5.2.2.16.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	168.350.000,00	0,00	114.400.000,00	114.400.000,00	(53.950.000,00)
5.2.2.16.04	Belanja beasiswa tugas belajar S3	523.200.000,00	0,00	363.050.000,00	363.050.000,00	(160.150.000,00)
5.2.2.16.06	Belanja Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar PNS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000,00)
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.167.076.500,00	0,00	4.247.123.735,00	4.247.123.735,00	(919.952.765,00)
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.679.774.000,00	0,00	1.305.221.910,00	1.305.221.910,00	(374.552.090,00)
5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	311.548.500,00	0,00	259.222.000,00	259.222.000,00	(52.326.500,00)
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	3.175.754.000,00	0,00	2.682.679.825,00	2.682.679.825,00	(493.074.175,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	128.904.295.353,00	0,00	127.218.348.736,00	127.218.348.736,00	(1.685.946.617,00)

5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	82.105.189.727,00	0,00	81.962.774.031,00	81.962.774.031,00	(142.415.696,00)
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Jembatan	1.724.030.000,00	0,00	1.712.813.270,00	1.712.813.270,00	(11.216.730,00)
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung	33.128.379.734,00	0,00	31.788.854.590,00	31.788.854.590,00	(1.339.525.144,00)
5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	1.770.803.732,00	0,00	1.744.839.400,00	1.744.839.400,00	(25.964.332,00)
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik	1.368.023.400,00	0,00	1.305.075.727,00	1.305.075.727,00	(62.947.673,00)
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.472.989.640,00	0,00	5.444.843.063,00	5.444.843.063,00	(28.146.577,00)
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	6.000.000,00	0,00	5.010.000,00	5.010.000,00	(990.000,00)
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	844.994.980,00	0,00	843.088.000,00	843.088.000,00	(1.906.980,00)
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Alat Rumah Tangga	123.200.000,00	0,00	123.159.000,00	123.159.000,00	(41.000,00)
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan	1.322.025.000,00	0,00	1.320.876.500,00	1.320.876.500,00	(1.148.500,00)
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	243.750.000,00	0,00	216.184.600,00	216.184.600,00	(27.565.400,00)
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat alat Bengkel	54.750.000,00	0,00	54.750.000,00	54.750.000,00	0,00
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	200.000.000,00	0,00	197.756.955,00	197.756.955,00	(2.243.045,00)
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	182.825.000,00	0,00	145.479.000,00	145.479.000,00	(37.346.000,00)
5.2.2.20.17	Belanja Pemeliharaan Drainase	352.584.140,00	0,00	348.094.600,00	348.094.600,00	(4.489.540,00)
5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat Musik	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	15.171.489.400,00	0,00	14.304.123.470,00	14.304.123.470,00	(867.365.930,00)
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	3.019.610.400,00	0,00	3.015.441.400,00	3.015.441.400,00	(4.169.000,00)
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Non Fisik	11.084.022.000,00	0,00	10.384.140.690,00	10.384.140.690,00	(699.881.310,00)
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Appraisal	428.470.000,00	0,00	307.216.900,00	307.216.900,00	(121.253.100,00)
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Non Fisik	470.387.000,00	0,00	428.844.480,00	428.844.480,00	(41.542.520,00)
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Aplikasi	169.000.000,00	0,00	168.480.000,00	168.480.000,00	(520.000,00)
5.2.2.22	Belanja Jasa Keamanan	2.260.445.000,00	0,00	2.148.605.000,00	2.148.605.000,00	(111.840.000,00)
5.2.2.22.01	Belanja Jasa Keamanan untuk Kepolisian	438.470.000,00	0,00	378.250.000,00	378.250.000,00	(60.220.000,00)
5.2.2.22.02	Belanja Jasa Keamanan Untuk Penjaga Malam	1.313.050.000,00	0,00	1.264.630.000,00	1.264.630.000,00	(48.420.000,00)
5.2.2.22.03	Jasa Keamanan Pol PP	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
5.2.2.22.04	Belanja Jasa Keamanan Satpam	506.425.000,00	0,00	503.225.000,00	503.225.000,00	(3.200.000,00)
5.2.2.23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	285.995.347.000,00	0,00	284.337.665.425,00	284.337.665.425,00	(1.657.681.575,00)
5.2.2.23.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	276.408.825.000,00	0,00	273.457.558.091,00	273.457.558.091,00	(2.951.266.909,00)
5.2.2.23.03	Belanja Barang dan Jasa BLUD UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan UMKM	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(120.000.000,00)
5.2.2.23.05	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Jiwa	9.466.522.000,00	0,00	10.880.107.334,00	10.880.107.334,00	1.413.585.334,00
5.2.2.24	Belanja Akomodasi, Transportasi dan Uang Saku Peserta	19.143.970.200,00	0,00	16.599.774.546,00	16.599.774.546,00	(2.544.195.654,00)
5.2.2.24.01	Belanja Transportasi Peserta Non PNS	3.389.024.200,00	0,00	1.968.716.000,00	1.968.716.000,00	(1.420.308.200,00)
5.2.2.24.02	Belanja Uang Saku Peserta Non PNS	13.043.080.000,00	0,00	12.551.210.000,00	12.551.210.000,00	(491.870.000,00)
5.2.2.24.03	Belanja Akomodasi Tamu	2.711.866.000,00	0,00	2.079.848.546,00	2.079.848.546,00	(632.017.454,00)
5.2.2.25	Belanja Hibah Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	206.785.662.052,50	0,00	178.598.588.270,26	178.598.588.270,26	(28.187.073.782,24)
5.2.2.25.01	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	205.069.662.052,50	0,00	176.993.212.270,26	176.993.212.270,26	(28.076.449.782,24)
5.2.2.25.02	Belanja Hibah Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.716.000.000,00	0,00	1.605.376.000,00	1.605.376.000,00	(110.624.000,00)
5.2.2.26	Belanja Bantuan Sosial Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.768.097.500,00	0,00	2.921.882.116,00	2.921.882.116,00	(846.215.384,00)
5.2.2.26.01	Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.771.697.500,00	0,00	1.765.615.900,00	1.765.615.900,00	(6.081.600,00)
5.2.2.26.02	Belanja Bantuan Sosial Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.996.400.000,00	0,00	1.156.266.216,00	1.156.266.216,00	(840.133.784,00)
5.2.2.27	Belanja Restitusi Pajak	152.545.000,00	0,00	53.788.615,00	53.788.615,00	(98.756.385,00)
5.2.2.27.01	Belanja Restitusi PKB	142.545.000,00	0,00	52.798.615,00	52.798.615,00	(89.746.385,00)
5.2.2.27.02	Belanja Restitusi BBNKB	10.000.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	(9.010.000,00)
5.2.2.28	Belanja Jasa Pihak Ketiga	70.640.943.298,00	0,00	44.935.905.653,00	44.935.905.653,00	(25.705.037.645,00)

5.2.2.28.01	Jasa Pihak Ketiga	70.640.943.298,00	0,00	44.935.905.653,00	44.935.905.653,00	(25.705.037.645,00)
-------------	-------------------	-------------------	------	-------------------	-------------------	---------------------

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 13 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.29	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	37.806.239.073,00	0,00	33.369.332.416,00	33.369.332.416,00	(4.436.906.657,00)
5.2.2.29.01	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	37.806.239.073,00	0,00	33.369.332.416,00	33.369.332.416,00	(4.436.906.657,00)
5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	7.733.083.000,00	0,00	7.525.569.500,00	7.525.569.500,00	(207.513.500,00)
5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	6.564.600.000,00	0,00	6.564.600.000,00	6.564.600.000,00	0,00
5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.168.483.000,00	0,00	960.969.500,00	960.969.500,00	(207.513.500,00)
5.2.2.31	Belanja Barang dan Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.955.245.150,00	0,00	16.728.643.550,00	16.728.643.550,00	(2.226.601.600,00)
5.2.2.31.01	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	18.919.651.400,00	0,00	16.717.643.550,00	16.717.643.550,00	(2.202.007.850,00)
5.2.2.31.02	Belanja Jasa Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	35.593.750,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	(24.593.750,00)
5.2.2.33	Belanja Jasa Pendidikan (BOSDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	230.561.954.279,00	0,00	188.236.578.749,00	188.236.578.749,00	(42.325.375.530,00)
5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa BOS	230.561.954.279,00	0,00	188.236.578.749,00	188.236.578.749,00	(42.325.375.530,00)
5.2.3	Belanja Modal	844.613.045.859,10	0,00	752.528.210.219,89	752.528.210.219,89	(92.084.835.639,21)
5.2.3.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.05	Belanja modal Pengadaan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.05.04	Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.10	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain	5.208.075.000,00	0,00	3.632.712.750,00	3.632.712.750,00	(1.575.362.250,00)
5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...	5.208.075.000,00	0,00	3.632.712.750,00	3.632.712.750,00	(1.575.362.250,00)
5.2.3.11	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung, Jalan dan Jembatan	5.635.000.000,00	0,00	5.152.301.200,00	5.152.301.200,00	(482.698.800,00)
5.2.3.11.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.11.08	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	5.635.000.000,00	0,00	5.152.301.200,00	5.152.301.200,00	(482.698.800,00)
5.2.3.14	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Berat	3.520.000.000,00	0,00	3.335.650.000,00	3.335.650.000,00	(184.350.000,00)

5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan Grader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.14.03	Belanja modal Pengadaan Excavator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment	1.320.000.000,00	0,00	1.138.500.000,00	1.138.500.000,00	(181.500.000,00)
5.2.3.14.10	Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat	1.650.000.000,00	0,00	1.649.450.000,00	1.649.450.000,00	(550.000,00)
5.2.3.14.13	Belanja modal Pengadaan Kompresor	440.000.000,00	0,00	437.800.000,00	437.800.000,00	(2.200.000,00)
5.2.3.14.14	Belanja modal Pengadaan Jack Hammer	66.000.000,00	0,00	65.950.000,00	65.950.000,00	(50.000,00)
5.2.3.14.15	Belanja modal Pengadaan Stamper	44.000.000,00	0,00	43.950.000,00	43.950.000,00	(50.000,00)
5.2.3.16	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	45.430.600,00	0,00	44.289.500,00	44.289.500,00	(1.141.100,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 14 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.16.04	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	19.700.000,00	0,00	19.650.000,00	19.650.000,00	(50.000,00)
5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan Pompa	25.730.600,00	0,00	24.639.500,00	24.639.500,00	(1.091.100,00)
5.2.3.16.07	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.17	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.058.962.000,00	0,00	4.090.000.000,00	4.090.000.000,00	(968.962.000,00)
5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	4.152.780.000,00	0,00	3.219.000.000,00	3.219.000.000,00	(933.780.000,00)
5.2.3.17.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
5.2.3.17.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	572.814.500,00	0,00	538.000.000,00	538.000.000,00	(34.814.500,00)
5.2.3.17.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.17.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	113.367.500,00	0,00	113.000.000,00	113.000.000,00	(367.500,00)
5.2.3.17.13	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor lift/elevator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.22	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	455.000.000,00	0,00	302.230.000,00	302.230.000,00	(152.770.000,00)
5.2.3.22.01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset	455.000.000,00	0,00	302.230.000,00	302.230.000,00	(152.770.000,00)
5.2.3.23	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2.3.23.03	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.2.3.24	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	43.940.000,00	0,00	40.550.000,00	40.550.000,00	(3.390.000,00)
5.2.3.24.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS	32.480.000,00	0,00	32.300.000,00	32.300.000,00	(180.000,00)
5.2.3.24.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	11.460.000,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	(3.210.000,00)
5.2.3.25	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	100.548.700,00	0,00	95.043.700,00	95.043.700,00	(5.505.000,00)

5.2.3.25.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin Bajak Belanja	22.000.000,00	0,00	21.945.000,00	21.945.000,00	(55.000,00)
5.2.3.25.09	Modal Peralatan Pertanian Lainnya Belanja	38.350.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	(350.000,00)
5.2.3.25.15	Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	40.198.700,00	0,00	35.098.700,00	35.098.700,00	(5.100.000,00)
5.2.3.26	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	634.859.450,00	0,00	566.219.240,00	566.219.240,00	(68.640.210,00)
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	120.448.050,00	0,00	120.372.240,00	120.372.240,00	(75.810,00)
5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.26.04	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	514.411.400,00	0,00	445.847.000,00	445.847.000,00	(68.564.400,00)
5.2.3.27	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	1.455.906.200,00	0,00	1.382.007.115,00	1.382.007.115,00	(73.899.085,00)
5.2.3.27.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	2.952.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	(452.000,00)
5.2.3.27.02	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	228.653.000,00	0,00	211.674.750,00	211.674.750,00	(16.978.250,00)
5.2.3.27.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	70.300.000,00	0,00	67.835.840,00	67.835.840,00	(2.464.160,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 15 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.27.05	Belanja modal Pengadaan mesin cetak	13.686.000,00	0,00	13.356.000,00	13.356.000,00	(330.000,00)
5.2.3.27.06	Belanja modal Pengadaan mesin jilid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.27.07	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas Belanja	29.160.000,00	0,00	28.280.000,00	28.280.000,00	(880.000,00)
5.2.3.27.10	modal Pengadaan papan visual elektronik Belanja	249.350.000,00	0,00	247.550.000,00	247.550.000,00	(1.800.000,00)
5.2.3.27.11	modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.27.12	Modal Pengadaan Papan Informasi	268.070.000,00	0,00	237.194.500,00	237.194.500,00	(30.875.500,00)
5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi Belanja	248.185.000,00	0,00	246.200.250,00	246.200.250,00	(1.984.750,00)
5.2.3.27.14	Modal Pengadaan Mesin Pompa Air Belanja	104.850.500,00	0,00	101.497.000,00	101.497.000,00	(3.353.500,00)
5.2.3.27.15	Modal Pengadaan Peralatan Audio Visual Belanja	129.057.700,00	0,00	128.835.000,00	128.835.000,00	(222.700,00)
5.2.3.27.22	Modal Pengadaan Papan Tulis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.27.23	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	111.642.000,00	0,00	97.083.775,00	97.083.775,00	(14.558.225,00)
5.2.3.28	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.826.079.860,00	0,00	7.482.774.255,00	7.482.774.255,00	(343.305.605,00)

5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.135.040.300,00	0,00	1.067.782.700,00	1.067.782.700,00	(67.257.600,00)
5.2.3.28.03	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	91.477.000,00	0,00	81.764.400,00	81.764.400,00	(9.712.600,00)
5.2.3.28.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	94.565.000,00	0,00	93.907.000,00	93.907.000,00	(658.000,00)
5.2.3.28.06	Belanja modal Pengadaan almari	91.372.500,00	0,00	63.135.000,00	63.135.000,00	(28.237.500,00)
5.2.3.28.07	Belanja modal Pengadaan brankas	29.940.000,00	0,00	29.935.000,00	29.935.000,00	(5.000,00)
5.2.3.28.08	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	74.295.500,00	0,00	61.717.000,00	61.717.000,00	(12.578.500,00)
5.2.3.28.09	Belanja modal Pengadaan white board	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.28.11	Belanja Modal Pengadaan AC	2.742.493.500,00	0,00	2.617.166.335,00	2.617.166.335,00	(125.327.165,00)
5.2.3.28.12	Belanja Modal Pengadaan TV	1.006.349.235,00	0,00	955.327.300,00	955.327.300,00	(51.021.935,00)
5.2.3.28.13	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	9.500.100,00	0,00	9.207.000,00	9.207.000,00	(293.100,00)
5.2.3.28.14	Belanja Modal Pengadaan Exhoust Fan	6.087.000,00	0,00	5.715.000,00	5.715.000,00	(372.000,00)
5.2.3.28.15	Belanja Modal Pengadaan Pengaman Jendela / Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.28.16	Belanja Modal Pengadaan DVD Player	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.28.18	Belanja Modal Pengadaan Tenda dan Nomade	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00
5.2.3.28.19	Belanja Modal Pengadaan Pengharum Ruangan Otomatis	27.600.000,00	0,00	25.381.200,00	25.381.200,00	(2.218.800,00)
5.2.3.28.22	Belanja Modal Pengadaan Rak Besi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.28.23	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	217.974.200,00	0,00	216.465.400,00	216.465.400,00	(1.508.800,00)
5.2.3.28.24	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.526.528.825,00	0,00	1.492.542.220,00	1.492.542.220,00	(33.986.605,00)
5.2.3.28.25	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	20.000.000,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	(400.000,00)
5.2.3.28.27	Belanja modal Pengadaan rden Belanja	260.278.000,00	0,00	257.878.000,00	257.878.000,00	(2.400.000,00)
5.2.3.28.28	modal Pengadaan Karpet Belanja	298.977.000,00	0,00	298.102.000,00	298.102.000,00	(875.000,00)
5.2.3.28.29	modal Pengadaan Dispenser Belanja	174.484.700,00	0,00	168.031.700,00	168.031.700,00	(6.453.000,00)
5.2.3.28.30	modal Pengadaan Rice Cooker Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.28.31	modal Pengadaan Tabung Gas	1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00	0,00
5.2.3.29	Belanja modal Pengadaan Komputer	11.209.327.655,00	0,00	10.488.505.047,00	10.488.505.047,00	(720.822.608,00)
5.2.3.29.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	345.315.900,00	0,00	330.200.000,00	330.200.000,00	(15.115.900,00)
5.2.3.29.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	4.035.296.780,00	0,00	3.674.984.965,00	3.674.984.965,00	(360.311.815,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.29.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	3.296.558.375,00	0,00	3.206.980.777,00	3.206.980.777,00	(89.577.598,00)
5.2.3.29.04	Belanja modal Pengadaan printer	1.728.047.200,00	0,00	1.658.683.100,00	1.658.683.100,00	(69.364.100,00)
5.2.3.29.05	Belanja modal Pengadaan scanner	92.070.000,00	0,00	91.126.000,00	91.126.000,00	(944.000,00)
5.2.3.29.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.29.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	145.538.600,00	0,00	132.936.998,00	132.936.998,00	(12.601.602,00)
5.2.3.29.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	582.296.100,00	0,00	557.097.760,00	557.097.760,00	(25.198.340,00)
5.2.3.29.10	Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi dan Jaringan Komputer	984.204.700,00	0,00	836.495.447,00	836.495.447,00	(147.709.253,00)
5.2.3.30	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/mobileur	6.766.581.400,00	0,00	6.569.271.550,00	6.569.271.550,00	(197.309.850,00)
5.2.3.30.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	1.427.805.200,00	0,00	1.335.019.865,00	1.335.019.865,00	(92.785.335,00)
5.2.3.30.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	287.357.400,00	0,00	286.373.400,00	286.373.400,00	(984.000,00)
5.2.3.30.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	1.169.031.000,00	0,00	1.129.211.325,00	1.129.211.325,00	(39.819.675,00)
5.2.3.30.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	220.407.400,00	0,00	219.768.000,00	219.768.000,00	(639.400,00)
5.2.3.30.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	117.050.000,00	0,00	112.950.000,00	112.950.000,00	(4.100.000,00)
5.2.3.30.10	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	269.192.000,00	0,00	268.504.000,00	268.504.000,00	(688.000,00)
5.2.3.30.13	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	341.785.300,00	0,00	320.096.800,00	320.096.800,00	(21.688.500,00)
5.2.3.30.14	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Mess	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.30.16	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Rumah Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.30.17	Belanja Modal Pengadaan Meja Resepsionis	268.440.000,00	0,00	240.750.000,00	240.750.000,00	(27.690.000,00)
5.2.3.30.18	Belanja Modal Pengadaan Meubelair Sekolah	1.750.000.000,00	0,00	1.742.650.560,00	1.742.650.560,00	(7.349.440,00)
5.2.3.30.19	Belanja Modal Pengadaan Sofa	628.217.100,00	0,00	626.772.600,00	626.772.600,00	(1.444.500,00)
5.2.3.30.20	Belanja Modal Pengadaan Kursi Teras	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.3.30.21	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	158.800.000,00	0,00	158.800.000,00	158.800.000,00	0,00
5.2.3.30.23	Belanja Modal Pengadaan Lemari	98.496.000,00	0,00	98.375.000,00	98.375.000,00	(121.000,00)
5.2.3.30.26	Belanja Modal Pengadaan Kunci Pintu Elektrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.31	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	2.712.180.545,00	0,00	2.517.154.554,00	2.517.154.554,00	(195.025.991,00)
5.2.3.31.01	Belanja modal Pengadaan kamera Belanja	749.935.050,00	0,00	713.738.200,00	713.738.200,00	(36.196.850,00)
5.2.3.31.02	modal Pengadaan handycam Belanja	2.262.520,00	0,00	0,00	0,00	(2.262.520,00)
5.2.3.31.03	modal Pengadaan proyektor Belanja Modal	688.130.875,00	0,00	674.949.474,00	674.949.474,00	(13.181.401,00)
5.2.3.31.04	Pengadaan Layar Proyektor Belanja Modal	85.237.600,00	0,00	74.164.000,00	74.164.000,00	(11.073.600,00)
5.2.3.31.05	Pengadaan Sound Sistem Belanja Modal	519.460.000,00	0,00	429.767.000,00	429.767.000,00	(89.693.000,00)
5.2.3.31.06	Pengadaan Wireless	22.416.500,00	0,00	19.959.000,00	19.959.000,00	(2.457.500,00)
5.2.3.31.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	644.738.000,00	0,00	604.576.880,00	604.576.880,00	(40.161.120,00)
5.2.3.32	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	461.708.000,00	0,00	402.770.800,00	402.770.800,00	(58.937.200,00)

5.2.3.32.01	Belanja modal Pengadaan telepon	99.668.000,00	0,00	50.215.000,00	50.215.000,00	(49.453.000,00)
5.2.3.32.02	Belanja modal Pengadaan faximili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.32.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	56.548.000,00	0,00	56.140.000,00	56.140.000,00	(408.000,00)
5.2.3.32.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam	11.440.000,00	0,00	11.050.000,00	11.050.000,00	(390.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 17 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.32.10	Belanja Modal Pengadaan Circuit Close Television (CCTV)	280.000.000,00	0,00	271.313.800,00	271.313.800,00	(8.686.200,00)
5.2.3.32.16	Belanja Modal Pengadaan Handy Talkie	14.052.000,00	0,00	14.052.000,00	14.052.000,00	0,00
5.2.3.34	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	27.935.721.973,00	0,00	37.707.636.561,00	37.707.636.561,00	9.771.914.588,00
5.2.3.34.01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	17.571.029.973,00	0,00	28.889.849.561,00	28.889.849.561,00	11.318.819.588,00
5.2.3.34.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T	2.167.000.000,00	0,00	2.155.000.000,00	2.155.000.000,00	(12.000.000,00)
5.2.3.34.10	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	7.797.494.500,00	0,00	6.657.589.500,00	6.657.589.500,00	(1.139.905.000,00)
5.2.3.34.14	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh	5.197.500,00	0,00	5.197.500,00	5.197.500,00	0,00
5.2.3.34.18	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	395.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(395.000.000,00)
5.2.3.35	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	18.947.475.848,00	0,00	5.430.608.059,00	5.430.608.059,00	(13.516.867.789,00)
5.2.3.35.01	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	18.937.355.848,00	0,00	5.421.808.059,00	5.421.808.059,00	(13.515.547.789,00)
5.2.3.35.02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	10.120.000,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	(1.320.000,00)
5.2.3.36	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	4.908.694.600,00	0,00	4.655.977.600,00	4.655.977.600,00	(252.717.000,00)
5.2.3.36.12	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum	4.805.694.600,00	0,00	4.552.977.600,00	4.552.977.600,00	(252.717.000,00)
5.2.3.36.46	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.36.64	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00
5.2.3.37	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	93.006.390.000,00	0,00	87.041.073.723,00	87.041.073.723,00	(5.965.316.277,00)
5.2.3.37.13	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	93.006.390.000,00	0,00	87.041.073.723,00	87.041.073.723,00	(5.965.316.277,00)
5.2.3.42	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.42.01	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.42.04	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.48	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	89.050.800,00	0,00	89.047.910,00	89.047.910,00	(2.890,00)
5.2.3.48.01	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	59.106.000,00	0,00	59.106.000,00	59.106.000,00	0,00
5.2.3.48.02	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan	27.994.800,00	0,00	27.991.910,00	27.991.910,00	(2.890,00)
5.2.3.48.03	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.3.49	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	189.547.901.168,00	0,00	181.785.830.816,89	181.785.830.816,89	(7.762.070.351,11)

5.2.3.49.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	47.409.148.760,00	0,00	43.758.397.424,00	43.758.397.424,00	(3.650.751.336,00)
5.2.3.49.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	129.063.650,00	0,00	127.706.863,00	127.706.863,00	(1.356.787,00)
5.2.3.49.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	32.305.220.808,00	0,00	28.471.601.202,89	28.471.601.202,89	(3.833.619.605,11)
5.2.3.49.08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	364.000.000,00	0,00	363.601.000,00	363.601.000,00	(399.000,00)
5.2.3.49.09	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.49.10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	99.932.454.150,00	0,00	99.932.454.150,00	99.932.454.150,00	0,00
5.2.3.49.11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	5.475.000.000,00	0,00	5.245.018.450,00	5.245.018.450,00	(229.981.550,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 18 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.49.12	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	330.162.500,00	0,00	317.977.500,00	317.977.500,00	(12.185.000,00)
5.2.3.49.13	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	8.500.000,00	0,00	8.499.000,00	8.499.000,00	(1.000,00)
5.2.3.49.14	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Parkir/Pool/Taman	126.861.300,00	0,00	126.582.644,00	126.582.644,00	(278.656,00)
5.2.3.49.18	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	7.500.000,00	0,00	7.485.824,00	7.485.824,00	(14.176,00)
5.2.3.49.21	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.49.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.416.840.000,00	0,00	3.383.674.138,00	3.383.674.138,00	(33.165.862,00)
5.2.3.49.29	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pagar Gedung	43.150.000,00	0,00	42.832.621,00	42.832.621,00	(317.379,00)
5.2.3.50	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.50.04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.50.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.52	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.52.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.57	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.57.01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.58	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	29.758.000,00	0,00	29.758.000,00	29.758.000,00	0,00
5.2.3.58.02	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	29.758.000,00	0,00	29.758.000,00	29.758.000,00	0,00
5.2.3.60	Belanja modal Pengadaan Jalan	258.573.372.724,10	0,00	223.197.450.776,00	223.197.450.776,00	(35.375.921.948,10)
5.2.3.60.02	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi	255.757.142.280,10	0,00	222.879.944.335,00	222.879.944.335,00	(32.877.197.945,10)
5.2.3.60.05	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	2.714.642.444,00	0,00	216.364.441,00	216.364.441,00	(2.498.278.003,00)
5.2.3.60.13	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Jalan	101.588.000,00	0,00	101.142.000,00	101.142.000,00	(446.000,00)
5.2.3.61	Belanja modal Pengadaan Jembatan	8.261.797.250,00	0,00	7.120.608.180,00	7.120.608.180,00	(1.141.189.070,00)

5.2.3.61.02	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi	8.257.200.000,00	0,00	7.116.010.930,00	7.116.010.930,00	(1.141.189.070,00)
5.2.3.61.05	Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus	4.597.250,00	0,00	4.597.250,00	4.597.250,00	0,00
5.2.3.62	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	17.980.000.000,00	0,00	8.662.699.900,00	8.662.699.900,00	(9.317.300.100,00)
5.2.3.62.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.62.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	17.892.000.000,00	0,00	8.584.874.900,00	8.584.874.900,00	(9.307.125.100,00)
5.2.3.62.05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.62.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	88.000.000,00	0,00	77.825.000,00	77.825.000,00	(10.175.000,00)
5.2.3.65	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.000.000,00	0,00	9.984.098,00	9.984.098,00	(15.902,00)
5.2.3.65.06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai	10.000.000,00	0,00	9.984.098,00	9.984.098,00	(15.902,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 19 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.66	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	200.000.000,00	0,00	189.905.000,00	189.905.000,00	(10.095.000,00)
5.2.3.66.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	200.000.000,00	0,00	189.905.000,00	189.905.000,00	(10.095.000,00)
5.2.3.67	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	2.700.021.100,00	0,00	2.103.483.300,00	2.103.483.300,00	(596.537.800,00)
5.2.3.67.02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	700.000.000,00	0,00	397.500.000,00	397.500.000,00	(302.500.000,00)
5.2.3.67.03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih	2.000.021.100,00	0,00	1.705.983.300,00	1.705.983.300,00	(294.037.800,00)
5.2.3.68	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	218.050.000,00	0,00	202.454.378,00	202.454.378,00	(15.595.622,00)
5.2.3.68.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor	218.050.000,00	0,00	202.454.378,00	202.454.378,00	(15.595.622,00)
5.2.3.69	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.69.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.70	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	91.477.500,00	0,00	87.623.000,00	87.623.000,00	(3.854.500,00)
5.2.3.70.03	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam	75.000.000,00	0,00	71.145.500,00	71.145.500,00	(3.854.500,00)
5.2.3.70.05	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	16.477.500,00	0,00	16.477.500,00	16.477.500,00	0,00
5.2.3.71	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.71.01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.74	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.74.02	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.77	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas	200.000.000,00	0,00	196.207.000,00	196.207.000,00	(3.793.000,00)
5.2.3.77.02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas	200.000.000,00	0,00	196.207.000,00	196.207.000,00	(3.793.000,00)



5.2.3.79	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.79.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.80	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	340.900.000,00	0,00	335.784.500,00	335.784.500,00	(5.115.500,00)
5.2.3.80.01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi	169.900.000,00	0,00	169.778.000,00	169.778.000,00	(122.000,00)
5.2.3.80.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi	171.000.000,00	0,00	166.006.500,00	166.006.500,00	(4.993.500,00)
5.2.3.83	Belanja modal Pengadaan Buku	773.100.000,00	0,00	771.946.000,00	771.946.000,00	(1.154.000,00)
5.2.3.83.01	Belanja modal Pengadaan Umum	285.100.000,00	0,00	284.652.000,00	284.652.000,00	(448.000,00)
5.2.3.83.10	Belanja modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	488.000.000,00	0,00	487.294.000,00	487.294.000,00	(706.000,00)
5.2.3.86	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	172.000.000,00	0,00	171.857.700,00	171.857.700,00	(142.300,00)
5.2.3.86.03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	172.000.000,00	0,00	171.857.700,00	171.857.700,00	(142.300,00)
5.2.3.86.07	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.87	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	8.639.200,00	0,00	8.582.100,00	8.582.100,00	(57.100,00)
5.2.3.87.04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	8.639.200,00	0,00	8.582.100,00	8.582.100,00	(57.100,00)
5.2.3.88	Belanja modal Pengadaan Hewan	223.000.000,00	0,00	212.900.000,00	212.900.000,00	(10.100.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMBUKUAN PERIODE

Halaman 20 dari 22

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.88.01	Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak	223.000.000,00	0,00	212.900.000,00	212.900.000,00	(10.100.000,00)
5.2.3.89	Belanja modal Pengadaan Tanaman	75.000.000,00	0,00	73.690.000,00	73.690.000,00	(1.310.000,00)
5.2.3.89.02	Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.89.04	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias	75.000.000,00	0,00	73.690.000,00	73.690.000,00	(1.310.000,00)
5.2.3.90	Belanja Modal Dana BOS	3.776.400.000,00	0,00	3.776.400.000,00	3.776.400.000,00	0,00
5.2.3.90.01	Belanja Modal Dana BOS	3.776.400.000,00	0,00	3.776.400.000,00	3.776.400.000,00	0,00
5.2.3.91	Belanja Modal Konsultansi	38.842.498.000,00	0,00	38.025.795.720,00	38.025.795.720,00	(816.702.280,00)
5.2.3.91.01	Belanja Modal Konsultansi Perencanaan	23.154.350.400,00	0,00	22.891.668.170,00	22.891.668.170,00	(262.682.230,00)
5.2.3.91.02	Belanja Modal Konsultansi Pengawasan	15.688.147.600,00	0,00	15.134.127.550,00	15.134.127.550,00	(554.020.050,00)
5.2.3.91.03	Belanja Modal Konsultansi Konstruksi dalam Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.92	Belanja Modal BLUD	17.041.347.500,00	0,00	16.306.793.781,00	16.306.793.781,00	(734.553.719,00)
5.2.3.92.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Moeloek	15.334.513.000,00	0,00	14.805.582.876,00	14.805.582.876,00	(528.930.124,00)
5.2.3.92.05	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit Jiwa	1.706.834.500,00	0,00	1.501.210.905,00	1.501.210.905,00	(205.623.595,00)
5.2.3.93	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	66.702.190.476,00	0,00	62.576.009.161,00	62.576.009.161,00	(4.126.181.315,00)
5.2.3.93.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	66.702.190.476,00	0,00	62.576.009.161,00	62.576.009.161,00	(4.126.181.315,00)
5.2.3.94		42.784.660.310,00	0,00	25.616.623.245,00	25.616.623.245,00	(17.168.037.065,00)

5.2.3.94.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		42.784.660.310,00	0,00	25.616.623.245,00	25.616.623.245,00	(17.168.037.065,00)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS		(136.952.388.142,31)	0,00	53.346.040.605,08	53.346.040.605,08	190.298.428.747,39
		SURPLUS / DEFISIT					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		336.132.388.142,31	0,00	336.132.388.142,31	336.132.388.142,31	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya		336.132.388.142,31	0,00	336.132.388.142,31	336.132.388.142,31	0,00
6.1.1.01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya		336.132.388.142,31	0,00	336.132.388.142,31	336.132.388.142,31	0,00
6.1.1.01.01	Penggunaan SILPA tahun sebelumnya		199.180.000.000,00	0,00	197.176.332.704,00	197.176.332.704,00	(2.003.667.296,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		58.000.000.000,00	0,00	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		58.000.000.000,00	0,00	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000.000,00)
6.2.2.02.01	PT Lampung Jasa Utama (LJU)		56.000.000.000,00	0,00	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00	0,00
6.2.2.02.02	PT Bank Lampung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.02.04	PT JAMKRIDA		141.180.000.000,00	0,00	141.176.332.704,00	141.176.332.704,00	(3.667.296,00)
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang		141.180.000.000,00	0,00	141.176.332.704,00	141.176.332.704,00	(3.667.296,00)
6.2.3.04	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		141.180.000.000,00	0,00	141.176.332.704,00	141.176.332.704,00	(3.667.296,00)
6.2.3.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank		136.952.388.142,31	0,00	138.956.055.438,31	138.956.055.438,31	2.003.667.296,00
		PEMBIAYAAN NETTO					
		SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	192.302.096.043,39	192.302.096.043,39	192.302.096.043,39



--

BAB I

CAPAIAN KINERJA MAKRO

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. DASAR HUKUM

a. Pembentukan Provinsi Lampung

Secara Yuridis Formal Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tanggal 18 Maret 1964, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan sebagai Keresidenan Lampung. Pada saat pembentukannya Ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Praja Tanjungkarang – Telukbetung. Kota Praja Tanjungkarang – Telukbetung berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah menjadi Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tanggal 17 Juni 1983, nama Kotamadya Tanjungkarang – Telukbetung diganti menjadi Kotamadya Bandar Lampung.

Tabel 1. Dasar Hukum Pembentukan Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

No.	KabKota	Dasar Hukum Pembentukan
1.	Lampung Selatan	Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964)
2.	Lampung Tengah	Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964)
3.	Lampung Utara	Perppu No.3/1964 (menjadi UU No.14 / 1964)
4.	Lampung Barat	UU No.6 / 1991 tanggal 16 Agustus 1991
5.	Tulang Bawang	UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997
6.	Tanggamus	UU No.2 / 1997 tanggal 3 Januari 1997
7.	Lampung Timur	UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999
8.	Way Kanan	UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999
9.	Bandar Lampung	UU No.14/1964 (PP No.24/83 tgl 17 Juni 1983)
10.	Metro	UU No.12 / 1999 tanggal 5 Mei 1999
11.	Pesawaran	UU No.33 / 2007 tanggal 10 Agustus 2007
12.	Pringsewu	UU No.48 / 2008 tanggal 6 November 2008
13.	Mesuji	UU No.49 / 2008 tanggal 6 November 2008
14.	Tulang Bawang Barat	UU No.50 / 2008 tanggal 6 November 2008
15.	Pesisir Barat	UU No.22 / 2012 tanggal 25 Oktober 2012

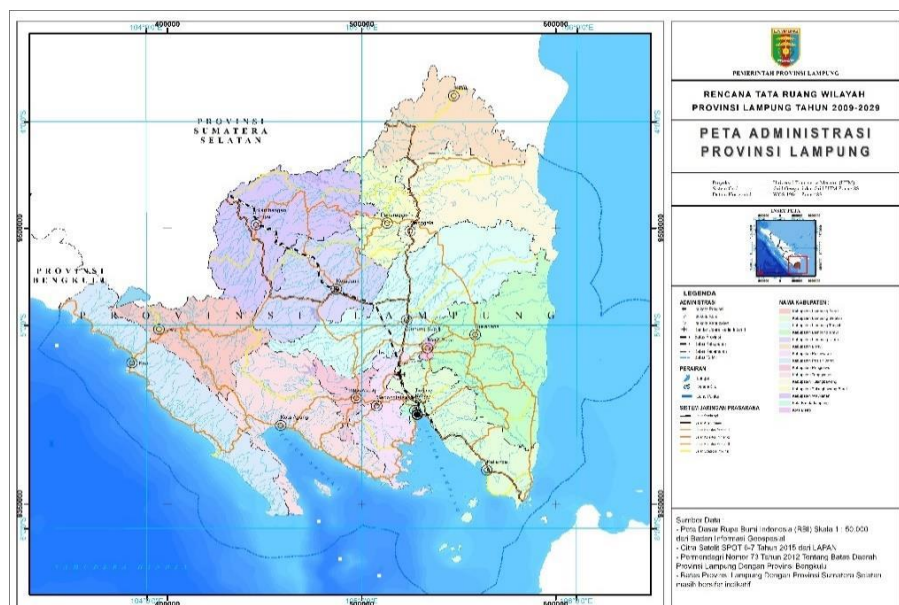
Sumber : Biro Hukum Setdaprov Lampung

b. Data Geografis

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan $3^{\circ}45'$ sampai $6^{\circ}45'$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'$ sampai $105^{\circ}50'$ Bujur Timur. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas $35.288,35 \text{ km}^2$ termasuk 188 pulau disekitarnya. Provinsi Lampung juga memiliki wilayah lautan sepanjang 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas dengan luas perairan diperkirakan lebih kurang 24.820 km^2 dan panjang garis pantai lebih kurang 1.105 km. Garis pantai perairan Lampung secara garis besar terdiri atas empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semaka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah:

- Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah utara
- Selat Sunda di sebelah selatan
- Laut Jawa di sebelah timur
- Samudera Indonesia di sebelah barat

Gambar 1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung



Sumber: RKPD Provinsi Lampung 2020

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.

8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

Sementara itu, secara luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah Kabupaten terluas di Provinsi Lampung dan juga memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa terbanyak. Untuk wilayah terkecil dimiliki oleh Kota Metro seiring kecilnya luas wilayah, Kota Metro pun memiliki jumlah Kecamatan dan Kelurahan tersedikit di Provinsi Lampung.

Tabel 2. Data Wilayah Administrasi Provinsi Lampung

No.	Kab/Kota	Σ Kec	Σ Desa/Kel	Σ Luas (Ha)
1.	Lampung Barat	15	136	212.603,25
2.	Tanggamus	20	302	290.270,82
3.	Lampung Selatan	17	260	221.952,68
4.	Lampung Timur	24	264	386.527,17
5.	Lampung Tengah	28	314	454.400,21
6.	Lampung Utara	23	247	252.954,22
7.	Way Kanan	14	227	366.070,58
8.	Tulang Bawang	15	151	313.074,28
9.	Pesawaran	11	144	127.911,40
10.	Pringsewu	9	131	61.447,57
11.	Mesuji	7	105	220.577,13
12.	Tulang Bawang Barat	9	96	124.759,03
13.	Pesisir Barat	11	118	304.613,37
14.	Bandar Lampung	20	126	18.325,68
15.	Metro	5	22	7.315,38
Provinsi Lampung		228	2.643	3.362.802,75

Sumber : RKPD Provinsi Lampung 2020

c. Jumlah Penduduk

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2020 (s.d 30 JUNI 2020)
1	Lampung selatan	1,048,799
2	Lampung tengah	1,483,856
3	Lampung utara	625,025
4	Lampung barat	306,890
5	Tulang bawang	427,004
6	Tanggamus	650,900
7	Lampung timur	1,129,045
8	Way kanan	479,199
9	Pesawaran	474,200
10	Pringsewu	406,017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK SEMESTER I TAHUN 2020 (s.d 30 JUNI 2020)
11	Mesuji	231,064
12	Tulang bawang barat	278,430
13	Pesisir barat	161,509
14	Bandar lampung	1,189,297
15	Metro	171,531
JUMLAH		9,062,766

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung (Laporan Perkembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi Lampung Bulan November 2020)

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi ke dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
2. KabupatenTanggamus dengan ibukota Kota Agung.
3. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
4. Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana.
5. Kabupaten Lampung Utara dengan ibu kota Kotabumi.
6. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibu kota Gunung Sugih.
7. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
8. Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan.
10. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.
11. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Wiralaga Mulya.
12. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
13. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.
14. Kota Bandar Lampung.
15. Kota Metro.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah

1.e.1. Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung)
(1)	(2)
I.	SEKRETARIAT DAERAH
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	b. Biro Kesejahteraan Rakyat
	c. Biro Hukum
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung)
(1)	(2)
	a. Biro Perekonomian
	b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	c. Biro Administrasi Pembangunan
3.	Asisten Administrasi Umum
	a. Biro Organisasi
	b. Biro Umum
	c. Biro Administrasi Pimpinan
II.	STAF AHLI GUBERNUR
1.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3.	Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM
III.	SEKRETARIAT DPRD
IV.	INSPEKTORAT
V.	DINAS DAERAH
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
4.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Dinas Sosial
8.	Dinas Tenaga Kerja
9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Dinas Lingkungan Hidup
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi
13.	Dinas Perhubungan
14.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Dinas Kelautan dan Perikanan
20.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
21.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
22.	Dinas Perkebunan
23.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
24.	Dinas Kehutanan
25.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
26.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
VI.	BADAN DAERAH
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH (Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung)
(1)	(2)
3.	Badan Pendapatan Daerah
4.	Badan Kepegawaian Daerah
5.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta
VII.	Cabang Dinas : 14
VIII.	UPTD : 92
IX.	Satuan Pendidikan : 359
VII.	Rumah Sakit Daerah (Pergub. Nomor 11 Tahun 2020)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek
2.	Rumah Sakit Jiwa Daerah
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

a) Nomenklatur Cabang Dinas

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kelas A;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kelas A;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kelas A;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kelas A;
 - e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kelas A;
 - f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kelas A; dan
 - g. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kelas A.
- 2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I Kelas A;
 - b. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II Kelas A;
 - c. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III Kelas A;
 - d. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV Kelas A;

- e. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah V Kelas A;
- f. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VI Kelas A; dan
- g. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah VII Kelas A.

b) Nomenklatur UPTD dan Satuan Pendidikan :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
 - b. UPTD Museum Negeri Lampung Kelas A;
 - c. UPTD Museum Ketransmigrasian Kelas A;
 - d. UPTD Taman Budaya Kelas A; dan
 - e. UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari:
 - 1. SMAN 1 Bandar Lampung;
 - 2. SMAN 2 Bandar Lampung;
 - 3. SMAN 3 Bandar Lampung;
 - 4. SMAN 4 Bandar Lampung;
 - 5. SMAN 5 Bandar Lampung;
 - 6. SMAN 6 Bandar Lampung;
 - 7. SMAN 7 Bandar Lampung;
 - 8. SMAN 8 Bandar Lampung;
 - 9. SMAN 9 Bandar Lampung;
 - 10. SMAN 10 Bandar Lampung;
 - 11. SMAN 11 Bandar Lampung;
 - 12. SMAN 12 Bandar Lampung;
 - 13. SMAN 13 Bandar Lampung;
 - 14. SMAN 14 Bandar Lampung;
 - 15. SMAN 15 Bandar Lampung;
 - 16. SMAN 16 Bandar Lampung;
 - 17. SMAN 17 Bandar Lampung;
 - 18. SMKN 1 Bandar Lampung;
 - 19. SMKN 2 Bandar Lampung;
 - 20. SMKN 3 Bandar Lampung;
 - 21. SMKN 4 Bandar Lampung;
 - 22. SMKN 5 Bandar Lampung;
 - 23. SMKN 6 Bandar Lampung;

24. SMKN 7 Bandar Lampung;
25. SMKN 8 Bandar Lampung;
26. SMKN 9 Bandar Lampung;
27. SLB Bina Insani Bandar Lampung;
28. SLB Dharma Bakti Pertiwi Bandar Lampung;
29. SLB PKK Lampung;
30. SMAN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
31. SMAN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
32. SMAN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
33. SMAN 2 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
34. SMAN 1 Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
35. SMAN 1 Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
36. SMAN 1 Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
37. SMAN 1 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
38. SMAN 1 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
39. SMAN 1 Palas Kabupaten Lampung Selatan;
40. SMAN 1 Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
41. SMAN 1 Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
42. SMAN 1 Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
43. SMAN 1 Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
44. SMAN 1 Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
45. SMAN 1 Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan;
46. SMKN 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
47. SMKN 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
48. SMKN 1 Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
49. SMKN 1 Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
50. SMKN 1 Ketapang Kabupaten Lampung Selatan;
51. SMKN 1 Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
52. SMKN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan;
53. SMKN 1 Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
54. SMKN Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
55. SMKN Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
56. SMKN I Way Panji Kabupaten Lampung Selatan;
57. SMAN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;

58. SMAN 2 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
59. SMAN 1 Kedondong Kabupaten Pesawaran;
60. SMAN 2 Kedondong Kabupaten Pesawaran;
61. SMAN 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
62. SMAN 2 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
63. SMAN 1 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
64. SMAN 2 Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
65. SMAN 1 Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran;
66. SMAN 2 Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran;
67. SMAN 1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
68. SMAN 2 Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
69. SMAN 1 Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
70. SMAN 1 Way Lima Kabupaten Pesawaran;
71. SMKN 1 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
72. SMKN 1 Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
73. SMKN 1 Tegineneng Kabupaten Pesawaran;
74. SMKN 1 Ketibung Kabupaten Pesawaran;
75. SMKN Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
76. SMAN 1 Metro Kota Metro;
77. SMAN 2 Metro Kota Metro;
78. SMAN 3 Metro Kota Metro;
79. SMAN 4 Metro Kota Metro;
80. SMAN 5 Metro Kota Metro;
81. SMAN 6 Metro Kota Metro;
82. SMAN Olah Raga Metro Kota Metro;
83. SMKN 1 Metro Kota Metro;
84. SMKN 2 Metro Kota Metro;
85. SMKN 3 Metro Kota Metro;
86. SMKN 4 Metro Kota Metro;
87. SMKN 5 Metro Kota Metro;
88. SMK Gajah Tunggal Metro Kota Metro;
89. SLB Negeri Metro Kota Metro;
90. SLB Wiyata Dharma Metro Kota Metro;
91. SMAN 1 Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah;

92. SMAN 1 Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
93. SMAN 1 Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
94. SMAN 1 Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
95. SMAN 1 Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah;
96. SMAN 1 Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
97. SMAN 1 Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
98. SMAN 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
99. SMAN 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah;
100. SMAN 1 Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
101. SMAN 1 Punggur Kabupaten Lampung Tengah;
102. SMAN 1 Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
103. SMAN 1 Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
104. SMAN 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
105. SMAN 1 Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah;
106. SMAN 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
107. SMAN 1 Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
108. SMAN 1 Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
109. SMAN 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
110. SMAN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
111. SMAN 1 Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
112. SMAN 1 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
113. SMAN 1 Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
114. SMAN 1 Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
115. SMKN 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
116. SMKN 2 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
117. SMKN 3 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
118. SMKN 1 Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
119. SMKN 1 Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
120. SMKN 1 Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
121. SMKN 1 Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
122. SMKN 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
123. SMKN 1 Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
124. SMK Unggul Terpadu Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
125. SLB Negeri Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

- 126.SMAN 1 Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
- 127.SMAN 2 Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 128.SMAN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- 129.SMAN 1 Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur;
- 130.SMAN 1 Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- 131.SMAN 1 Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- 132.SMAN 1 Jabung Kabupaten Lampung Timur;
- 133.SMAN 1 Kibang Kabupaten Lampung Timur;
- 134.SMAN 1 Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- 135.SMAN 1 Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur;
- 136.SMAN 1 Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur;
- 137.SMAN 1 Melinting Kabupaten Lampung Timur;
- 138.SMAN 1 Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur;
- 139.SMAN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- 140.SMAN 1 Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur;
- 141.SMAN 1 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- 142.SMAN 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 143.SMAN 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- 144.SMAN 1 Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
- 145.SMAN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- 146.SMAN 1 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- 147.SMKN 1 Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur;
- 148.SMKN 1 Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur;
- 149.SMKN 1 Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 150.SMKN 1 Pekalongan Kabupaten Lampung Timur;
- 151.SMKN 1 Raman Utara Kabupaten Lampung Timur;
- 152.SMKN 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- 153.SMKN 1 Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- 154.SMKN 1 Trimurjo Kabupaten Lampung Timur;
- 155.SMKN 1 Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur;
- 156.SMKN 1 Braja Selebih Kabupaten Lampung Timur;
- 157.SMKN 1 Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- 158.SMKN Praja Utama Kabupaten Lampung Timur;
- 159.SLB Negeri Lampung Timur;

- 160.SMAN 1 Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- 161.SMAN 2 Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- 162.SMAN 1 Ulubelu Kabupaten Tanggamus;
- 163.SMAN 2 Ulubelu Kabupaten Tanggamus;
- 164.SMAN 1 Air Nainingan Kabupaten Tanggamus;
- 165.SMAN 1 Bulok Kabupaten Tanggamus;
- 166.SMAN 1 Cukuhbalak Kabupaten Tanggamus;
- 167.SMAN 1 Gunung Alip Kabupaten Tanggamus;
- 168.SMAN 1 Kelumbayan Kabupaten Tanggamus;
- 169.SMAN 1 Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus;
- 170.SMAN 1 Limau Kabupaten Tanggamus;
- 171.SMAN 1 Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus;
- 172.SMAN 1 Semaka Kabupaten Tanggamus;
- 173.SMAN 1 Sumberejo Kabupaten Tanggamus;
- 174.SMAN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- 175.SMAN 1 Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
- 176.SMAN 1 Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus;
- 177.SMKN 1 Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
- 178.SMKN 1 Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;
- 179.SMKN 1 Pugung Kabupaten Tanggamus;
- 180.SMKN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- 181.SMKN 1 Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- 182.SMAN 1 Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- 183.SMAN 2 Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- 184.SMAN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- 185.SMAN 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- 186.SMAN 1 Adiluwih Kabupaten Pringsewu;
- 187.SMAN 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu;
- 188.SMAN 1 Banyumas Kabupaten Pringsewu;
- 189.SMAN 1 Pagelaran Kabupaten Pringsewu;
- 190.SMAN 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- 191.SMAN 1 Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 192.SMKN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- 193.SMKN Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu;

- 194.SMKN Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
- 195.SLB Negeri Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- 196.SMAN 1 Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- 197.SMAN 2 Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- 198.SMAN 1 Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;
- 199.SMAN 1 Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;
- 200.SMAN 1 Lemong Kabupaten Pesisir Barat;
- 201.SMAN 1 Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- 202.SMAN 1 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- 203.SMAN 1 Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;
- 204.SMAN 1 Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat;
- 205.SMKN 1 Ngambur Kabupaten Pesisir Barat;
- 206.SMKN 1 Krui Kabupaten Pesisir Barat;
- 207.SMAN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 208.SMAN 2 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 209.SMAN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 210.SMAN 4 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- 211.SMAN 1 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- 212.SMAN 2 Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara;
- 213.SMAN 1 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- 214.SMAN 2 Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara;
- 215.SMAN 1 Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara;
- 216.SMAN 1 Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara;
- 217.SMAN 1 Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara;
- 218.SMAN 1 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- 219.SMAN 1 Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- 220.SMAN 1 Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara;
- 221.SMAN 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
- 222.SMAN 1 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- 223.SMAN 1 Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- 224.SMAN 1 Abung Barat Kabupaten Lampung Utara;
- 225.SMAN 1 Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara;
- 226.SMAN 1 Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara;
- 227.SMAN 1 Bhakti Mulya Kabupaten Lampung Utara;
- 228.SMAN 1 Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;

229.SMAN 1 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
230.SMKN 1 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
231.SMKN 2 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
232.SMKN 3 Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
233.SMKN 1 Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
234.SMKN 1 Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
235.SMKN 1 Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara;
236.SMKN 1 Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;
237.SMKN 1 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
238.SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
239.SMAN 2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
240.SMAN 3 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
241.SMAN 1 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
242.SMAN 2 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
243.SMAN 1 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
244.SMAN 2 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
245.SMAN 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
246.SMAN 2 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
247.SMAN 1 Kasui Kabupaten Way Kanan;
248.SMAN 2 Kasui Kabupaten Way Kanan;
249.SMAN 1 Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
250.SMAN 2 Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
251.SMAN 1 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
252.SMAN 2 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
253.SMAN 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
254.SMAN 2 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
255.SMAN 1 Banjit Kabupaten Way Kanan;
256.SMAN 2 Banjit Kabupaten Way Kanan;
257.SMAN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan;
258.SMAN 1 Pakuon Ratu Kabupaten Way Kanan;
259.SMAN 1 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;
260.SMAN 2 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;
261.SMAN 1 Way Tuba Kabupaten Way Kanan;
262.SMAN 2 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan;
263.SMAN 1 Gedung Harapan Kabupaten Way Kanan;
264.SMKN 1 Banjit Kabupaten Way Kanan

- 265.SMKN 2 Banjit Kabupaten Way Kanan;
266.SMKN 1 Bahuga Kabupaten Way Kanan;
267.SMKN 1 Baradatu Kabupaten Way Kanan;
268.SMKN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
269.SMKN 1 Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan;
270.SMKN 1 Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
271.SMKN 1 Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;
272.SMKN 1 Negara Batin Kabupaten Way Kanan;
273.SMKN 1 Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;
274.SMKN 1 Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;
275.SMKN 1 Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
276.SLB Negeri Baradatu Kabupaten Way Kanan;
277.SMAN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
278.SMAN 2 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
279.SMKN 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
280.SMAN 2 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
281.SMAN 1 Air Hitam Kabupaten Lampung Barat;
282.SMAN 1 Batu Brak Kabupaten Lampung Barat;
283.SMAN 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat;
284.SMAN 1 Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat;
285.SMAN 1 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat;
286.SMAN 1 Sekincau Kabupaten Lampung Barat;
287.SMAN 1 Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat;
288.SMAN 1 Way Tenong Kabupaten Lampung Barat;
289.SMAN 1 Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat;
290.SMAN 1 Sukau Kabupaten Lampung Barat;
291.SMAN 1 Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat;
292.SMAN 1 Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
293.SMKN 1 Liwa Kabupaten Lampung Barat;
294.SMKN 1 Suoh Kabupaten Lampung Barat;
295.SMKN 1 Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat;
296.SMAN 1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
297.SMAN 2 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
298.SMAN 3 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
299.SMAN 1 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
300.SMAN 2 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;

- 301.SMAN 1 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- 302.SMAN 1 Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- 303.SMAN 1 Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 304.SMAN 1 Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang;
- 305.SMAN 1 Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang;
- 306.SMAN 1 Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 307.SMAN 1 Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 308.SMAN 1 Penawartama Kabupaten Tulang Bawang;
- 309.SMAN 1 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- 310.SMAN 1 Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
- 311.SMKN 1 Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang;
- 312.SMKN 1 Dente Teladas Kabupaten Tulang Bawang;
- 313.SMKN 1 Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang;
- 314.SMKN 1 Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- 315.SMKN 1 Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang;
- 316.SMKN 1 Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang;
- 317.SMKN 1 Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang;
- 318.SMKN 1 Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;
- 319.SLB Negeri Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang;
- 320.SMAN 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 321.SMAN 2 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 322.SMAN 3 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 323.SMAN 1 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 324.SMAN 2 Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 325.SMAN 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 326.SMAN 2 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 327.SMAN 3 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 328.SMAN 1 Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 329.SMAN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 330.SMAN 1 Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 331.SMAN 1 Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 332.SMAN 1 Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 333.SMAN 1 Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 334.SMA PGRI Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 335.SMKN 1 Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- 336.SMKN 1 Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

337.SMAN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji;
338.SMAN 2 Way Serdang Kabupaten Mesuji;
339.SMAN 1 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
340.SMAN 2 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
341.SMAN 1 Mesuji Lampung Kabupaten Mesuji;
342.SMAN 1 Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
343.SMAN 1 Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
344.SMAN 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
345.SMAN 1 Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji;
346.SMKN 1 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
347.SMKN 2 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
348.SMKN 1 Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
349.SMKN 1 Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji;
350.SMKN 1 Simpang Pematang Kabupaten Mesuji;
351.SMAN 1 Banjar Baru Kabupaten Mesuji;
352.SMKN 1 Banjar Margo Kabupaten Mesuji;
353.SMKN 1 Pagar Dewa Kabupaten Mesuji;
354.SMKN 1 Penawartama Kabupaten Mesuji;
355.SMKN 1 Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji;
356.SMKN 1 Kebun Tebu Kabupaten Mesuji;
357.SMKN 1 Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
358.SMKN 1 Way Serdang Kabupaten Mesuji; dan
359.SMK Pertanian Pembangunan Negeri Lampung.

- 2) Dinas Kesehatan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
 - c. UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A.
- 3) Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi, terdiri dari:
 - a. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Kelas A;
 - c. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas A;
 - d. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Kelas A;
 - f. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Kelas A; dan
 - g. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A.

- 4) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Kelas A.
- 5) Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kelas A;
 - b. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan Kelas A;
 - c. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kelas A;
 - d. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih Kelas A;
 - e. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Kelas A;
 - f. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kelas A; dan
 - g. UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Kelas A.
- 6) Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung Kelas A;
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda Kelas A;
 - c. UPTD Balai Latihan Kerja Metro Kelas A;
 - d. UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung Kelas A;
 - e. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Kelas A; dan
 - f. UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A.
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
8. Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.
9. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yaitu:
 - a. UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelas A;
 - a1. UPTD Terminal Kelas A; dan
 - a2. UPTD Kepelabuhan Kelas A;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Kelas A; dan
 - b. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kelas A.
11. Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu:

UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Kelas A.

12. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau Kelas A;
 - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai dan Teladas Kelas A; dan
 - e. UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung Kelas A.
13. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu:

UPTD Pengelolaan Kawasan Wisata Menara Siger, Kelas A.
14. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - c. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - d. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian, Kelas A;
 - e. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering Kelas A; dan
 - f. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Kelas A.
15. Dinas Perkebunan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Kelas A; dan
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk Kelas A.
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
 - b. UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai Kelas A;
 - c. UPTD Pembibitan Ternak Sapi Kelas A; dan
 - d. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Kelas A.
17. Dinas Kehutanan, yaitu:
 - a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Kelas A ;
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat Kelas A;
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa Kelas A;
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur Kelas A;

- e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua Kelas A;
 - f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya Kelas A;
 - g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan Kelas A;
 - h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Waya Kelas A;
 - h1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak Kelas A;
 - i. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Tegi Kelas A;
 - j. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara Kelas A;
 - k. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba Kelas A;
 - l. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran Kelas A;
 - m. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak Kelas A;
 - n. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Serampok Kelas A
 - n1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang Kelas A; dan
 - o. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Kelas A.
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Kelas A; dan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:
- UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kelas A.
20. Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kelas A;
 - c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Kelas A;
 - d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV Kelas A;
 - e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V Kelas A;
 - f. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI Kelas A;
 - g. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII Kelas A;
 - g1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIII Kelas A;
 - h. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII Kelas A;
 - i. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IX Kelas A;
 - i1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIV Kelas A;
 - j. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah X Kelas A;
 - k. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XI Kelas A;
 - l. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XV Kelas A; dan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XII Kelas A;

1.e.2. Pegawai Pemerintah

**Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Berdasarkan Perangkat Daerah & Jenis Kelamin
Keadaan s.d. Desember 2020**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JML
		L	P	
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	1	0	1
2	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	0	1
3	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0	0	0
4	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	0	0	0
5	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	19	13	32
6	BIRO HUKUM	24	25	49
7	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	21	28	49
8	BIRO PEREKONOMIAN	16	22	38
9	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	17	13	30
10	BIRO UMUM	86	49	135
11	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	36	17	53
12	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	35	29	64
13	BIRO ORGANISASI	18	19	37
14	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	1	0	1
15	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	0	0	0
16	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	1
17	SEKRETARIAT DPRD	76	58	134
18	INSPEKTORAT PROVINSI	89	59	148
Jumlah		441	332	773
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.566	4.753	8.319
2	DINAS KESEHATAN	130	253	383
3	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	233	102	335
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	317	92	409
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	151	25	176
6	DINAS SOSIAL	90	78	168
7	DINAS TENAGA KERJA	150	68	218
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19	53	72
9	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	67	46	113
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	49	32	81
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	20	19	39
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA DAN TRANSMIGRASI	42	35	77
13	DINAS PERHUBUNGAN	81	35	116
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	49	47	96
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	43	45	88
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	56	57	113
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	69	36	105
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	34	56	90

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JML
		L	P	
1	2	3	4	5
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	80	44	124
20	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	37	46	83
21	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA	199	165	364
22	DINAS PERKEBUNAN	56	72	128
23	DINAS KEHUTANAN	385	101	486
24	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	82	40	122
25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	76	62	138
26	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	47	17	64
Jumlah		6.128	6.379	12.507
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	63	53	116
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	68	81	149
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	259	160	419
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	50	47	97
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	48	42	90
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	27	39	66
7	BADAN PENGHUBUNG	44	30	74
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	34	12	46
9	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	46	14	60
Jumlah		639	478	1.117
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HI. ABDUL MOELOEK	374	654	1.028
2	RUMAH SAKIT JIWA	79	100	179
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA	7	8	15
4	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)	3	0	3
5	SEKRETARIAT BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2	0	2
Jumlah		465	762	1.227
Jumlah Seluruh		7.673	7.951	15.624

sumber data simplified.lampungprov.go.id

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup memberi harapan, hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan.

Namun demikian, Provinsi Lampung sebagai wilayah transit atau penyangga lintas pulau, sampai saat ini masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan yang tetap memerlukan penanganan yang lebih komprehensif, lintas sektor, lintas wilayah, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Lampung (berdasarkan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2020) meliputi permasalahan dan tantangan yang terkait dengan infrastruktur wilayah, kualitas SDM, pendapatan regional, daya dukung lingkungan, dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah, terangkum dalam uraian sebagai berikut:

a) Permasalahan Bidang Ekonomi

1. Selama 3 (tiga) tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Lampung belum bergerak pada arah pertumbuhan yang lebih progresif, dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi masih berada pada kisaran 5,0 – 5,25 persen;
2. Dari sisi permintaan, struktur ekonomi Provinsi Lampung masih mengandalkan konsumsi rumah tangga. Oleh karenanya diperlukan upayaupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat melalui kebijakan makro dan mikro ekonomi. Dari sisi penawaran (sektoral), data-data statistik beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor-sektor transportasi, komunikasi dan konstruksi yang melibatkan lebih sedikit tenaga kerja tumbuh meningkat dan menjadi *driven* pertumbuhan ekonomi. Sementara, sektor ekonomi yang dominan (pertanian dalam arti luas) yang melibatkan lebih banyak tenaga kerja justru cenderung mengalami penurunan kapasitas dan produktifitas. Dari uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa lemahnya produktifitas sektor ekonomi yang dominan (utamanya, pertanian dalam arti luas) dapat berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat secara umum dalam perekonomian.
3. Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas pada komoditas berbasis sumber daya alam, sehingga belum mampu memiliki daya saing maupun nilai tambah yang tinggi serta ketergantungan harga komoditas di pasar global;

4. Untuk meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi, diperlukan dukungan sumber-sumber pertumbuhan yang mengarah pada peningkatan investasi yang mampu memberi nilai tambah produk dan menyerap tenaga kerja, melalui dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai hingga pada tingkat pemerintah kabupaten/kota.
5. Tingkat pendapatan regional penduduk secara bruto masih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
6. Data-data inflasi daerah beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat harga yang terjaga dan mendukung perekonomian daerah. Oleh karenanya upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas inflasi perlu dilakukan secara berkelanjutan, yang akan berdampak positif bagi produsen maupun konsumen;
7. Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran.
8. Kualitas lembaga dan SDM koperasi belum optimal.

b) Permasalahan Infrastruktur Daerah

1. Lampung merupakan wilayah perlintasan antarprovinsi dan antarpulau, sehingga beban jalan menjadi lebih tinggi; namun kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian. Kondisi jalan mantap sampai dengan tahun 2017 sudah mencapai 77 persen, namun masih perlu terus ditingkatkan;
2. Kualitas infrastruktur dan prasarana terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih besar. Tersedianya investasi ataupun dukungan dana pemerintah yang lebih ekspansif masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengembangan fasilitas di sektor transportasi darat, laut, maupun udara;
3. Perkembangan jumlah pengguna listrik (masyarakat dan dunia usaha) tidak sebanding dengan kemampuan penyediaan daya listrik. Ketersediaan listrik yang belum memadai, memerlukan investasi dan pemanfaatan energi alternatif baik dalam skala besar, menengah dan mikro.

c) Bidang Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan

1. Persentase penduduk miskin masih pada kisaran 13% - 14%, lebih tinggi

dibanding rata-rata nasional;

2. Tingkat IPM masih lebih rendah di tingkat regional Sumatera maupun rata-rata nasional;
3. Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.
4. Perbaikan kualitas SDM perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas ekonominya melalui peningkatan keberdayaan dalam mengakses sumber daya dan hasil-hasil pembangunan.
5. Tingkat ketimpangan antar kelompok pendapatan (*gini ratio*) masih berada pada level “sedang” perlu diperbaiki menuju level yang lebih “rendah”.

d) Bidang Pertanian dan Kelautan

1. Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama dan produktivitasnya dalam perekonomian masih relatif rendah dan cenderung menurun;
2. Dalam rangka mendukung revitalisasi pembangunan sektor pertanian, memerlukan dukungan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi dan penataan kawasan/lahan pertanian berkelanjutan sebagai kendali terhadap alih fungsi lahan pertanian.
3. Pentingnya menjaga stabilitas harga ditingkat produsen maupun konsumen yang diikuti dengan distribusi pangan yang merata;
4. Potensi kekayaan laut dan perikanan darat belum termanfaatkan secara optimal.
5. Masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan hasil laut dan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

e) Bidang Lingkungan Hidup

1. Separuh luasan kawasan hutan dalam kondisi rusak. Hutan sebagai penyangga sumber daya air dan keragaman hayati memerlukan penanganan secara berkelanjutan guna mendukung kelangsungan hidup manusia sebagai pelaku dan objek pembangunan;
2. Pemanfaatan hutan sebagai kawasan konservasi masih perlu dioptimalkan mengingat hutan dapat dimanfaatkan sebagai destinasi wisata maupun tempat pendidikan.

f) Kapasitas Fiskal Daerah

Pertumbuhan PAD masih dibawah 5%. Pajak daerah merupakan salah satu fungsi *budgeter* penting yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah, diperlukan langkah optimalisasi penerimaan perpajakan yang

dilakukan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha. Disamping itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi daerah dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung daya saing daerah.

g) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Belum memiliki ikon wisata dan paket destinasi wisata;
2. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW) belum didukung sarana dan prasarana yang baik;
3. Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang pariwisata;
4. Ekonomi kreatif belum berkembang.

h) Bidang Koperasi dan UMKM

1. Masih minimnya jumlah Koperasi yang aktif melakukan kegiatan ekonomi kerakyatan;
2. Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang Koperasi;
3. Terbatasnya akses modal untuk pengembangan Koperasi dan UMKM;
4. Belum tersedianya jaringan bisnis yang handal untuk melakukan;
5. pemasaran hasil produksi pelaku UMKM.

i) Bidang Penataan Ruang

1. Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang;
2. Terdapat deviasi pemanfaatan ruang karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang.

j) Bidang Penanggulangan Bencana

1. Kualitas SDM dan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana belum memadai;
2. Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana;
3. Kualitas dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim belum optimal.

k) Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat

1. Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas;
2. Rentan terhadap konflik horisontal;
3. Potensi konflik tanah antarmasyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah.
4. Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 memerlukan dukungan kamtibmas yang kondusif;
5. Pemahaman yang terbatas terhadap kebhinekaan menimbulkan ancaman disintegritas kebangsaan.

6. Munculnya *hoax*, perilaku menyimpang, ajaran sesat, maupun ancaman terorisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

l) Bidang Kebudayaan

1. Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
2. Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
3. Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri;
4. Pemanfaatan nilai budaya bagi pembangunan masih terbatas.

m) Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah:

1. Melemahnya karakter bangsa pada generasi muda;
2. Merebaknya bahaya narkoba di kalangan generasi muda;
3. Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri;
5. Lemahnya pola pembinaan bagi atlet;
6. Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat provinsi maupun nasional;

n) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Masih rentan permasalahan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.
2. Masih sering timbulnya KDRT dan Kekerasan pada perempuan dan anak.

o) Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;
2. Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;
3. Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha;
4. Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan;
5. Minimnya penggunaan dan pemanfaatan iptek masyarakat pedesaan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
6. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat yang masih kurang optimal.

p) Bidang Sosial

1. Kecenderungan meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. Tingginya urbanisasi dari desa ke kota atau keluar provinsi;
3. Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin;
4. Kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan individu lainnya;

5. Komunikasi yang konstruktif antarkelompok masyarakat dari berbagai latar belakang (sosial, ekonomi, budaya, dan agama) masih perlu diperkuat.

q) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

1. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan;
2. Tingkat pengangguran terbuka usia muda;
3. Balai Latihan Kerja di Provinsi Lampung kekurangan tenaga pengajar (instruktur) dan peremajaan peralatan praktek yan lebih modern.

r) Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Terbatasnya inovasi daerah.

s) Bidang Otonomi Daerah, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1. Perlunya sinkronisasi implemementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah;
2. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;
3. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur;
4. Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi;
5. Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas;
6. Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat.

t) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Pendidikan politik masyarakat masih rendah;
2. Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik dan yang bernuansa sara.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan Provinsi Lampung periode 2019 – 2024 sesuai dengan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : “Rakyat Lampung Berjaya”. Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "*subyek utama*" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Lampung dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya

yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut:

- a) Kehidupan masyarakat yang **aman**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.
- b) Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (*smart*) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- c) Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- d) Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
- b. Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
- c. Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.

- d. Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
- e. Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
- f. Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Misi 1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-1, Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai yang didukung dengan kepastian hukum:

1. Melaksanakan upaya untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan informal, komunikasi publik dan mass media, serta lembaga dan organisasi terkait;
2. Memberikan dukungan dalam upaya menumbuhkembangkan, penghayatan, dan pelaksanaan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan koordinasi dan dukungan kepada instansi vertikal dan Kab/Kota dalam mendorong terciptanya kamtibmas dan penegakan hukum;
4. Mendukung dan memperluas sosialisasi penegakan hukum (sadar hukum) sampai ke tingkat perdesaan.
5. Meningkatkan peran lembaga adat, lembaga agama, lembaga kemasyarakatan dan forum komunikasi dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya konflik dalam masyarakat, penyalahgunaan narkoba, radikalisme, dan masalah-masalah sosial lainnya.
6. Memperkuat komunikasi antar lembaga dan kelompok masyarakat dalam menciptakan kebersamaan dan toleransi, serta meningkatkan kebudayaan daerah dan kerukunan hidup antar umat beragama;
7. Meningkatkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
8. Mengembangkan tradisi budaya daerah sebagai kearifan lokal untuk menjadi dasar dan strategi dalam pembangunan daerah;

Misi 2 : Mewujudkan "good govemance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik

Komitmen dalam melaksanakan Misi-2, Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik:

1. Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik;

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan dan antar Pemerintah Kabupaten/kota, instansi vertikal di daerah, dan dunia usaha dalam rangka membangun sinergitas pembangunan daerah;
3. Meningkatkan peranserta masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dengan mempergunakan teknologi informasi;
4. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah melalui tatakelola yang profesional dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembangunan;
5. Meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pembangunan daerah Lampung melalui usulan program yang prospektif, inovatif, produktif, dan kolaboratif;
6. Mengembangkan peran BUMD untuk membantu dan mendukung peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan;
7. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan perizinan, skema insentif dan dis-insentif, serta kepastian biaya pelayanan.
8. Mendukung upaya peningkatan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan dasar (SD, SMP) berkerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait;
9. Meningkatkan kualitas, pemerataan dan akses pelayanan pendidikan menengah (SMA) dan kejuruan (SMK) bekerjasama dengan lembaga terkait;
10. Meningkatkan kualitas, pemerataan, dan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial sampai ke tingkat desa bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan lembaga terkait (NGO, lembaga donor, dunia usaha, dll);
11. Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat melalui upaya edukasi dan pemberdayaan bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota.

Misi 3 : Meningkatkan kualitas SDM dan Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel

Komitmen dalam melaksanakan Misi-3, Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel:

1. Mewujudkan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam bidang jasmani dan rohani secara baik;
2. Melaksanaan upaya pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan peran perempuan dalam rumah tangga, sosial ekonomi, dan kemasyarakatan, serta dalam bidang politik;

3. Melaksanakan upaya untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi pekerja dibawah umur (anak), perdagangan perempuan (*women trafficking*), dan menjamin hak-hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan;
4. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi bagi kaum difable;
5. Mendukung berkembangnya peran lembaga-lembaga yang mengadvokasi perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difable.

Misi 4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah

Komitmen dalam melaksanakan Misi-4, Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi, konektivitas wilayah, dan sistem permukiman:

1. Memperluas dan mengintegrasikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk memperkuat konektivitas internal guna menumbuhkan ekonomi daerah dan pengembangan wilayah secara merata;
2. Mengembangkan dan memfungsikan jaringan infrastruktur regional (jalan tol Sumatera, jalan nasional, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan, dermaga, kereta api, dan bandara) untuk meningkatkan konektivitas eksternal dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing pasar komoditas Provinsi Lampung pada wilayah regional, nasional dan internasional;
3. Mendorong investasi pembangkit dan jaringan energi listrik (termasuk energi baru dan terbarukan) dalam upaya meningkatkan kemandirian energi daerah serta pemerataan layanan listrik;
4. Mendorong pengembangan sistem penyediaan air minum regional (SPAM Regional);
5. Mendorong pengembangan sistem pengolahan sampah regional;
6. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan gas agar bisa melayani rumah tangga secara merata;
7. Mendorong pengembangan dan perluasan jaringan telekomunikasi dan informasi sampai ke wilayah perdesaan.
8. Memperluas pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan, kampung nelayan dan permukiman (kumuh) perkotaan, serta memfasilitasi

Misi 5 :Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan

Komitmen dalam melaksanakan Misi-5, Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan:

1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengairan serta meningkatkan tata kelola air irigasi dalam rangka memperluas jangkauan dan meningkatkan index pertanaman serta untuk pengendalian banjir;
2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan hutan kemasyarakatan melalui program subsidi, insentif, fasilitasi pemasaran, fasilitasi permodalan, fasilitasi inovasi dan teknologi produksi, penyediaan saprodi dan alsintan;
3. Membangun dan mengembangkan sentra pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan), sentra industri kecil, kawasan industri menengah dan besar, serta sentra pariwisata;
4. Membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi dunia usaha (bidang produksi, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dan pariwisata) dengan prioritas investasi untuk industri hilir yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan ramah lingkungan;
5. Mengembangkan skema investasi dan kerjasama dalam bentuk kemitraan dan partnership dengan dunia usaha, lembaga donor, dan lembaga pemerintah (Kementerian dan Pemerintah Provinsi lainnya) dalam pembangunan daerah dan menciptakan kesempatan kerja;
6. Mengembangkan kewirausahaan (koperasi dan UMKM) melalui inovasi dan standarisasi produk (termasuk untuk industri kreatif), akses permodalan, pemasaran, dan program kemitraan dengan pihak lainnya;
7. Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pendidikan kejuruan, latihan kerja, sertifikasi kompetensi, serta program magang;
8. Mendukung perluasan program jaminan sosial dan jaminan kesehatan bekerjasama dengan BPJS, Asosiasi Pengusaha, dan Asosiasi Perkerja

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama:

1. Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
2. Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
3. Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;

4. Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
5. Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
6. Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
7. Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
8. Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (*illegal logging*), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
9. Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peranserta masyarakat.

Janji Kerja

Pencapaian Misi dengan dibarengi komitmen dilakukan melalui 33 Janji kerja yang akan dituangkan dalam Program dan kegiatan prioritas. Janji kerja tersebut antara lain :

1. Kartu Petani Berjaya (KPB) Memberikan Jaminan Kepada para Petani untuk mendapat :
 - a) Kepastian mendapat benih/bibit, pupuk, pesitisida dan insektisida secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan petani
 - b) Kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani
 - c) Bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas usaha tani
 - d) Beasiswa bagi anak petani yang berprestasi untuk berbagi jenjang pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi
2. Bea-mahasiswa Pertanian yang disediakan khusus bagi mahasiswa yang berprestasi dalam upaya mendorong minat generasi muda pada bidang pertanian.
3. Mencegah dan memberantas peredaran pupuk palsu
4. Revitalisasi Lada (Lampung Black Paper). Meningkatkan produksi, produktivitas serta nilai tambah lada dan memfasilitasi akses pasar sebagai salah satu komoditas unggulan
5. Meningkatkan daya saing kopi, kakao dan komoditas unggulan lainnya (jagung, singkong, udang) melalui penerapan teknologi produksi, pengembangan industri hilir, serta perluasan pasar dalam negeri.
6. Program Nelayan Berjaya : Menyejahterakan nelayan dan keluarga nelayan dengan :
 - a) Mendorong tumbuhnya usaha budidaya perikanan dan memberikan pendampingan pemasaran serta penjaminan pasar produksi perikanan

- b) Mengintegrasikan nelayan dan keluarga nelayan dalam pengembangan industri pengolahan perikanan.
 - c) Memberikan asuransi nelayan dan jaminan sosial bagi nelayan lansia
 - d) Memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan berprestasi dalam berbagai tingkatan pendidikan termasuk perguruan tinggi
 - e) SPBU untuk nelayan. Mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan serta pertambakan
7. Memfungsikan BUMD untuk menangani komoditas strategi bidang pertanian bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi lain untuk menjamin kepastian pasar
 8. Lampung sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata Indonesia. Mempercepat pembangunan kepariwisataan dengan :
 - a) Mengembangkan daerah-daerah tujuan wisata unggulan di Lampung
 - b) Menjadikan Lampung sebagai salah satu Pusat Agrowisata dan Ekowisata Indonesia
 - c) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pariwisata
 - d) Mempercepat pengembangan Lapangan Terbang Taufik Kiemas Pekon Seray, Pesisir Tengah (Krui)
 9. Lampung Kaya Festival. Menjadikan budaya dan kekayaan alam Lampung sebagai daya tarik festival untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, merawat kebudayaan lokal dan mengembangkan kesenian serta mendukung meningkatnya kunjungan wisatawan.
 10. Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Mengembangkan Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara dan menjadikanya sebagai salah satu tujuan agrowisata Nasional
 11. Infrastruktur Lampung Berjaya
 - a) Membangun infrastruktur untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan-kawasan wisata unggulan serta meningkatkan konektivitas antara Kabupaten/Kota.
 - b) Merevitalisasi dan membangun irigasi, embung dan infrastruktur pertanian lainnya.
 - c) Merevitalisasi pelabuhan-pelabuhan dan membangun pelabuhan baru untuk mendukung pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
 - d) Mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi
 12. Unit Reaksi Cepat Perbaikan Infrastruktur. Menciptakan sistem dan mekanisme perbaikan infrastruktur secara cepat :
 - a) Berbasis peran serta warga dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses pelaporan, komunikasi dan eksekusi perbaikan infrastruktur.

- b) Memperkuat sumberdaya manusia dan sumberdaya aparatur dalam penanganan infrastruktur secara cepat, tanggap dan tepat
 - c) Perbaiki dalam pemeliharaan infrastruktur berbasis gotong royong
13. Lampung Terang Berjaya. Memprioritaskan kebijakan pengelolaan energi dengan berfokus kepada :
- a) Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan swasembada sumber energi listrik
 - b) mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya energi baru dan terbarukan berbasis tenaga surya, air dan gas bumi
 - c) kebijakan-kebijakan pengelolaan energi yang ramah lingkungan dan ramah pertanian
14. Mengelola Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Rakyat :
- a) Mengarusutamakan lingkungan hidup dalam pengelolaan pembangunan
 - b) Mengorektasikan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat
 - c) Mengintegrasikan pengelolaan hutan dengan upaya keterlibatan masyarakat sekitar hutan
15. Lampung merawat Indonesia. Memperkuat kerukunan hidup antara umat beragama dan menjadikan rumah ibadah dan pondok pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan publik untuk menangkal radikalisme serta mengembangkan sikap kebangsaan.
16. Memberikan insentif khusus kepada Guru Honorer, Guru PAUD, Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu, Ustad dan Ustadzah Pondok Pesantren, Penjaga Masjid dan Rumah Ibadah lainnya, Muazin, Khatib, Imam Masjid, pendeta dan para pemimpin berbagai agama, serta P3NTR, bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Lampung mengaji, memfasilitasi pengembangan pemahaman dan penghafal Al Quran dengan memberikan bantuan fasilitasi khusus bagi rumah-rumah tahfidz dan pokok pesantren serta mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Lampung.
18. Smart School. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan :
- a) Menyediakan fasilitas internet dan komputer di setiap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b) Mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler bisnis startup dan bisnis berbasis teknologi bagi siswa SMK dan SMA.
 - c) Meningkatkan kapasitas para guru di bidang teknologi dengan menyelenggarakan pelatihan dan berbagai bentuk peningkatan kapasitas lainnya
19. Revitalisasi SMK. Meningkatkan SMK ke dunia kerja dengan :
- a) Memperluas kerja magang sebagai kurikulum pendidikan SMK dengan dukungan dunia usaha
 - b) Mengembangkan SMK yang berfokus pada bidang teknologi dan industri untuk menyokong pengembangan industri

- c) Memfasilitasi kemirtraan strategis dunia pendidikan dengan dunia usaha, industri dan investasi
20. Lampung Menuju Bebas Narkoba
- a) Mencegah penggunaan narkoba melalui pembinaan berbasis keluarga dan tokoh-tokoh agama
 - b) Memberantas kejahatan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi semua pemangku kepentingan
 - c) Menyelamatkan korban-korban penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi
21. Perempuan Berjaya :
- a) Memandirikan perempuan secara ekonomi berbasis keluarga
 - b) Pengarusutamaan gender dalam bidang politik, sosial budaya dan ekonomi
 - c) Memfasilitasi pendampingan hukum bagi perempuan.
22. Mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan dan melayani prinsip keadilan.
23. Mengembangkan ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, melalui :
- a) Mengembangkan sentra-sentra industri kreatif berbasis sumber daya dan keunggulan lokal
 - b) Mengembangkan UMKM melalui penyediaan pelatihan usaha, bantuan permodalan serta pendampingan usahan dan pemasaran
 - c) Merevitalisasi fungsi koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan
 - d) Merevitalisasi pasar tradisional (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota)
24. Lampung Ramah Usaha. Menata regulasi dan kebijakan pengembangan dunia usaha dengan :
- a) Menyederhanakan perizinan
 - b) Menyusun kebijakan untuk kemudahan berusaha
 - c) Menjamin kepastian biaya-biaya pelayanan
 - d) Memfasilitasi sinergi diantara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha, bisnis dan investasi
25. Memfasilitasi terwujudnya Lampung sebagai Pusat Industri Pertahanan Indonesia, bersinergi dengan kementerian Pertahanan dalam merelokasi pusat industri kemaritiman, persenjataan dan kedirgantaraan ke Lampung.
26. Lampung Ramah Perempuan dan Anak. Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak (bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota), dengan :
- a) Mengembangkan fasilitas dan ruang-ruang publik ramah perempuan dan anak
 - b) Merevitalisasi layanan-layanan kesehatan khusus untuk perempuan dan anak
 - c) Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak

- d) Menyediakan dan memfasilitasi ruang-ruang laktasi (ruang menyusui) di tempat kerja, kantor instansi pemerintah dan swasta dan ruang publik
 - e) Memfasilitasi pemenuhan gizi yang baik bagi anak
 - f) memberikan insentif untuk kader-kader Posyandu
27. Anak Muda Berjaya :
- a) Mendorong berbagai aktivitas kompetisi dan festival seni dan olahraga antara kalangan muda berbasis komunitas
 - b) Menggalakan " Gerakan Malu Menganggur" di kalangan muda
 - c) Mencetak wirausahawan muda
 - d) Mendorong pendirian Gelanggang Remaja (Youth Center) sebagai pusat pengembangan kreativitas anak muda di Kabupaten/Kota
28. Lampung Sehat :
- a) Mendorong Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui upaya sosialisasi, fasilitasi, dan sinergi program berbasis komunitas
 - b) Memperkuat peranan Puskesmas dan memperbaiki kualitas layanan Puskesmas bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit
29. Mengembalikan Kejayaan Lampung dalam dunia olahraga berfokus pada :
- a) Memperbaiki dan memperbanyak fasilitas-fasilitas olah raga
 - b) Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan memberikan insentif bagi altet berprestasi
 - c) Memperbaiki tata kelola organisasi olahraga melalui penempatan personal yang berkompeten
30. Smart Village
- a) Meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan bagi warga desa
 - b) Memfasilitasi digitalisasi administrasi desa
 - c) E-participation : melibatkan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian evaluasi warga berbasis interaksi online dan atau aplikasi
31. Pendampingan program pembangunan desa
- a) Memberikan fasiltasi pendampingan kepada aparat desa dalam mengelola pembangunan desa
 - b) Memberikan pendampingan hukum untuk para Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
32. Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan :
- a) Menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi
 - b) Menciptakan sistem penjenjangan karir melalui fit dan proper test berbasis kompetensi

- c) Pembinaan penempatan aparatur birokrasi berbasis kebutuhan daerah (Kabupaten/kota) dan asas keadilan
- d) Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas kerja aparatur. Meningkatkan kesejahteraan aparatur birokrasi, antara lain dengan meningkatkan tunjangan kinerja
- e) Memperbaiki dan menyehatkan pengelolaan aset -aset Pemerintah Provinsi
- f) Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- g) Meningkatkan koordinasi Pemerintah Provinsi dengan instansi vertikal di daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta dunia usaha
- h) Membangun pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

33. APBD Rakyat Berjaya :

- a) Meningkatkan PAD untuk memperluas cakupan pembangunan dan pelayanan public
- b) Mendayagunakan APBD untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Pendidikan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah III	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan pelayanan pendidikan wilayah VII	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kesehatan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan RSBNH	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan & Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
		Kesehatan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat daerah	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit.	Rumah Sakit Umum Daerah dr.
		Kesehatan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Jiwa
		Program peningkatan sarana dan prasara aparatur	Rumah Sakit Jiwa
		Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah	Rumah Sakit Jiwa
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perasngkat daerah	Rumah Sakit Jiwa
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Jiwa
		Program Mutu Layanan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa
		Program Mutu Layanan Penunjang medis	Rumah Sakit Jiwa

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	Rumah Sakit Jiwa
		Sosial	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Sosial
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Sosial
		Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Sosial
		Program Penanganan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Tenaga Kerja	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pemberdayaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan
		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan
		Program Perlindungan dan Pencegahan kekerasan terhadap Anak	Dinas Pemberdayaan
		Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta	Dinas Pemberdayaan
		Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan
		Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan	Dinas Pemberdayaan
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Kependudukan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan
		Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan
		Kepemudaan dan Olahraga	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemuda dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pemuda dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Pemuda dan
		Program Peningkatan peran serta Kepemudaan	Dinas Pemuda dan
		Program Olahraga Prestasi	Dinas Pemuda dan
		Program Pembudayaan Olahraga	Dinas Pemuda dan
		Program Peningkatan sarana prasarana dan kemitraan	Dinas Pemuda dan
		Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga	Dinas Pemuda dan
		Kebudayaan	
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Keragaman Budaya	
		Perpustakaan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perpustakaan dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Dinas Perpustakaan dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan
		Program Layanan, Teknologi Informasi dan komunikasi, pelestarian dan kerjasama perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan
		Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan bahan Pustaka	Dinas Perpustakaan dan
		Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan
		Kearsipan	
		Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan
2	PENGEMBANGAN EKONOMI	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Melalui UPTD Wilayah	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian / Laboratorium	Dinas Bina Marga dan Bina
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Dinas Bina Marga dan Bina
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	Dinas Perumahan, Kawasan
		Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengelolaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pengelolaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah	Dinas Pengelolaan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta aset Perangkat Daerah	Dinas Pengelolaan
		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Program Penatagunaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Dinas Pengelolaan
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan, Kawasan
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Dinas Perumahan, Kawasan
		Program Peningkatan Kapasaitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan
		Program Perencanaan, Evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan
		Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan
		Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penanggulangan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	Badan Penanggulangan
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan
		Program Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan
		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penegakan Peraturan Perundang undangan	Satuan Polisi Pamong Praja
		Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Pangan	
		Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Tanaman Pangan,
		Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi, Pangan	Dinas Tanaman Pangan,
		Pertanahan	
		Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan
		Lingkungan Hidup	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan , Evaluasi Kinerja dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penegakan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pemberdayaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan
		Program Pembinaan, Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan	Dinas Pemberdayaan
		Program Pengembangan, Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan
		Program Pembinaan kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	Dinas Pemberdayaan
		Program Pembinaan, Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA	Dinas Pemberdayaan
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan
		Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan
		Perhubungan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, Serta Aset Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana, Sarana dan fasilitas LLAJ	Dinas Perhubungan
		Program Pembangunan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Komunikasi dan Informatika	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi,
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Komunikasi,
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi,
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi,
		Program Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Dinas Komunikasi,
		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
		Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan
			Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan
		Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	Dinas Penanaman Modal dan
		Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan
		Statistik	
		Program Penyelenggaraan statistik sektoral	Dinas Komunikasi,
		Persandian	
		Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi,
		Urusan Pilihan	
		Kelautan dan Perikanan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Daya Saing dan Konsumsi Ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Ruang Laut	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pariwisata	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program pengembangan ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger	Dinas Pariwisata dan Ekonomi
		Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Pasca Panen Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Penyediaan dan Pengawasan Benih TPH Bermutu dan Bersertifikat.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Peningkatan Pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.	Dinas Tanaman Pangan,
		Program Pengembangan, Peningkatan Kualitas SDM Pertanian, dan Sistem Penyelenggaraan Penyuluhan.	Dinas Tanaman Pangan,
		Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perkebunan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perkebunan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Kualitas Bahan Baku (DBH-CHT)	Dinas Perkebunan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	Dinas Perkebunan
		Pertanian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Peningkatan Produksi Hasil Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang ASUH	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Peningkatan Kelembagaan Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		Kehutanan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Kehutanan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat daerah	Dinas Kehutanan
		Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan DAS dan RHL	Dinas Kehutanan
		Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Kehutanan
		Peningkatan fungsi kesatuan pengelolaan Hutan	Dinas Kehutanan
		Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Program peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Program Perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta aset perangkat daerah	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Pengembangan, pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Dukungan Program/Kebijakan Nasional di Bidang ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya
		Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Perdagangan	
		Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan atau/jasa	Dinas Perindustrian dan
		Program Pengujian Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	
		Perindustrian	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta Asset Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan
		Program Pengembangan Sumber Daya Industri	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Dinas Perindustrian dan
		Program Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan
		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindustrian dan
		Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri	Dinas Perindustrian dan
		Transmigrasi	
		Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Dinas Pemberdayaan
		Inspektorat	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Inspektorat
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, Serta Asset Perangkat Daerah	Inspektorat
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
		Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan Pada Obyek Pengawasan	Inspektorat
		Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Inspektorat
		Perencanaan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Perencanaan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Perencanaan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Perencanaan
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Badan Perencanaan
		Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan	Badan Perencanaan
		Program Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan	Badan Perencanaan
		Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	Badan Perencanaan
		Program Pengolahan dan Analisis data Perencanaan	Badan Perencanaan
		Keuangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan	Badan Pengelola Keuangan dan
		Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/ Kota serta investasi pemerintah daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Program Pengelolaan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan
		Keuangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pendapatan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Badan Pendapatan
		Program peningkatan pelayanan pajak	Badan Pendapatan
		Program peningkatan pelayanan pendapatan non pajak	Badan Pendapatan
		Program peningkatan pelayanan teknologi informasi pendapatan	Badan Pendapatan
		Program pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan daerah	Badan Pendapatan
		Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	Badan Pendapatan
		Badan Kepegawaian Daerah	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kepegawaian
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Kepegawaian
		Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian
		Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	Badan Kepegawaian
		Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian
		Pendidikan dan Pelatihan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Pengembangan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Badan Pengembangan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Badan Pengembangan
		Program Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	Badan Pengembangan
		Penelitian dan Pengembangan	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penelitian dan
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Penelitian dan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Badan Penelitian dan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Penelitian dan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Badan Penelitian dan
		Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan
		Penghubung	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penghubung
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Penghubung
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Penghubung
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Penghubung
		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah	Badan Penghubung
		Sekretariat Daerah	
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Biro Administrasi Pimpinan
		Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	Biro Administrasi Pimpinan
		Program Pelayanan Administrasi Umum	Biro Administrasi Pimpinan
		Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial & keagamaan	Biro Kesejahteraan

NO	PEMBANGUNAN PRIORITAS	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Kesejahteraan
		Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	Biro Hukum
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Hukum
		Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Biro Umum
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Umum
		Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Biro Pemerintahan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Pemerintahan
		Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	Biro Perekonomian
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Perekonomian
		Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	Biro Organisasi
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Organisasi
		Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biro Administrasi Pembangunan
		Program Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Biro Layanan Pengadaan
		Sekretariat DPRD	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
		Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta aset Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD
		Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD
		Program pembahasan, sosialisasi, dokumentasi, peraturan perundang-undangan dan produk hukum	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD
		Kesbangpol	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
		Program Perencanaan, Evaluasi dan keuangan, serta asset Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesbangpol
		Program Kewaspadaan Nasional	Badan Kesbangpol
		Program Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
		Program Ketahanan sosial dan kemasyarakatan	Badan Kesbangpol

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1.01.01			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	1		Pendidikan		
1	1	24	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas	327,094,222,000,00	307,082,545,800,00
1	1	25	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	87,880,000,000,00	28,209,514,900,00
1	1	26	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus	9,200,000,000,00	7.879.288.900,00
1	1	27	Program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20,170,000,000,00	12.322.314.000,00
1	1	29	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah I	755.000.000,00	582.824.000,00
1	1	30	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah II	479.000.000,00	355.699.500,00
1	1	31	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah III	325.000.000,00	269.823.500,00
1	1	32	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah IV	479,000,000,00	323.451.000,00
1	1	33	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah V	518.000.000,00	383.275.000,00
1	1	34	Program Pemanfaatan TIK untuk pendidikan	4,000,000,000,00	5,340,215,150,00
1	1	35	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah VI	572.000.000,00	356.825.000,00
1	1	36	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Wilayah VII	370.000.000,00	347.054.000,00
1	1	37	Program Penguatan Fungsi Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi	13,000,000,000,00	9.193.088.700,00
1	1	38	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan	141,498,078,000,00	241.519.516.000,00
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	15		Kebudayaan		
2	15	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	3,650,000,000,00	1.748.409.550,00
2	16	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4,077,000,000,00	2.284.23.650,00
2	16	19	Program Pelestarian, Pembinaan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Museum	4,750,000,000,00	2.446.931.300,00
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	4		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,403,900,000,00	6.611.326.560,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,823,000,000,00	22.152.560.250,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKP 2020	PAGU PERUBAHAN RKP 2020
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	800,000,000,00	1.079.264.750,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	5,000,000,000,00	3,249,621,475,00
1	1	20	Program Pengembangan Museum Transmigrasi menjadi Pusat Layanan Informasi, Edukasi dan Sejarah Ketransmigrasi	450,000,000,00	217.317.100,00
Sub Total				637,294,200,000,00	653,955,444,085,00
1.02.01			Dinas Kesehatan		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	2		Kesehatan		
1	2	37	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1,650,000,000,00	613.527.880,00
1	2	38	Program Kesehatan Masyarakat	14,372,655,071,00	15.548.491.490,00
1	2	39	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2,450,000,000,00	8,222,551,800,00
1	2	40	Program Pelayanan Kesehatan	67,800,000,000,00	68,184,450,719,00
1	2	41	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	8,729,140,800,00	6.843.671.423,00
1	2	42	Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	6,650,000,000,00	1,435,964,900,00
1	2	43	Program Pelayanan RSBNH	9,324,288,000,00	8,476,593,115,00
1	2	44	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	1,600,000,000,00	1.588.840.000,00
1	2	45	Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alkes	986,282,880,00	433.551.000,00
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	4		Non Urusan (Eks BAU)		
2	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,612,568,500,00	12,037,518,577,00
2	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,727,446,900,00	4.454.958.114,00
2	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	197,617,849,00	71.875.439,00
2	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	900,000,000,00	153.963.350,00
Sub Total				136,000,000,000,00	128,065,957,807,00
1.02.02			Rumah Sakit Abdul Moeloek		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	2		Kesehatan		
1	2	26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	86,602,578,000,00	56.180.585.180,00
1	2	28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1.800.152.000,00	1.800.152.000,00
1	2	34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	200.000.000,00	250,000,000,000,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2			URUSAN PENDUKUNG		
2	2		Non Urusan (Eks BAU)		
2	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,176,988,000,00	10,053,787,820,00
2	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	420.282.000,00	420.282.000,00
Sub Total				300,000,000,000,00	318,454,807,000,00
1.02.03			Rumah Sakit Jiwa		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	2		Kesehatan		
1	2	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	645,784,400,00	602.283.400,00
1	2	34	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	14.000.000.000,00	12.500.000.000,00
1	2	46	Program Mutu Layanan Keperawatan	204,143,600,00	98.063.600,00
1	2	47	Program Mutu Layanan Penunjang Medis	1,841,227,100,00	4,648,864,700,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	3		Non Urusan (Eks BAU)		
1	3	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,953,438,900,00	5.135.517.950,00
1	3	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,735,236,800,00	1,806,710,500,00
1	3	03	Program Peningkatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1,213,364,000,00	516.031.700,00
5	4	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	406,805,200,00	217.462.900,00
Sub Total				28,000,000,000,00	25,524,934,750,00
1.03.01			Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	3	18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	86,391,762,217,00	76,823,615,714,00
1	3	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	18,767,847,000,00	5,334,278,550,00
1	3	35	Program Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan melalui UPTD Wilayah	55,370,301,022,00	65.455.421.502,00
1	3	36	Program Optimalisasi dan Peranan UPTD Pengujian/Laboratorium	1,777,718,600,00	1.229.226.260,00
1	3	37	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	3,356,862,500,00	2.020.522.325,00
1	3	39	Program Penyusunan Penganggaran, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1,439,901,500,00	1.102.621.025,00
1	3	41	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Status Provinsi	52,501,246,000,00	17.364.410.590,00
1	3	42	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan/ Jembatan	487,864,360,961,00	176,097,582,208,00
1	3	43	Program Survey dan Data Base Jalan/Jembatan	2,555,905,000,00	1.758.746.196,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,227,864,500,00	10.979.214.400,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,497,044,200,00	4,986,862,520,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1,106,198,500,00	990.436.025,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	504,185,500,00	159.391.875,00
Sub Total				729,361,197,500,00	364,302,329,190,00
1.03.02					
Dinas Pengelolaan SDA					
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	03		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang		
1	3	44	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air	39,879,920,000,00	17,233,681,600,00
1	3	45	Program Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	4,417,245,000,00	13,490,747,750,00
1	3	46	Program Penatagunaan Sumber Daya Air	1.450.000.000,00	1.319.500.000,00
1	3	47	Program Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan SDA	3,372,835,000,00	9,214,850,000,00
1	3	48	Program Pengembangan SDA	2,250,000,000,00	5,065,106,500,00
1	4	23	Program Pengembangan Data/Informasi		
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,365,000,000,00	11.768.670.000,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,020,000,000,00	712.375.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	400,000,000,00	99.000.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	175,000,000,00	93.500.000,00
Sub Total				63,330,000,000,00	58,997,430,850,00
1.04.01					
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya					
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	4		Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman		
1	4	18	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pertanahan	1,400,000,000,00	57.296.000,00
1	4	29	Pengembangan Perumahan	38,216,000,000,00	4.809.041.600,00
1	4	30	Pengembangan Kawasan Permukiman	103,817,000,000,00	25.464.270.668,00
1	4	31	Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah	48,242,002,500,00	38.849.263.477,00
1	4	34	Penyelenggaraan Penataan Ruang	4,650,000,000,00	-

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RPKD 2020	PAGU PERUBAHAN RPKD 2020
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,455,800,000,00	4,106,257,450,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,921,000,000,00	1,882,285,800,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	270,000,000,00	69.300.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	680,000,000,00	422.758.000,00
Sub Total				203,651,802,500,00	77.211.809.110,00
1.05.01			Satpol PP		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	5		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	5	18	Program penegakan Peraturan Perundang undangan	960,000,000,00	565.098.975,00
1	5	19	Peningkatan Perlindungan Masyarakat (Linmas)	407,000,000,00	166.413.800,00
1	5	20	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibmas)	4,321,364,000,00	4.840.600.700,00
5			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5			Pendidikan dan Pelatihan		
4	5	19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (POL PP)	1,097,293,900,00	260.710.900,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	16,469,631,600,00	20.461.752.475,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	727,235,000,00	646.901.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah	335,639,100,00	54.536.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	681,836,400,00	312.216.100,00
Sub Total				25,000,000,000,00	27.308.229.950,00
1.05.02			Badan Penanggulangan Bencana		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	5		Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
1	5	15	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1,209,586,000,00	385.992.500,00
1	5	16	Program Kedaruratan dan Logistik	855,950,200,00	181.428.500,00
1	5	17	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	934,049,400,00	284,148,700,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,288,928,700,00	1.516.068.700,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPDP 2020	PAGU PERUBAHAN RKPDP 2020
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	273,351,400,00	145.048.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	148,490,600,00	14.643.900,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	289,643,700,00	127.816.550,00
Sub Total				5,000,000,000,00	2.655.146.850,00
1.06.01			Dinas Sosial		
1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	6		Sosial		
1	6	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	219.103.800,00	152.593.750,00
1	6	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.744.276.000,00	7.565.082.300,00
1	6	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	526.405.000,00	414.597.600,00
1	6	22	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	631.930.000,00	533.858.950,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,854,986,000,00	1.716.585.650,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	402,000,000,00	244.429.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	5.000.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	467,135,600,00	84,128,550,00
Sub Total				15,000,000,000,00	10,751,835,800,00
2.01.01			Dinas Tenaga Kerja		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	1		Tenaga Kerja		
2	1	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.189.084.000,00	285.084.000,00
2	1	19	Program Pembinaan Penempatan Perluasan Kesempatan Kerja	830.000.000,00	219.026.990,00
2	1	20	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	514.122.000,00	227.521.500,00
2	1	21	Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	800.000.000,00	251.904.900,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,256,700,000,00	1.986.803.000,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,121,600,000,00	323.800.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	150,000,000,00	92.640.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	910,324,000,00	519.407.850,00
Sub Total				10,603,600,000,00	3.906.188.240,00
2.02.01			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	2	20	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga	2,800,000,000,00	620.418.100,00
2	2	21	Program Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	1,700,000,000,00	252.806.960,00
2	2	22	Program Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking, Kekerasan, Pelecehan Seksual serta pada Situasi Khusus dan Darurat.	1,000,000,000,00	333.764.300,00
2	2	23	Program Operasional Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	900.000.000,00	556.641.550,00
2	2	24	Program Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,000,000,000,00	58.239.800,00
2	2	25	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	370.000.000,00	184.236.760,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,534,870,900,00	2.231.782.780,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	595,026,600,00	530.304.630,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	80,102,500,00	42.932.550,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	390,000,000,00	122,482,500,00
Sub Total				10,370,000,000,00	4.933.609.930,00
2.05.01			Dinas Lingkungan Hidup		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	5		Lingkungan Hidup		
2	5	16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	557,000,000,00	166.805.700,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2	5	25	Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim.	650,000,000,00	203.836.900,00
2	5	26	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	795,000,000,00	198.162.800,00
2	5	27	Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	560,000,000,00	317.951.100,00
2	5	28	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan	1,100,000,000,00	649.239.100,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,542,778,800,00	1.482.205.300,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	308,613,900,00	78.450.950,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	114,726,000,00	39.926.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat daerah	371,881,300,00	181.956.150,00
Sub Total				6,000,000,000,00	3.318.534.000,00
2.06.01					
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	6		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	6	16	Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,751,725,000,00	454.671.200,00
2	6	18	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk	97.677.000,00	57.558.100,00
2	6	20	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	260,000,000,00	57,558,100,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,367,113,600,00	1,106,544,650,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	474,587,800,00	209.527.900,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	127,675,000,00	65.163.500,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	888,898,600,00	167.380.800,00
Sub Total				5,130,000,000,00	2,143,036,050,00
2.07.01					
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi					
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	7		Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		
2	7	18	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	355.850.500,00	17.121.750,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2	7	20	Program Pembinaan Pengembangan Peningkatan Administrasi Aparatur dan Fasilitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1,227,086,700,00	5,090,000,00
2	7	21	Program Pengembangan Keberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Kawasan Pedesaan	572.682.000,00	88.934.100,00
2	7	22	Program Pembinaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya	1,560,673,500,00	933,122,350,00
2	7	23	Program Pembinaan Penerapan dan Pengembangan TTG dan SDA	460.571.600,00	3.590.500,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,350,182,000,00	2,338,529,050,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	555,583,700,00	536.758.700,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	211,852,800,00	137.079.000,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah	352,517,200,00	202.775.600,00
Sub Total				8,627,000,000,00	4,263,001,050,00
2.09.01					
Dinas Perhubungan					
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	9		Perhubungan		
2	9	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	450.000.000,00	-
2	9	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	500.000.000,00	329.125.300,00
2	9	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1,103,000,000,00	165,246,500,00
2	9	21	Program Pengembangan Jaringan, Pelayanan dan Sistem Informasi Perhubungan	1,025,000,000,00	272.393.000,00
2	9	22	Pengendalian, Pengamanan dan Oprasional Transportasi	1,430,000,000,00	805.571.150,00
2	9	23	Peningkatan Keselamatan Transportasi	605.000.000,00	106.658.350,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	2		Non Urusan (Eks BAU)		
1	2	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,142,000,000,00	2.666.240.700,00
1	2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	817,000,000,00	331.000.000,00
1	2	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	310,000,000,00	52.853.800,00
1	2	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	2,618,000,000,00	1.140.388.500,00
Sub Total				10.974.752.000,00	5.869.477.300,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2.10.01			Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	10		Komunikasi dan Informatika		
2	10	16	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	350,000,000,00	64,710,750,00
2	10	17	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	350,000,000,00	52.870.000,00
2	10	19	Program Penetapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,800,000,000,00	1,980,104,300,00
2	10	20	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	4,950,000,000,00	6,783,942,200,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,091,149,600,00	2.879.427.670,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	622,275,200,00	970,109,865,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	283,800,000,00	34.300.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	552,775,200,00	126.612.300,00
Sub Total				36,000,000,000,00	38,676,231,255,00
2.11.01			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	11		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
2	11	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	350,000,000,00	110.796.500,00
2	11	20	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Koperasi	275,000,000,00	14.845.500,00
2	11	21	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	250,000,000,00	21.890.000,00
2	11	22	Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	2,725,000,000,00	2.430.000.000,00
2	11	23	Program Pengembangan dan Peningkatan Daya Saing bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	400,000,000,00	269,100,000,00
2	11	24	Program Peningkatan Pembiayaan Usaha bagi Koperasi dan UMKM	750,000,000,00	460.070.000,00
2	11	25	Program Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	300,000,000,00	57.500.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,685,000,000,00	1.278.044.300,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	450,000,000,00	188.120.000,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	215,000,000,00	33.192.500,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	570.000.000,00	359.397.900,00
Sub Total				800,000,00,00	5.222.956.700,00
2.12.01			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	12		Penanaman Modal		
2	12	19	Program Peningkatan Kualitas Informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah	550,000,000,00	582.195.000,00
2	12	20	Program Promosi Penanaman Modal	700,000,000,00	550,112,600,00
2	12	21	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	300.000.000,00	78.123.100,00
2	12	22	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A	315,000,000,00	200.771.700,00
2	12	23	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B	485.000.000,00	190.524.600,00
2	12	24	Program Peningkatan Kualitas Daya Dukung Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.	700.000.000,00	280.158.750,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,447,600,000,00	2.014.959.075,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	610,000,000,00	539.748.200,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	199,300,000,00	107.550.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	693,100,000,00	178.026.600,00
Sub Total				7.000.000.000,00	4.722.169.625,00
2.13.01			Dinas Pemuda dan Olahraga		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	13		Kepemudaan dan Olahraga		
2	13	16	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	1.750.000.000,00	1.084.412.400,00
2	13	22	Program Olahraga Prestasi	1.917.100.000,00	1.566.565.810,00
2	13	23	Program Pembudayaan Olahraga	774.400.000,00	355.682.650,00
2	13	24	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemitraan	6.575.000.000,00	6.258.658.700,00
2	13	25	Program Fasilitasi Manajemen Teknis dan Pelayanan Gedung Olahraga	320.000.000,00	180.325.890,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,599,700,000,00	4.422.895.035,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	293,800,000,00	377.941.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	16.540.800,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	604,400,000,00	70.274.415,00
Sub Total				12.000.000.000,00	14.333.296.700,00
2.17.01			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2			URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
2	17		Perpustakaan		
2	17	16	Program Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestarian dan Kerjasama Perpustakaan	1,299,107,600,00	435.630.700,00
2	18	17	Program Deposit, Akuisisi dan Pengelolaan Bahan Pustaka	1,125,000,000,00	404.531.100,00
2	18	18	Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan	1,190,000,000,00	254.613.950,00
2	18	19	Program Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	598,270,000,00	271.739.000,00
2	18	20	Program Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip	745,000,000,00	463.928.200,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,591,844,000,00	1.448.920.360,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8,285,104,000,00	1.009.217.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100,000,000,00	11.400.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	1,065,674,400,00	340.174.900,00
Sub Total				18,000,000,000,00	4.640.155.210,00
3.01.01			Dinas Kelautan dan Perikanan		
3			URUSAN PILIHAN		
3	1		Kelautan dan Perikanan		
3	1	17	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1,600,000,000,00	251.271.170,00
3	1	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	3,380,000,000,00	476.153.800,00
3	1	21	Program pengembangan perikanan tangkap	10,979,800,000,00	2,283,732,360,00
3	1	25	Program peningkatan daya saing dan konsumsi ikan	1,500,000,000,00	623,702,120,00
3	1	26	Program Penerapan Mutu Hasil Perikanan	1,550,500,000,00	417,831,396,00
3	1	27	Program Pengelolaan Ruang Laut	1,725,000,000,00	402.895.920,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,416,400,000,00	3.430.037.320,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	748,300,000,00	241.662.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	300,000,000,00	-
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	800,000,000,00	97.452.830.000,00
Sub Total				26.000.000.000,00	8,249,738,916,00
3.02.01			Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
3			URUSAN PILIHAN		
3	2		Pariwisata		
3	2	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3,900,000,000,00	595.691.800,00
3	2	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4,109,000,000,00	12,220,670,000,00
3	2	17	Program Pengembangan Kemitraan	1,100,000,000,00	338.531.100,00
3	2	18	Program Pengembangan Daya Tarik Wisata Menara Siger	375,000,000,00	594.600,00
3	2	19	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Lokal	1,875,000,000,00	426.783.900,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,696,200,000,00	2.398.548.300,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	305,000,000,00	415.103.700,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	190,000,000,00	62.405.100,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	449,800,000,00	26,670,600,00
Sub Total				15,000,000,000,00	16,484,999,100,00
3.03.01			Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Ketahanan Pangan,		
3			URUSAN PILIHAN		
3	3		Pertanian		
3	3	22	Program Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	1,155,000,000,00	316.042.700,00
3	3	23	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan keamanan Pangan	3,612,935,000,00	505.316.350,00
3	3	43	Program peningkatan produksi produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan.	1,388,130,000,00	379.767.450,00
3	3	44	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	1,086,117,300,00	551.155.450,00
3	3	45	Program Penyediaan dan Pengawasan benih tanaman pangan dan holtikultura bermutu dan bersertifikat.	800,000,000,00	85.852.100,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
3	3	46	Program Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura	870,372,000,00	9.535.500,00
3	3	47	Program Peningkatan Pasca Panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan Holtikultura	1,362,175,000,00	30.294.600,00
3	3	48	Program peningkatan pelayanan dan pengembangan Agribisnis Pertanian.	1,824,302,191,00	319.503.600,00
3	3	49	Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Tanaman Pangan dan Holtikultura	15,672,538,000,00	2.093238.655,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,023,260,000,00	4,964,435,013,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,141,345,750,00	1.240.738.200,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	374,999,900,00	70.608.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	826,858,159,00	122.687.800,00
Sub Total				42,500,000,000,00	11.852.026.276,50
3.03.02			Dinas Perkebunan		
3			URUSAN PILIHAN		
3	3		Pertanian		
3	3	33	Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	1,550,000,000,00	1.453.604.350,00
3	3	34	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahandan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan	350,000,000,00	119.404.000,00
3	3	35	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tanaman Tembakau (DBH-CHT)	2,000,000,000,00	936.248.600,00
3	3	36	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkebunan	1,050,000,000,00	4.630.000,00
3	3	37	Program Peningkatan Kelembagaan Perkebunan	425,000,000,00	182.095.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,366,720,000,00	1,669,014,900,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	290,780,000,00	181.512.900,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	87,500,000,00	70.484.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	625,000,000,00	107.714.600,00
Sub Total				7,745,000,000,00	4,725,072,350,00
3.03.03			Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
3			URUSAN PILIHAN		
3	3		Pertanian		
3	3	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3,660,000,000,00	2.610.141.480,00
3	3	39	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	650,000,000,00	400.141.200,00
3	3	40	Program Peningkatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	500,000,000,00	202.139.000,00
3	3	41	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan.	1,600,000,000,00	794.542.700,00
3	3	42	Program Peningkatan Kelembagaan Peternakan	475,000,000,00	253.578.190,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,378,995,000,00	1.674.706.630,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	271,925,000,00	296.700.440,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	56,000,000,00	56.415.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	663,080,000,00	175.346.900,00
Sub Total				9,255,000,000,00	6.6463.711.540,00
3.04.01					
Dinas Kehutanan					
3			URUSAN PILIHAN		
3	4		Kehutanan		
3	4	21	Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kehutanan	1,727,000,000,00	429.673.310,00
3	4	22	Program Pengelolaan DAS dan RHL	1,575,000,000,00	147.133.450,00
3	4	23	Program Perlindungan dan Konservasi Hutan	982,200,000,00	334.849.400,00
3	4	24	Program Penatagunaan dan Pemanfaatan Hutan	456,100,000,00	111.728.895,00
3	4	25	Program Peningkatan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (Unit KPH/Tahun)	17,595,000,000,00	2.762.359.441,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,204,398,500,00	3.160.242.728,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	867,551,500,00	419.603.450,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	70.000.000,00	27.001.950,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	522,750,000,00	47.508.070,00
Sub Total				26,000,000,000,00	7,440,100,694,00
3.05.01					
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral					

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
3			URUSAN PILIHAN		
3	5		Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	5	18	Program Dukungan Program/Kebijakan nasional di bidang ESDM	125.000.000,00	13.250.000,00
3	5	19	Program Pengembangan dan Optimalisasi Pengelolaan Energi	1.000.000.000,00	324.148.300,00
3	5	20	Program Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Geologi	500.000.000,00	140.525.000,00
3	5	21	Program Optimalisasi Inventarisasi dan Evaluasi Data, Pembinaan serta Pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batubara	750.000.000,00	251.993.700,00
3	5	22	Program Dukungan Teknis dan Operasional Cabang Dinas ESDM	2.013.786.600,00	869.466.200,00
3	5	23	Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Ketenagalistrikan	875.000.000,00	289.542.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,113,000,000,00	921.120.200,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	215,000,000,00	106.650.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	90.000.000,00	47.250.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	582,000,000,00	313.200.000,00
Sub Total				7.000.000.000,00	3.277.145.400,00
3.06.01			Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3			URUSAN PILIHAN		
3	6		Perindustrian dan Perdagangan		
3	6	19	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1,811,170,000,00	600,255,000,00
3	6	20	Program Pengembangan Sumber Daya Industri	880,000,000,00	91.817.300,00
3	6	21	Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri.	1,335,000,000,00	476.333.900,00
3	6		Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dan atau/jasa	760,000,000,00	68,078,000,00
3	6	22	Program Pemberdayaan Industri	2,010,000,000,00	724.840.000,00
3	6	23	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	1.211.968.000,00	142.271.250,00
3	6	23	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	1.383.164.500,00	182.601.100,00
3	6	24	Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan dan Workshop Industri.	1.200.000.000,00	182.213.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,710,300,000,00	2.878.617.970,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,203,865,500,00	674.149.200,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	100.000.000,00	72.183.300,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	1,006,500,000,00	267.525.000,00
Sub Total				64,000,000,000,00	13,724,955,540,00
4.01.01			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
4			URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN		
4	1		Perencanaan		
4	1	29	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi	2,700,000,000,00	1,683,743,500,00
4	1	30	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3,250,000,000,00	1.017.716.260,00
4	1	31	Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	3,200,000,000,00	1.300.207.700,00
4	1	32	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Kabupaten/Kota	1,300,000,000,00	728.553.300,00
4	1	33	Program Pengolahan dan Analisis Data Perencanaan	1,050,000,000,00	760.598.000,00
4	1	34	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,740,000,000,00	921.815.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,593,200,000,00	2,703,671,875,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,351,800,000,00	1.763.508.500,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	751,000,000,00	410.423.200,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	1,064,000,000,00	702.969.615,00
Sub Total				20,000,000,000,00	11,993,206,950,00
4.03.01			Badan Keuangan Daerah		
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	2		Keuangan		
4	2	18	Program Peningkatan Kapasitas Anggaran Daerah	1,891,345,000,00	1,873,449,114,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
4	2	19	Program Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan	1,007,968,000,00	665,840,350,00
4	2	20	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Daerah serta Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD	2,079,851,000,00	1,723,332,200,00
4	2	26	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	3,500,662,500,00	3,713,793,625,00
4	2	27	Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan keuangan Kab/Kota serta Investasi Pemerintah Daerah	1,138,460,500,00	979,073,540,00
4	2	28	Program Pengelolaan Aset Daerah	12,255,000,000,00	5.309.691.394,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,284,405,000,00	3.338.267.410,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	347,160,800,00	423.104.915,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1,406,104,400,00	797.009.640,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	344,042,800,00	258,916,455,00
Sub Total				28,255,000,000,00	19,082,478,643,00
4.02.02			Badan Pendapatan Daerah		
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	3		Keuangan		
4	3	21	Program Peningkatan Pelayanan Pajak	1,968,264,600,00	1.462.750.000,00
4	3	22	Program Peningkatan Pelayanan Non Pajak	563,786,000,00	420.241.000,00
4	3	23	Program Peningkatan Pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan	6,211,847,900,00	6.106.772.500,00
4	3	24	Program Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Pendapatan Daerah	661,540,000,00	354.532.300,00
4	3	25	Program Pengembangan Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah	1.135.120.000,00	518.685.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,396,753,100,00	15,327,806,050,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3,667,303,000,00	7.425.604.500,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	623,031,000,00	103.330.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	772,354,400,00	426.095.400,00
Sub Total				25.000.000.000,00	32.145.816.750,00
4.03.01			Badan Kepegawaian Daerah		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	3		Kepegawaian		
4	3	20	Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur	2,855,079,600,00	1.396.301.325,00
4	3	21	Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur	1,029,575,300,00	231.901.500,00
4	3	23	Program Pengadaan dan Mutasi Pegawai	766,733,600,00	5.247.655.444,00
4	3	28	Manajemen Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian	486,620,900,00	129.828.450,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,104,122,700,00	2.042.645.707,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	972,228,000,00	550.483.600,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	61.480.000,00	-
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	474,159,900,00	89.864.900,00
Sub Total				8,750,000,000,00	9.688.680.926,00
4.04.01					
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah					
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	5		Pendidikan dan Pelatihan		
4	5	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	5,419,336,000,00	15,549,338,900,00
4	5	17	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	1,380,000,000,00	724.356.000,00
4	5	18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	2,220,000,000,00	1.075.850.000,00
4	5	21	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	507,960,000,00	340.806.000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,669,090,700,00	3.612.935.500,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,555,600,700,00	1.508.966.700,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	570,883,000,00	583.213.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	677,129,600,00	476.941.800,00
Sub Total				15,000,000,000,00	23,872,407,900,00
4.05.01					
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah					
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	5		Penelitian dan Pengembangan		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
4	5	16	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	975.000.000,00	686.771.400,00
4	5	17	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	950.000.000,00	459,170,000,00
4	5	18	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	750,000,000,00	375.928.300,00
4	5	19	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Penguatan Inovasi Daerah	975,000,000,00	520.619.100,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,376,762,900,00	1.159.629.550,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342,505,800,00	321.500.5000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	630,731,300,00	450.029.400,00
Sub Total				6,000,000,000,00	3,973,648,250,00
4.06.01				Badan Penghubung	
4			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	6		Penghubung		
4	6	17	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Lampung di Luar Daerah	3,515,174,900,00	1.240.395.450,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,795,817,300,00	3.575.162.600,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,697,677,200,00	592.570.532,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	124,316,400,00	18.000.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	342,214,200,00	12.689.850,00
Sub Total				9,475,200,000,00	5,438,818,432,00
5.01.01				Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	60	Program Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1,800,000,000,00	943.505.400,00
5	1	72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Otonomi Daerah	400,000,000,00	529.670.560,00
Sub Total				2,200,000,000,00	1,473,175,960,00
5.01.02				Biro Kesejahteraan Rakyat	
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
5	1	61	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	34,450,000,000,00	34,298,640,688,00
5	1	73	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Kesejahteraan Rakyat.	550,000,000,00	362,477,200,00
Sub Total				35,000,000,000,00	34,661,117,888,00
5.01.03			Biro Hukum		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	58	Program Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Advokasi Hukum	2,450,000,000,00	1,266,031,100,00
5	1	74	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Hukum	350.000.000,00	199.405.500,00
Sub Total				2,800,000,000,00	1.465.436.600,00
5.01.04			Biro Perekonomian		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	59	Program Koordinasi Peningkatan Perekonomian Daerah	4,000,000,000,00	1,718,088,550,00
5	1	75	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Perekonomian	1,000,000,000,00	501,219,615,00
Sub Total				5,000,000,000,00	2,219,308,165,00
5.01.05			Biro Pengadaan Barang dan Jasa		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	69	Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5,600,000,000,00	3,441,810,200,00
5	1	71	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Pengadaan Barang dan Jasa	400,000,000,00	279.649.000,00
Sub Total				6,000,000,000,00	3,721,459,200,00
5.01.06			Biro Administrasi Pembangunan		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	31	Program Penataan dan Peningkatan Administrasi Pembangunan	1,925,000,000,00	753.061.500,00
5	1	76	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Administrasi Pembangunan	575,000,000,00	418.728.800,00
Sub Total				2,500,000,000,00	1,171,790,300,00
5.01.07			Biro Organisasi		
5			FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN		
5	1		SETDA		
5	1	52	Program Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Daerah	2,285,000,000,00	646.339.750,00
5	1	77	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Organisasi	515,000,000,00	621.517.500,00

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
Sub Total				2,800,000,000,00	1,267,857,250,00
5.01.08			Biro Umum		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	70	Program Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Kerumahtanggaan Setda	26,295,000,000,00	41,460,214,700,00
5	1	78	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biro Umum	6,450,000,000,00	8,271,400,000,00
Sub Total				32,745,000,000,00	49,731,614,700,00
5.01.09			Biro Administrasi Pimpinan		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	1		SETDA		
5	1	18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	2,900,000,000,00	1.444.454.650,00
5	1	50	Program Pelayanan Keprotokolan KDH/WKDH	2,380,000,000,00	2.307.267.700,00
5	1	79	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Pimpinan	720,000,000,00	2.470.651.140,00
Sub Total				6,000,000,000,00	6,222,373,490,00
5.02.01			Sekretariat DPRD		
5			URUSAN PENDUKUNG		
5	2		Set DPRD		
5	2	15	Program peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah	4,472,404,000,00	15.962.034.600,00
5	2	16	Program Pembahasan, Sosialisasi, Dokumentasi, Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum	5,682,219,600,00	62.264.221.889,00
5	2	17	Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	31,660,159,200,00	47.310.567.403,00
5	2	18	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	11,792,564,400,00	39,216,987,331,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	14,293,717,400,00	20,700,227,315,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4,448,380,800,00	11,230,539,306,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	4,038,488,500,00	6,461,052,900,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	3,612,066,100,00	4.542.126.259,00
Sub Total				80,000,000,000,00	207,687,757,003,00
5.03.01			Inspektorat		
5			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		

Kode			OPD / Urusan / Bidang / Program	PAGU INDIKATIF RKPD 2020	PAGU PERUBAHAN RKPD 2020
5	1		Inspektorat		
4	1	15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	5,743,743,000,00	4,166,570,100,00
4	1	17	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	1,162,583,000,00	1,021,917,600,00
4	1	18	Program Peningkatan Sistem Pembinaan dan Prosedur Pengawasan pada Obyek Pengawasan	1,137,057,000,00	530,228,000,00
4	1	19	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	392,310,000,00	165,251,000,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,685,138,000,00	2.252.309.500,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	346,169,000,00	543.090.900,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	33.000.000,00	8.930.000,00
Sub Total				10,500,000,000,00	8,688,297,100,00
6.01.01			Badan Kesbangpol		
6			URUSAN KESBANGPOL		
6	1		Kesbangpol		
6	1	25	Program Pembinaan Idiologi dan pengembangan wawasan kebangsaan	813,420,000,00	194.773.500,00
6	1	26	Program Kewaspadaan Nasional	790,128,100,00	470.899.400,00
6	1	27	Rapat Ketahanan Sosial dan Masyarakat	805,827,100,00	204.630.600,00
6	1	28	Program Politik Dalam Negeri	822,851,400,00	204,537,100,00
1			URUSAN PENDUKUNG		
1	1		Non Urusan (Eks BAU)		
1	1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,725,905,800,00	1,619,013,900,00
1	1	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	297,629,800,00	172.350.000,00
1	1	03	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	88,066,000,00	44.033.000,00
1	1	04	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	656,171,800,00	374.298.700,00
Sub Total				6,000,000,000,00	3.284.536.200,00

Sumber Data: RKPD Perubahan 2020



1.1.3. CAPAIAN KINERJA MAKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,57	69,69	0,12
2	Angka Kemiskinan	13,14	12,34	0,8
3	Angka Pengangguran	4,08	4,67	0,13
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,05	0,22
5	Pendapatan Per Kapita	42,23	41,62	0,61
6	Ketimpangan Pendapatan	0,330	0,327	0,003

Sumber data: Bappeda


BAB VI
INOVASI DAERAH
DATA INOVASI DARI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 2020

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung	Lampung Mengajar
		Museum Masuk Desa
		SMAN 1 Pringsewu Sebagai SMA Program Kewirausahaan Tahun 2018
		PROGRAM KEWIRAUSAHAAN BATIK TULIS DI SMA N 3 METRO TAHUN 2018
		SMAN 1 Pringsewu Sebagai SMA Program Kewirausahaan Tahun 2018
		Rancang Bangun PSBS (Pusat Sumber Belajar Sekolah) - SMAN 1 B. Lampung
		INOVASI PENILAIAN BERBASIS CBT (COMPUTER BASED TEST) SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
		PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DI SMA N 3 METRO TAHUN 2018
		MESIN PEMINDAH GAS METHAN SECARA ABSORBSI KE DALAM TABUNG INOVASI ENERGI TERBARUKAN SMKN UNGGUL TERPADU ANAK TUHA
		Kelas Industri SMKN 1 Bakauheni dengan PT. SEAPI
		Pendidikan Antikorupsi
		Minuman Segar dari Sari Biji Nangka Inovasi Pemanfaatan Limbah Pertanian di SMKN Unggul Terpadu Lampung Tengah Anak Tuha
		Teknik Pembuatan Pakan Ikan ATC Pemanfaatan Limbah Cumi SMK Negeri 2 Kalianda
		Daur Ulang Kertas Semen Tiga Roda Menjadi Handycraff (SMA N 3 METRO)



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		Metode Pembelajaran Eksperimen Secara Daring di Masa Pandemi Kelas XI Teknik Energi Biomassa SMKN Unggul Terpadu Anak Tuha
		Video pembelajaran 1 Minute Smart Sosiologi Untuk Mata Pelajaran Sosiologi di SMA N 3 Metro
		Gerakan Literasi Sekolah SMAN 1 Jabung Lampung Timur
		Smart School Lampung Berjaya
		KOMUNIKASI REMAJA (Anggota Ekskul SKR) SMA Negeri 1 Terbanggi Besar DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA RADIO
		ZAVATRIK MFC (ORIZA SATIVA BIO ENERGI LISTRIK MICROBIAL FUEL CELL) SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO
		"Sekolah Berbasis Kewirausahaan" SMAN 3 Bandar Lampung
		Pengembangan dan Potensi Lobster Laut di Pesisir Barat SMKN 1 Ngambur
		Pemanfaatan Google Classroom dan Google Meet sebagai solusi Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 di SMAN 3 Kotabumi
		PENGEMBANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEHAT "ALEBY STICK" UNTUK ANAK SEKOLAH DASAR BERBAHAN SINGKONG (MANIHOT SP) DAN IKAN LELE (CLARIAS SP)
		Produksi dan Pemasaran Sesam Ikan Lumo (Prakarya SMA Negeri 3 Kotabumi)
		PALASTIK (Pemanfaatan Sampah Plastik dan Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Paving Block) SMAN 1 Bandar Sribhawono
		APLIKASI SI - MANDA (SMA NEGERI 2 GADINGREJO)
		RADIKSMA (Radio Pendidikan SMAN 1 Gadingrejo) Streaming sebagai media pembelajaran jurnalistik siswa
		Produksi dan Pemasaran Kaghing Ikan Lumo (Prakarya SMA Negeri 3 Kotabumi)
		Penilaian Akhir Semester dengan menggunakan metode CBT di SMAN 1 Gadingrejo
		Pembelajaran Aksara Lampung "Kaganga" Aplikasi Mobile
		PEMANFAATAN ECENG GONDOK SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF KERTAS NASI RAMAH LINGKUNGAN (SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO)
		Nata De Melo (Pemanfaatan Limbah Kulit Melon Sebagai Bahan Alternatif Pembuatan Nata) SMAN 1 Bandar Sribhawono



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		To Me Bank SMK Muhammadiyah Tumijajar
		Penerapan mata pelajaran Seni Budaya dalam produk Batik Celup karya siswa SMAN 1 Gadingrejo
		Taman Baca SMAN 1 Gadingrejo hasil kerjasama dengan CSR Bank BCA
		PROGRAM KEWIRAUSAHAAN SMAN 1 KALIREJO
		PEMANFAATAN AMPAS TEBU SEBAGAI BAHAN ALTERNATIF BIOFOAM (SMAN I BANDAR SRIBHAWONO)
		SMA Negeri 3 Kotabumi Sekolah Bersedekah
		Penerapan se-jam berbahasa lampung di lingkungan SMAN 3 Kotabumi
		Program Lampung Mengaji di SMAN 1 Kalirejo
		Sistem Manajemen Informasi SMA NEGERI 1 KOTAGAJAH
		PROGRAM AKSARA DAN BUDAYA LAMPUNG DI SMAN 1 KALIREJO
		PROGRAM PENINGKATAN IMAN dan TAQWA Siswa Siswi SMA NEGERI 1 TERBANGGI BESAR TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
		PEMANFAATAN AMPAS MINUMAN BIJI NANGKA MENJADI OLAHAN NUGET NABATI PRODUK APHP SMKN UNGGUL TERPADU ANAK TUHA
		Reduce, Reuse, Recycle Kain Perca Tanpa Sisa SMK Yadika Pagelaran
		Inovasi Hidroponik Dalam Proses Pembelajaran di Sekolah SMA Negeri 1 Banjit Mata Pelajaran Kewirausahaan
		Gerakan Literasi Sekolah SMAN 10 Bandar Lampung
		PERPUSTAKAAN SMAN 10 Bandar Lampung
		To Me Coffe SMK Muhammadiyah Tumijajar Tulang Bawang Barat
		Bazar Kewirausahaan SMA Negeri 3 Kotabumi
		3 Pendidikan Karakter SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara
		AIRATOR VAKUM TAK LANGSUNG PADA AKUARIUM TERBALIK (SMAN 3 KOTABUMI)
		INOVASI MENU MAKANAN BERBAHAN BAKU IKAN
		Pembuatan Bioetanol Dari Ekstrak Rumput Gajah (SMK Negeri 2 Metro)
		Sistem Aquaponik dan Alat Penyiram Tanaman Otomatis berbasis Arduino (SMK Negeri 2 Metro)



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		Pemanfaatan limbah daun serai (Cymbopogon citratus) sebagai alternatif bahan baku pembuatan kertas (SMA Negeri 1 Metro)
		PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI KOTORAN TERNAK (KAMBING) DI JURUSAN ATR SMKN 1 PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR
		Pembuatan spray anti nyamuk (nature magic spray) berbahan dasar umbi rumput teki (Cyperus rotundus) dalam upaya pemanfaatan limbah organik (SMA Negeri 1 Metro)
		Pembuatan spray anti nyamuk (nature magic spray) berbahan dasar umbi rumput teki (Cyperus rotundus) dalam upaya pemanfaatan limbah organik (SMA Negeri 1 Metro)
		Pemanfaatan limbah daun serai (Cymbopogon citratus) sebagai alternatif bahan baku pembuatan kertas (SMA Negeri 1 Metro)
		JATRICASIDA (Pemanfaatan Biji Jarak dan Daun Pepaya Sebagai Pembasmi Hama Jangkrik) Di SMA NEGERI 1 KALIREJO Tahun 2019
		PMS (Pertanian Masuk Sekolah) SMA Negeri 9 Bandar Lampung
		Pemanfaatan Serbuk Rumput Teki (Cyperus rotundus L) dan Serbuk Lada (Piper nigrum) dalam Pengendalian Hama Gudang Di SMAN 1 Kalirejo 2019
		Studi Eksperimen Briket Ampas Kelapa Sebagai Bahan Bakar Alternatif Dalam Rumah Tangga (SMAN 1 B. LAMPUNG)
		Aplikasi e-Jurnal SMAN 1 Pringsewu
		“Kocaren “ suplemen alami asam urat dan radang sendi (SMA Negeri 1 Metro)
		Festival Judo International yang di ikuti Siswa/I SMA NEGERI OLAHRAGA LAMPUNG
		Smart Gabarbage Bin dengan sensor Berbasis mikrokontroler atmega 3585
		Cuci Tangan Tanpa Sentuh (Menggunakan Pedal)
		Pojok Literasi Kelas SMA Negeri 1 Kalianda
		Radio Streaming Untuk Pendidikan
		Aplikasi Perangkat Ajar Guru - Sekolah Menengah Kejuruan
		Server DAPODIK Online (SMAN 1 Padang Cermin)
		Thailor (Thai Tea Daun Kelor) SMK Yadika Pagelaran
		SADILA (Sistem Informasi Digital Sekolah)



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		<p>Mesin Adsorpsi Gas Methan melalui Sistem Kompresi</p> <p>RANCANG BANGUN MESIN PEMARUT DAN PEMERAS SANTAN DI UNIT PRODUKSI BENGKEL MESIN SMK NEGERI 2 TERBANGGI BESAR</p> <p>PERPUSTAKAAN HIDUP SMK Negeri 1 Kota Metro</p> <p>Pembuatan spray anti nyamuk menggunakan kombinasi daun pucuk merah (<i>Syzygium oleana</i>) dan limbah kulit rambutan (<i>Nephelium lappaceum</i>) SMA Negeri 1 Metro</p> <p>Pembuatan spray anti nyamuk menggunakan kombinasi daun pucuk merah (<i>Syzygium oleana</i>) dan limbah kulit rambutan (<i>Nephelium lappaceum</i>) SMA Negeri 1 Metro</p> <p>PEMANFAATAN LIMBAH KULIT PISANG AMBON SEBAGAI ALTERNATIF AROMA DALAM PRODUK PARFUM</p> <p>Pembuatan Media Tanam Sayuran Hidroponik di SMK Kosgoro 1 Sribhawono</p> <p>PEMANFAATAN LIMBAH KULIT PISANG AMBON SEBAGAI ALTERNATIF AROMA DALAM PRODUK PARFUM</p> <p>Smart Garbage Bin dengan sensor Berbasis mikrokontroler atmega 3585</p> <p>Taman Mini Hidroponik Lahan Vertikal</p> <p>Pojok Baca Portable</p> <p>PENGEMBANGAN MAKANAN TAMBAHAN SEHAT "ALEBY STICK" UNTUK ANAK SEKOLAH DASAR BERBAHAN SINGKONG (<i>MANIHOT SP</i>) DAN IKAN LELE (<i>CLARIAS SP</i>)</p> <p>Double Job kopi (Seni Budaya SMAN 3 Kotabumi)</p>
2.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung	<p>Pembinaan Aktivitas pertambangan masyarakat</p> <p>penyebarluasan informasi kebijakan konservasi energi</p> <p>Biogas Untuk Masyarakat Kab/Kota. Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah</p> <p>Pengembangan dan Pendayagunaan Air Tanah</p> <p>sms gateway laporan pbbkb</p> <p>Tim Reaksi Cepat Aduan dan Aspirasi Masyarakat</p> <p>Mitigasi Kebencanaan Geologi</p> <p>K3 pada Pengusahaan Mineral dan Batubara</p>



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		sosialisasi penghematan listrik
		PLTS Terpusat
		Pengaturan Harga LPG 3Kg
		K3 Ketenagalistrikan
		Pemetaan Potensi Energi Angin
		Pendataan Potensi Energi Air
		Pendataan Potensi Energi Angin
		Pendataan Potensi Panas Bumi
		Pemetaan Potensi Biomassa
		Pemetaan Potensi Panas Bumi
		Pemetaan Potensi Energi Air
		Pendataan Potensi Biogas
		Pendataan Potensi Bioethanol
		Pendataan Potensi Biomassa
		Pemetaan potensi biogas
		Pemetaan potensi bioethanol
		Penyusunan Raperda Rencana Umum Energi Daerah
		Penyusunan Substansi Rencana Umum Energi Daerah
		Roadmap Pengelolaan Energi Daerah
		Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan
		Pemetaan Potensi Energi Surya
		Rencana Ketenagalistrikan Daerah
		Sosialisasi pemanfaatan biogas
3.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	InlisLite Perpustakaan Lampung
		Pengembangan Minat Baca
		Jurnal Tawit Pustaka
		Student File



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		Gerakan Lampung Membaca Pilot Project Tertib Arsip Penguohan Bunda Literasi Provinsi Lampung Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah Tingkat SLTA 2018 Bedah Buku bersama Penulis Pembinaan Perpustakaan Pada Desa Se Provinsi Lampung Berupa Belanja Hibah Barang Kepada Masyarakat Pembinaan Perpustakaan Pada Desa se Provinsi Lampung Berupa Belanja Hibah Barang dan Jasa Sosialisasi dan Publikasi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya rekam Pembinaan Perpustakaan Kab/Kota se Provinsi Lampung Berupa Belanja Hibah Buku dan Rak Buku untuk Perpustakaan Desa 5 kab/kota Diklat Pengelola Perpustakaan
4.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung	SIDa Agroekowisata Pedoman Tata Kelola SMA, SMK dan PKLK Pemberdayaan Pemerintahan dan Perekonomian Desa Desiminasi Hasil Riset/Inkubasi Inovasi Penguatan IPTEK dan Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Sistem Riset dan Inovasi Daerah Optimalisasi Moda Transportasi Lampung Kajian Inovasi Pengentasan Kemiskinan Percepatan Revitalisasi Lada Jurnal Inovasi Pembangunan Gerbang Pelana



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
5.	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	E-LHKPN Anggota DPRD Provinsi Lampung
		Penyediaan Pakaian Dinas Untuk 85 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung
		SOSPER (SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)
		Pembuatan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
		RANCANGAN PERDA
		DPRD TV
6.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Jaminan Kesehatan Sakai Sambayan
		Permata Bunda
		GO LAB (Pelayanan Jemput Sampel Pasien ke Rumah)
		ISTITHAAH
		Rumah Sakit Keliling (Mobile Clinic)
		Posbindu cerdas jiwa
		GETAR
		Lampung Stunting Agency
		BINWIL BANGKES
		PHA PARTIAL
		Akselerasi Akreditasi RumahSakit Di Provinsi Lampung
		APGADU
		Ketuk Tular
Diklat PKM Ahli		
7.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	SAMOLNAS
		Samsat Link
		Info Pajak
		iSamsat
		e-PAP



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		e-Samsat Lampung (e-Salam) Mobile-EIS e-PBBKB Samsat Ladies
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Pelatihan UMKM secara online Pelayanan Konsultasi melalui Website PLUT One Village One koperasi (OVOK) Layanan Promosi Produk Dagang Peningkatan Kualitas SDM Koperasi (Bedah Koperasi) Pelayanan Pembuatan Izin Usaha Penumbuhan Wirausaha Pemula bagi Mahasiswa melalui koperasi mahasiswa Branding UMKM dengan Perbankan Penumbuhan Wirausaha bagi Pondok Pesantren Pengembangan Kerajinan Khas Lampung beserta Evolusinya Kerjasama Stakeholders membangun rumah kreatif
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Penerapan pengelolaan perikanan rajungan Peningkatan Standar Pelayanan Pengujian UPTD PMHP melalui penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 Satu Data (Aplikasi Statistik KP) Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Peningkatan peran UPTD PMHP menjadi Lembaga sertifikat produk hasil perikanan (LS-Pro HP) sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		Penerapan Pelelangan Ikan Hygenis di TPI di Labuhan Maringgai dan TPI Lempasing Pembangunan TPI Hygienis melalui dana APBN di UPTD PPP Lempasing dan PPP Labuhan Maringgai
10.	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Pelajar Pelopor AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) Kartu Pengawasan Angkutan Umum Elektronik PENGELOLAAN TERMINAL TIPE B Kerjasama Bus Aglomerasi Kartu Pengawasan Elektronik ANDALALIN (Analisis Dampak Lalu Lintas)
11.	Badan Kesbangpol Provinsi Lampung	Rakor Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemda dengan Elemen Masyarakat dan Intelkam se-Provinsi Lampung Sosialisasi Pencegahan Narkotika Harmonisasi Lintas Agama Sosialisasi Rembug Desa Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi Ormas di Provinsi Lampung Pembinaan Pondok Pesantren Dialog Penanganan Warga Negara Asing dan Ormas Asing serta Pencari Suaka di Provinsi Lampung Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sosialisasi Anti Radikalisme dan Terorisme bagi Pelajar di Provinsi Lampung Dialog Penanganan Warga Negara Asing dan Ormas Asing serta Pencari Suaka di Provinsi Lampung Pusat Pengendalian Krisis (PUSDALSIS) Provinsi Lampung Dialog Wawasan Kebangsaan bagi Guru SMA/SMK se-Provinsi Lampung



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
12.	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung	E-Billing System
		Pelayanan Jasa Perlindungan Tanaman UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Informasi Pelayanan melalui Website UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar
		Pendaftaran Sertifikasi/Registrasi Secara Online UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar
		Pengaduan Secara Online UPTD Sertifikasi Produk Pangan Segar
		Pelayanan Brigade Alsintan
13.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Aplikasi E-Kinerja
		Aplikasi Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu (SAPKT)
		Pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Administrasi
		Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Berbasis CAT (Computer Assisted Test)
		Seleksi Terbuka JPTP Provinsi Lampung
14.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah (SIPPKD)
		Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (SIPPKD MODUL E-PLANNING)
		Sistem Monitoring dan Evaluasi
		Geoportal Lampung Satu Peta Provinsi Lampung
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Posko Siaga Bencana
		Pendidikan Konseling Pasca Bencana
		Peningkatan Kapasitas Pelajar Terhadap Penanggulangan Bencana
		Pembentukan Desa Tangguh Bencana
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Cafe INVESTASI DPM & PTSP
		Pengaduan Online



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		Pembentukan Ruang Layanan Perizinan
17	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	PIL TRALIS TEGAK PERDA
37	BPSDM Provinsi Lampung	SIAP DIKLAT - Sistem Aplikasi Diklat Diklat Revolusi Mental Bagi Pejabat Pengawas Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan Diklat Bela Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Majalah Ilmiah/Buletin BPSDM Daerah Provinsi Lampung Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur di Lingkungan Pemerintah kab/Kota se Provinsi Lampung
18	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung	Sistem Verifikasi Penyedia (SEVIA) Aplikasi Buku Tamu (SIBUTA)
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada budidaya ayam petelur Up Grading Kambing Lokal "Si Kucing" (Sistem Pelayanan Kunjungan Keliling) Isikhnas (integrated system informasi kesehatan hewan nasional)
20	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung	Pendaftaran Pasien Secara Online Layanan Pengaduan Konsumen Secara Online
21	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Gerakan Lampung Menghijau (GELAM) Aplikasi Arsip Surat Dinas Berbasis IT Bantuan Alat Ekonomi Produktif (BAEP) Publikasi Pembangunan Kehutanan melalui Media Sosial



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		Sistem Online Penilaian Kinerja Pegawai (E-Kinerja)
		Absensi Online (melalui aplikasi <i>finger print</i>)
		Penerapan Aplikasi SIPPD
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah (SIPPKD)
23	Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	SI-MANJA (Sistem Informasi Manajemen Analisis Jabatan)
		Budaya Kerja SIGER EMAS
24	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	SALAM DLH
		BANKSAM BERJAYA
		PERNIK DLH (Perencanaan klinik Dinas Lingkungan Hidup)
		SILABO (SIGAP LAYANAN LABORATORIUM)
		AKSI BERJAYA (ADIWIYATA KREATIF SOLIDARITAS INOVASI BERINTEGRITAS MENJAGA KEKAYAAN ALAM)
		(PEKA KAMI DLH) PENGUATAN KAPASITAS KAMPUNG IKLIM
25	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung	Tim Koordinasi Kerjasama Daerah Provinsi Lampung
		Usulan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi Lampung
		MoU Kerjasama Pengelolaan Participating Interest
		MoU Pemerintah Lampung dengan Perbankan
		MoU bersama Pupuk Sriwijaya
		MoU Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik
		Mediasi Sengketa Lahan
		Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
26	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistk Provinsi Lampung	Call Center
		Ruwa Jurai
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
		Command Center
		Mobil Unit Informasi
27	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Layanan Pengadaan Barang dan jasa secara elektronik
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Harga Komoditas Dipasar Provinsi Lampung
		Video animasi tentang edukasi ekspor, tatacara impor, Standar Nasional Indonesia (SNI), Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi mutu komoditi (sertifikat komformiti) yang dikeluarkan oleh UPTD BPSMB, Perlindungan konsumen yang disampaikan melalui media sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)
30	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung	Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
		Program Akreditasi pada Laboratorium Balai K3 Provinsi Lampung
		Program Akreditasi pada Laboratorium Pengujian Balai K3 Provinsi Lampung
		Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja di Perusahaan se-provinsi Lampung
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung	Pelaksanaan Launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (#GISA)
		FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG
		Aplikasi Pelaporan Online Layanan Harian Administrasi Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
		Pembuatan Website Pendaftaran Online Layanan Pencatatan Sipil di Disdukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
		FORUM KOMUNIKASI KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG
32	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung	Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Melibatkan Masyarakat Sekitar melalui Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
33	Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Provinsi Lampung (Billing System)
34	Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung	Q-ROCK (Quick Response Code) SISTER (Sistem Informasi Surat Terpadu)
35	Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung	Peningkatan Pendidikan Santri Hafidzh/Hafidzah se Provinsi Lampung Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data (SIMADA)
36	Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta	Pelayanan Ambulance Untuk Masyarakat Lampung di Jakarta
37	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembentukan Klinik Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Trauma Healing Pasca Bencana
38	Biro Umum Setda Provinsi Lampung	Media Informasi Biro Umum Lampung
39	Dinas Sosial Provinsi Lampung	Gerakan Ayo Kuliah (GAK)
40	RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Reservasi Online RSUD.Dr.H.Abdul Moeloek QUICK RESPON SIAP RSUDAM
41	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya	Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI
	Provinsi Lampung	Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Lampung
42	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Penetapan calon kebun sumber benih lada tahun 2019 TEKNIK SAMBUNG SUSU, SALAH SATU TEKNIK REHABILITASI TANAMAN KAKAO
43	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	Unit Reaksi Cepat Bina Marga Jaya (URC Bima Jaya)
44	Inpektorat Provinsi Lampung	footnote kop inspektorat kertas kerja pemeriksaan
45	Biro Hukum Provinsi Lampung	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Berbasis Android Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis Android
46	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung	Layanan Call Center Pariwisata
47	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung	Pendataan Sarana dan Perasarana olahraga, Pemuda dan data atlet Berbasis Web.
48	Rumah Sakit Bandar Negara Husada	Inovasi Layanan Lampung (INOLA)





PROVINSI LAMPUNG

Secara Yuridis Formal Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Tanggal 18 Maret 1964, yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan dengan kedudukan sebagai Keresidenan Lampung pada saat pembentukannya ibukota Provinsi Lampung adalah Kota Praja Tanjung Karang - Telukbetung. Kota Praja Tanjung Karang-Teluk Betung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berubah menjadi Kotamadya Tanjung Karang - Telukbetung. Selanjutnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 Tanggal 17 Juni 1983, nama Kotamadya Tanjung Karang - Telukbetung diganti menjadi Kotamadya Bandar Lampung.

Secara administratif, Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten / Kota dengan Luas Wilayah 35.288,35 k'm yang terbagi menjadi 13 Kabupaten dan 2 Kota.



Biro Pemerintahan & Otda
SERIKABECY LAMPUNG